



RENCANA KERJA &
ANGGARAN
PERUSAHAAN
2025

**PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUM LKBN ANTARA TAHUN 2025**

Direksi Perum LKBN ANTARA:

1. Menyatakan bertanggung jawab atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2025.
2. Pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum LKBN ANTARA tahun 2025 telah diupayakan untuk disusun dan disajikan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Direktur Utama



Akhmad Munir

Direktur Pemberitaan



Irfan Junaidi

Direktur Komersil,
Pengembangan Bisnis dan TI



Jaka Sugiyanta

Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko



Nina Kurnia Dewi

PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS ATAS PENYAJIAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUM LKBN ANTARA 2025

Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perum LKBN ANTARA tahun 2025 yang disajikan Direksi sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Jakarta, 31 Oktober 2024
Dewan Pengawas



Kemal Gani
Ketua



Widodo Muktiyo
Anggota



Mayong Suryo Laksono
Anggota



Monang Sinaga
Anggota



Ariawan
Anggota



Virgandhi Prayudantoro
Anggota

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Perusahaan	1
2. Visi dan Misi Perusahaan	2
3. Maksud dan Tujuan Perusahaan.....	2
4. Budaya Perusahaan.....	3
5. Struktur Organisasi Perusahaan	4
6. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan	5
7. Profil Sumber Daya Manusia	6
8. Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan.....	8
BAB II.....	9
KINERJA DAN PROGNOZA RKAP 2024.....	9
1. Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan	9
2. Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan	9
3. Pencapaian Target KPI Korporat dibandingkan RKAP.....	13
4. Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP	21
5. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dibanding RKAP	22
BAB III.....	23
RENCANA KERJA ATAS PENUGASAN PEMERINTAH	23
1. Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA.....	23
2. Gambaran PSO 2024	25
3. Ruang Lingkup Pemberitaan PSO.....	25
4. Saluran Distribusi Berita PSO.....	26
5. Hak dan Kewajiban PSO.....	26
6. Nilai Perjanjian PSO.....	27
7. Jangka Waktu PSO.....	27
8. <i>Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO</i>	27
9. Mekanisme Tindak Lanjut	31
10. Gambaran PSO 2025	31

BAB IV	34
RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025	34
1. Kondisi yang Mempengaruhi RKAP 2025.....	34
2. Asumsi Penyusunan RKAP 2025.....	37
3. Misi Perusahaan.....	38
4. Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan.....	38
5. Program Kegiatan	42
6. Rencana CAPEX dan Investasi Anorganik.....	61
7. Rencana Kontribusi Perusahaan Kepada Negara	62
8. Kebijakan Perusahaan.....	63
BAB V	64
RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS	64
1. Pendahuluan.....	64
2. Dasar Hukum.....	64
3. Maksud dan Tujuan.....	65
4. Susunan Dewan Pengawas.....	65
5. Pembagian Tugas Dewan pengawas dan Komite Dewan Pengawas	65
6. Rencana Kerja Dewan Pengawas Tahun 2025	66
7. Metode Pelaksanaan Pengawasan	70
8. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	70
9. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas	71
10. Aspek Pelaporan.....	71
BAB VI	72
ANGGARAN PERUSAHAAN.....	72
1. Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha	72
2. Anggaran Pendapatan Usaha.....	72
3. Anggaran Biaya Usaha.....	74
A. Berdasarkan Akun	74
B. Berdasarkan Unit.....	76
4. Laba Bruto Persegmentasi Komersil.....	78
5. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya	79

6.	Anggaran Investasi dan Pengembangan.....	80
7.	Anggaran Penelitian dan Pengembangan	82
8.	Anggaran Sumber Daya Manusia.....	82
9.	Anggaran Teknologi Informasi	83
BAB VII.....		84
PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN		84
1.	Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan.....	84
2.	Proyeksi Laba/Rugi.....	85
3.	Arus Kas	86
4.	Proyeksi Pokok Keuangan Anak Perusahaan (AETP)	87
BAB IX.....		90
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN.....		90
1.	Kondisi Umum	90
2.	<i>Aspek Environment, Social and Governance (ESG)</i>	92
3.	Gambaran Singkat Kinerja Program TJSL sampai dengan Prognosa 2024	95
4.	Proyeksi Kinerja Program TJSL Tahun 2025	99
5.	Target Kinerja.....	105
BAB X.....		106
RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI		106
1.	Pengaruh Faktor Eksternal	106
2.	Kondisi Internal Perusahaan	107
3.	Organisasi Divisi Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA	108
4.	Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Masterplan 2022-2026).....	109
5.	Inisiatif Teknologi Informasi 2025	111
BAB XI.....		116
PROFIL MANAJEMEN RISIKO		116
1.	Gambaran Umum	116
2.	Matriks Strategi Risiko.....	118
3.	Figur RKAP 2025 Berbasis Manajemen Risiko	120
4.	Gambaran Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN	123
5.	Kriteria Penilaian Dampak dan Probabilitas	124
6.	Heatmap.....	125
7.	Ringkasan Risiko Utama.....	130

8.	Rencana Penyusunan <i>Contingency Plan</i>	144
9.	Rencana Pelaksanaan Roadmap ICoFR.....	146
10.	Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian RMI.....	147
11.	Tagging Program Kerja dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	150
12.	Program Kerja Manajemen Risiko.....	152
13.	Rencana Kerja Internal Audit 2025	153
BAB XII		156
ASPIRASI PEMEGANG SAHAM		156
1.	Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN	156
2.	Strategi risiko BUMN	157
3.	Aspek ESG dalam APS.....	160
4.	Visi dan Misi Klaster Masterplan 2025-2029 dan Arah Taktis RKAP 2025.....	162
5.	Aspirasi Pemegang Saham (APS) Fungsi Keuangan	162
6.	APS Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.....	163
7.	APS Fungsi Sumber Daya Manusia.....	164
8.	APS Fungsi Teknologi dan Informasi	164
9.	APS Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	166
10.	APS Lainnya	167
BAB XIII		168
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUSAHAHAAN		168
BAB XIV.....		179
HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KEPUTUSAN MENTERI		179

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA¹ adalah Kantor Berita milik Negara di bidang media massa arus utama, memproduksi dan mendistribusikan berita multimedia.

Kantor Berita ANTARA didirikan oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawigoena pada 13 Desember 1937. Seiring dengan perkembangan organisasi, LKBN ANTARA resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dengan status badan hukum perusahaan umum (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007. Nama LKBN ANTARA kemudian menjadi Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (Perum LKBN ANTARA) sejak 18 Juli 2007 dan mulai merambah berbagai lini bisnis berbasis konten, komunikasi, pengelolaan data dan pendidikan.

Kantor Pusat Perum LKBN ANTARA bertempat di Kompleks Antara Heritage Center (AHC), Jalan Antara Kav. 53-61, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 serta memiliki Kantor Operasional di Wisma Antara® Jalan. Cikini IV No.11, Cikini, Jakarta Pusat 10350. Selain itu, Perusahaan memiliki 32 Kantor biro perwakilan di dalam negeri dan 2 perwakilan di luar negeri.

Lini Usaha	Uraian
Pemberitaan	Berita teks, foto, video, infografis, dan podcast merupakan produk utama perusahaan yang tersebar ke pelanggan (surat kabar maupun media online) di seluruh daerah Indonesia dan puluhan negara sahabat.
Layanan Data	Kantor Berita ANTARA – bekerja sama dengan Bloomberg dan Reuters – merupakan salah satu pemain utama dalam penyediaan layanan data finansial dengan pelanggan meliputi lembaga-lembaga negara (Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan) serta lembaga finansial lainnya.
Layanan Komunikasi Strategis	Layanan komunikasi terpadu merupakan salah satu produk unggulan LKBN ANTARA yang menyediakan kebutuhan komunikasi mulai dari PR consulting, pendidikan kehumasan, MICE, distribusi berita, dll.
Penugasan Pemerintah	Setelah menjadi Perum pada 2007, pada 2008 mendapat penugasan melalui Public Service Obligation (PSO) dalam bidang pers oleh pemerintah dengan sasaran penyebaran berita-berita ke seluruh pelosok Indonesia.
Electronic Trading Platform	Bisnis utama yang dijalankan anak usaha AETP sebagai penyedia <i>Electronic Trading Platform</i> dan resmi mendapatkan ijin usaha sejak 2022 dengan menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga strategis yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPEI.

Tabel 1. 1 Lini Usaha Perum LKBN ANTARA

¹ Selanjutnya dalam dokumen RKAP ini disebut LKBN ANTARA, atau ANTARA (dalam huruf Kapital)

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan 2025 – 2029:

"Menjadi Kantor Berita Indonesia, Sumber Informasi & Data Terpercaya bagi Publik, Media, Dunia Usaha, serta Pengambil Keputusan"

Misi Perusahaan 2025 - 2029:

- Memperkuat marwah LKBN ANTARA sebagai Kantor Berita serta korporasi multi-media yang modern berkelanjutan dan menjadi barometer wawasan ekonomi-politik Indonesia;
- Menjadi *flag-carrier* jurnalisme Indonesia (*Nation State PR*) melalui pemberitaan yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai nasionalisme NKRI (3E+1N);
- Mengembangkan kapabilitas analitika data dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dimiliki untuk menciptakan wawasan bernilai berbasis data;
- Menjadi HUB bagi komunitas, media pers lokal, nasional, & global, serta terintegrasi dengan kanal distribusi konten berita & PR, berupa produk konvergensi – multimedia.

3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007 (pasal 6), maksud dan tujuan Perum LKBN ANTARA sebagai berikut:

1. **Layanan Publik:** Menyelenggarakan usaha pemberitaan independen guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. **Layanan Komersial:** Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang berkualitas, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan sebagaimana sebagai berikut:

1. Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional,
2. Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan,
3. Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia,
4. Penyelenggaraan media elektronik, dan percetakan, dan
5. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

4. Budaya Perusahaan

Perum LKBN ANTARA menerapkan budaya Perusahaan "**AKHLAK**", yaitu:

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

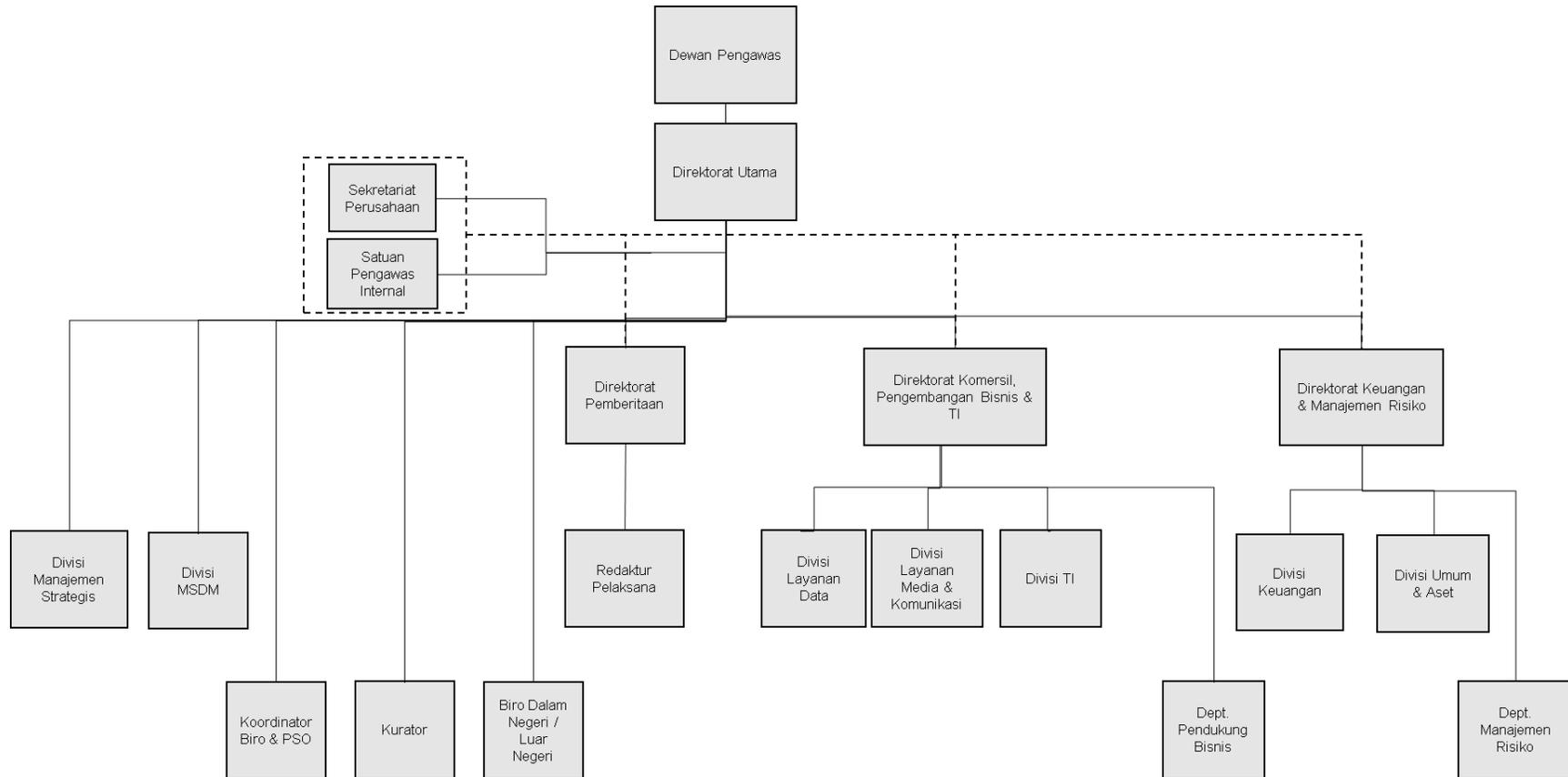
Hal ini selaras dengan arahan nilai-nilai utama (*core values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicantumkan dalam Surat Edaran BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020. Adapun nilai-nilai utama dari Budaya Perusahaan "**AKHLAK**" Perum LKBN ANTARA dalam penjabarannya sebagai berikut:

Nilai	Definisi	Panduan perilaku
Amanah	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi janji dan komitmen. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Kompeten	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
Harmonis	Saling peduli dan menghargai perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
Adaptif	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Bertindak proaktif.
Kolaboratif	Membangun kerja sama yang sinergis	<ul style="list-style-type: none"> Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Tabel 1. 2 Budaya Perusahaan Perum LKBN ANTARA

5. Struktur Organisasi Perusahaan

Perum LKBN ANTARA saat ini sesuai dengan ketentuan Direksi Nomor: PER- 011/DIR01.ANT/X/2023, Struktur Organisasi yang dipimpin oleh satu orang direktur utama dengan membawahi empat direktorat. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1. Struktur Induk Kantor Berita ANTARA per Oktober 2024

6. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan

Susunan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA saat ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas	Kemal Effendi Gani
Anggota Dewan Pengawas	Prof. Widodo Muktiyo
Anggota Dewan Pengawas	Mayong Suryo Laksono
Anggota Dewan Pengawas	Monang Sinaga
Anggota Dewan Pengawas	Ariawan
Anggota Dewan Pengawas	Virgandhi Prayudantoro

Tabel 1. 3 Susunan Dewan Pengawas LKBN ANTARA

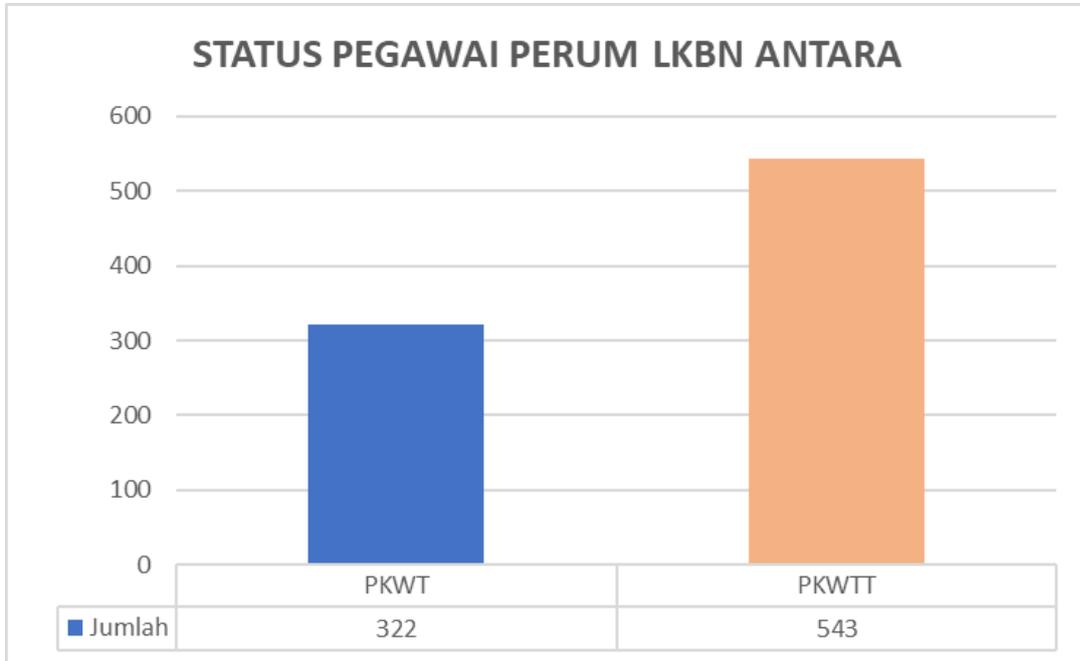
Sementara itu susunan Direksi Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Akhmad Munir
Direktur Pemberitaan	Irfan Junaidi
Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi	Jaka Sugianta
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Nina Kurnia Dewi

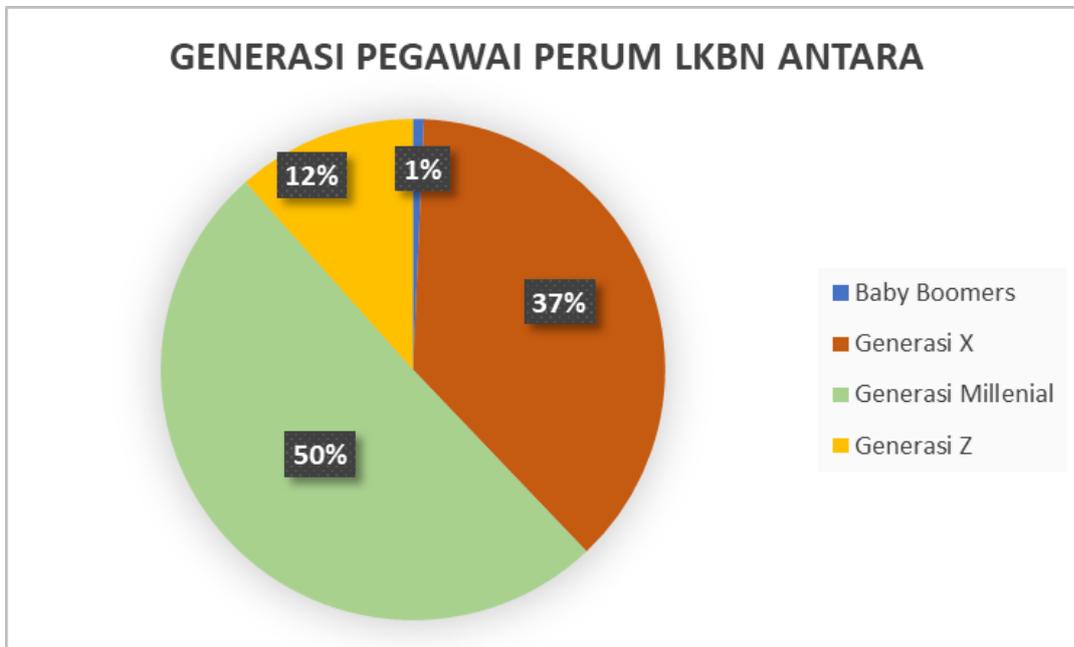
Tabel 1. 4. Susunan Dewan Direksi Kantor Berita ANTARA

7. Profil Sumber Daya Manusia

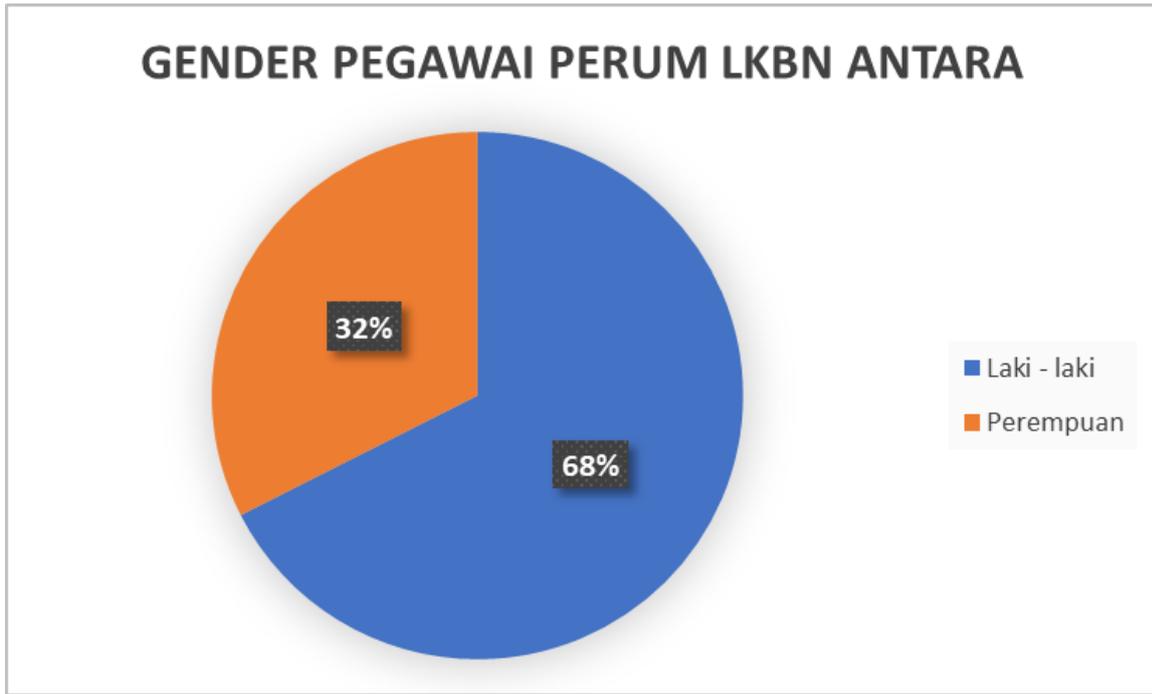
Komposisi SDM Perum LKBN ANTARA pada bulan Oktober 2024 berjumlah 865 karyawan. Dimana dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



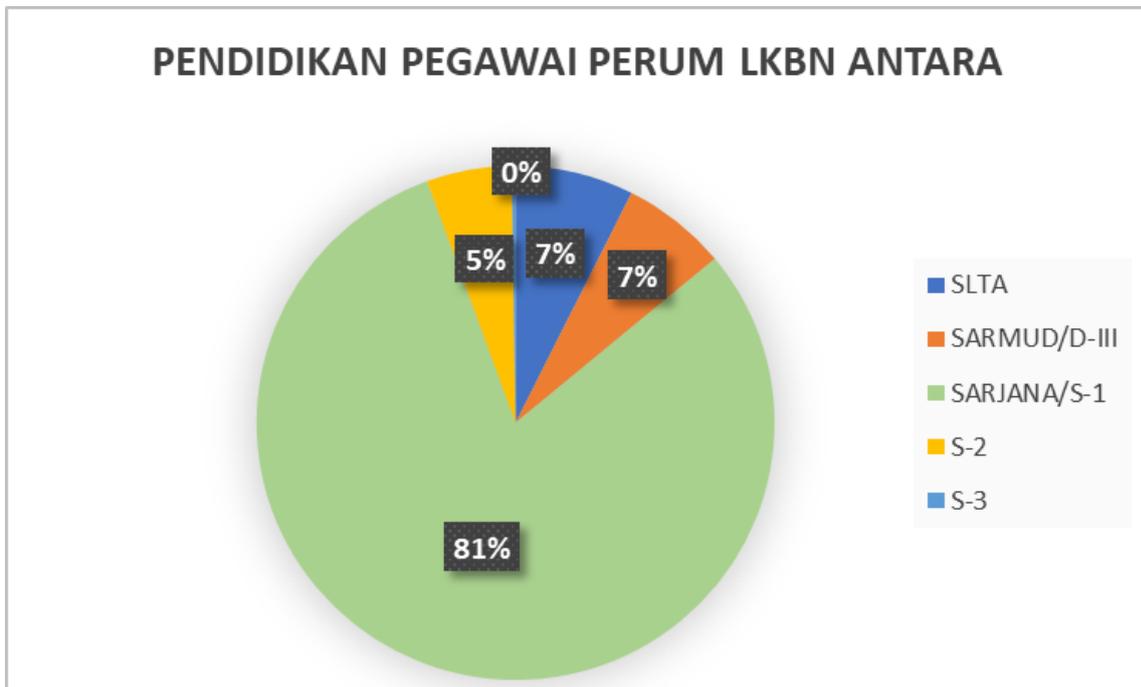
Grafik 1.1. Komposisi SDM berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 1.2. Komposisi SDM berdasarkan Generasi



Grafik 1.3. Komposisi SDM berdasarkan Gender

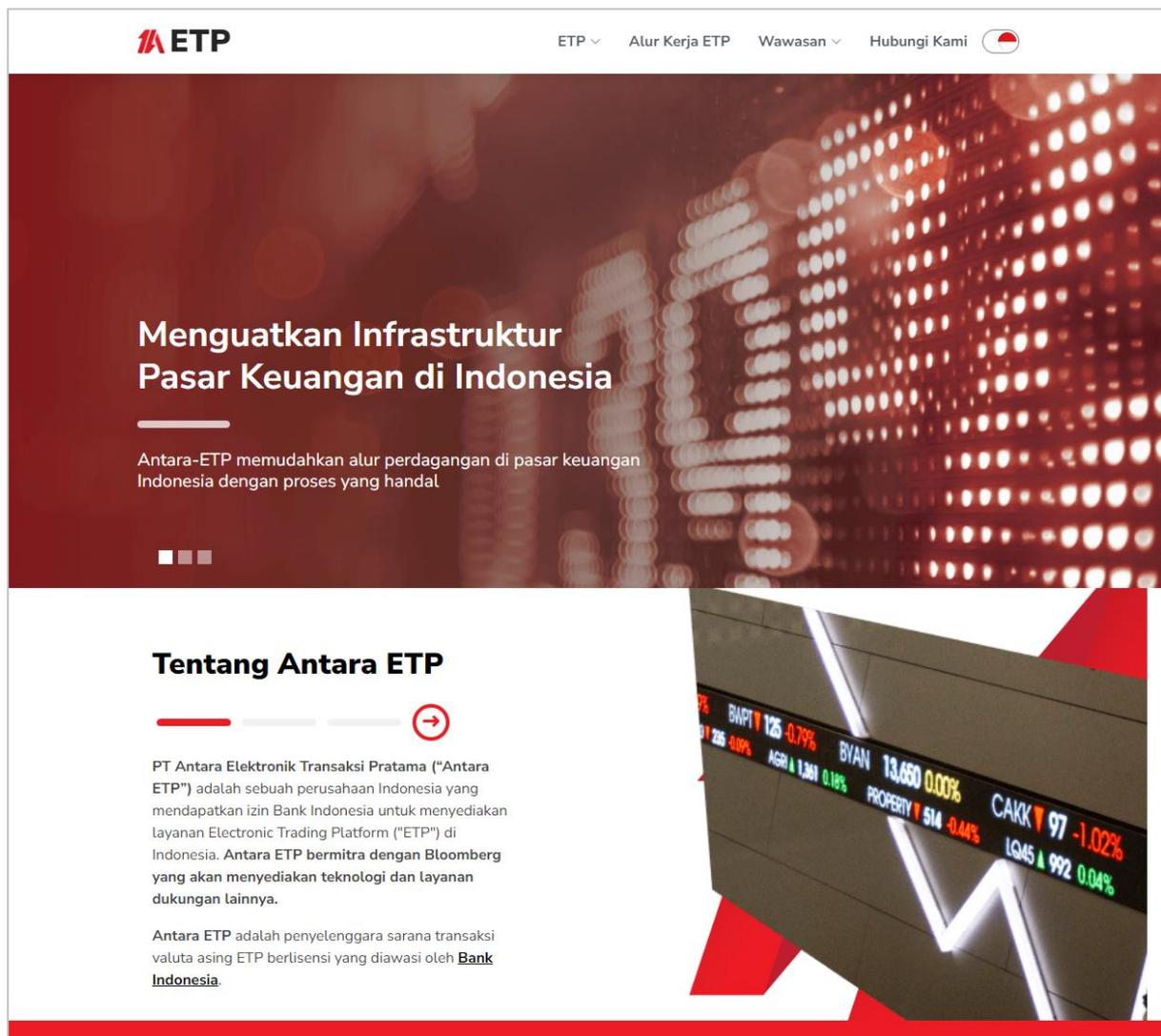


Grafik 1.4. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

8. Struktur Kepemilikan Grup Perusahaan dan Anak Perusahaan

Perum LKBN ANTARA adalah badan usaha milik negara yang kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan negara. Sementara itu, Kantor Berita ANTARA juga memiliki satu anak perusahaan aktif yaitu, PT Antara Elektronik Transaksi Pratama (“Antara ETP”).

PT. Antara ETP secara resmi berdiri sejak 24 Januari 2022 dan mendapatkan lisensi ETP dari Bank Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022. Sejak 1 Desember 2022, PT. Antara ETP telah beroperasi menjalankan *venue electronic trading platform* yang didukung oleh Bloomberg LP sebagai partner penyedia layanan dan teknologi. PT. Antara ETP menggunakan basis platform perdagangan FXGO dari Bloomberg yang sudah terbukti efisien, aman dan telah digunakan di berbagai negara. Antara ETP bisa diakses oleh bank-bank dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang telah menandatangani perjanjian yang diperlukan dengan Bloomberg dan Antara ETP untuk memperoleh akses ke Platform Antara ETP.



Gambar 1.1. Tangkapan Layar Website Antara ETP

BAB II

KINERJA DAN PROGNOSA RKAP 2024

1. Situasi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kinerja Perusahaan

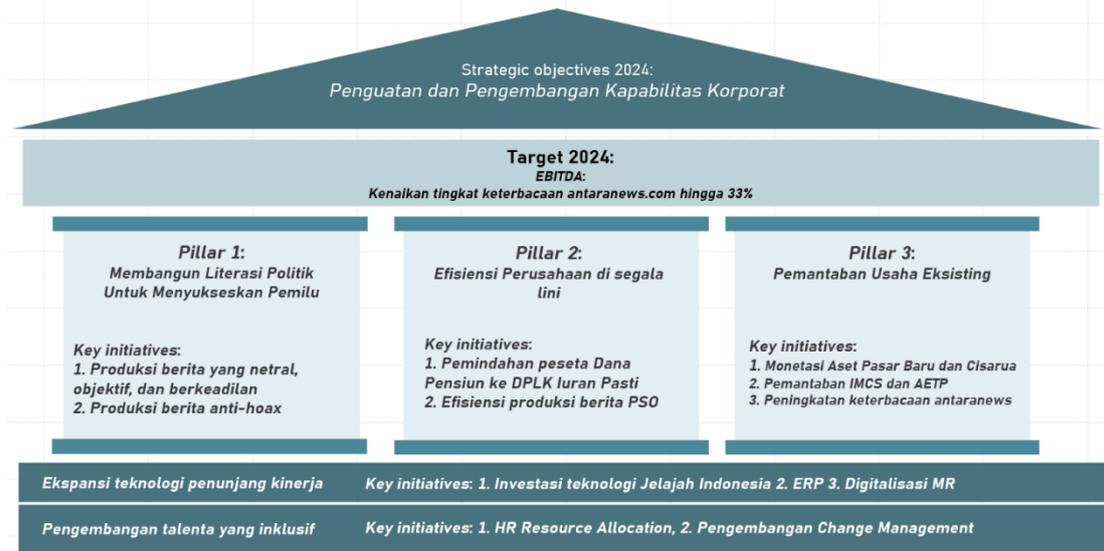
Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 dilihat dari data Kementerian Keuangan diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (debt distress), dampak eskalasi perang di Ukraina, tingkat inflasi persisten tinggi, serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama. Walau demikian, proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik, dimana berdasarkan data World Economic Outlook (IMF), perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan berada pada level 3%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Asia diproyeksikan tumbuh sebesar 5% pada tahun 2024.

Indonesia sendiri diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat hingga akhir 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di atas 5.0 persen dalam periode tujuh kuartal berturut-turut dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih berkualitas dan inklusif, terutama ditunjukkan oleh kemampuan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan serta ketimpangan. Walaupun fundamental ekonomi domestik yang kokoh dan stabil tersebut ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif rendah. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan prudent tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh hingga 5.2%. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional, Perum LKBN ANTARA tetap mampu bertumbuh positif dan berhasil membukukan pendapatan sebanyak Rp. 476.981.387.052,- pada akhir tahun 2023. Hal ini ditopang dengan adanya pendapatan dari Kerjasama Operasional bersama Bloomberg sebesar 36,07%.

2. Perbandingan RKAP dan Pencapaian Kinerja Perusahaan

Di tahun 2024, Perum LKBN ANTARA menargetkan Penguatan dan Pengembangan Kapabilitas Korporasi, dengan melakukan upaya membangun literasi politik untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada, melakukan efisiensi di segala lini, pemantapan usaha, ekspansi teknologi penunjang kinerja dan pengembangan talenta yang eksklusif.



Berdasarkan parameter kinerja perusahaan pada 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 menunjukkan bahwa LKBN ANTARA telah menyelesaikan beberapa target penting atas inisiatif strategis.

Pencapaian inisiatif strategis pada tahun 2024 Perum LKBN ANTARA berdasarkan RKAP 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No	Inisiatif Strategi 2024	Program Kerja dan Progress Hingga September 2024
1	Membangun literasi politik untuk menyukseskan agenda pemilu	Membentuk tim liputan Pemilu dan Pilkada serentak, mulai mengawal pemberitaan pemilu dan Pilkada serentak di masa kampanye untuk menampilkan konten dan narasi terkait Pemilu dan Pilkada serentakyang damai dan mendorong rakyat ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kontestasi tersebut Meliput kegiatan pasangan calon presiden dan wakil presiden, kegiatan partai politik peserta Pemilu, kegiatan penyelenggaraan Pemilu, kegiatan pasangan calon Kepala Daerah, kegiatan penyelenggaraan Pilkada serentak, hingga melakukan wawancara khusus kepada narasumber terkait yang kredibel Membentuk tim yang terdiri dari kepala biro daerah dan luar negeri untuk merencanakan liputan khusus persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Dengan demikian, konten dan narasi berita dari LKBN ANTARA mencerminkan kedewasaan berdemokrasi Indonesia Menyajikan pemberitaan Pemilu dan Pilkada serentak secara proporsional dengan menjaga pemberitaan agar tetap berimbang, baik dari jumlah berita maupun isu yang disajikan berupa teks, foto, maupun video. Pemberitaan Pemilu dan Pilkada serentak tidak hanya didistribusikan melalui kanal berlangganan BrandA atau Portal <i>Antaraneews.com</i> , namun juga disebarakan melalui berbagai media sosial Antaraneews baik pusat maupun daerah

No	Inisiatif Strategi 2024	Program Kerja dan Progress Hingga September 2024
2	Efisiensi Perusahaan di Segala Lini	<p>Efisiensi dilakukan melalui penguatan kerjasama dengan agensi secara kontinyu untuk mendapatkan pasar yang lebih luas serta sebagai sebuah strategi untuk efektivitas dan efisiensi yang adaptif dari Perum LKBN ANTARA dalam mengantisipasi dinamika perubahan pasar dan industri media</p> <p>Pengalihan Dana Pensiun dari DPPK ke DPLK sekaligus melakukan proses likuidasi Dana Pensiun LKBN ANTARA (DPPK), sebagai bagian dari aksi perusahaan untuk melakukan efisiensi dari sisi finansial perusahaan. Aksi korporasi yang dimulai akhir 2023 diperkirakan akan terselesaikan dalam tempo waktu 2 (dua) tahun hingga akhir 2025. Untuk tahun 2024, Perum LKBN ANTARA selaku pendiri telah mendapatkan izin untuk Likuidasi Dana Pensiun melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-52/D.05/2025 Tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN ANTARA.</p> <p>Efisiensi juga dilakukan dalam hal produksi berita, dengan pemaksimalan kuantitas produksi melalui peningkatan kualitas hasil produk, khususnya produk berita PSO, serta memaksimalkan jumlah produk berita yang bernilai jual komersil</p> <p>Efisiensi juga dilakukan oleh seluruh unit-unit kerja di internal perusahaan baik di pusat maupun di kantor biro melalui kesesuaian program kerja berbasis anggaran.</p>
3	Pemanjapan Usaha Eksisting	<p>Pemanjapan usaha dari bisnis yang telah ada di perusahaan (Bisnis eksisting) dilakukan melalui program transformasi digital layanan dan informasi, termasuk memaksimalkan ketersediaan data digital/archive untuk dapat dimonetasi. Pemanfaatan aset gedung Pasar Baru (Antara Heritage Center/AHC) pasca renovasi dan diresmikan pada 14 Mei 2024 dilakukan melalui monetasi yang sudah menampakkan hasilnya hingga akhir tahun 2024. Penguatan bisnis kemitraan dengan mitra Bloomberg dan LSEG (d/h Refinitiv atau Reuters) juga terus dilakukan untuk menjaga hubungan baik jangka panjang yang telah berlangsung. Pemaksimalan upaya penjualan produk unggulan dalam kerangka Integrated Media and Communication Services (IMCS) sebagai layanan komunikasi terpadu hingga akhir 2024 diperluas pasarnya ke seluruh provinsi melalui kantor biro provinsi Perum LKBN ANTARA.</p>
4	Ekspansi Teknologi dan Aset Tetap Penunjang Kinerja	<p>Di tahun 2024, Perum LKBN ANTARA melakukan ekspansi teknologi melalui penguatan peralatan pendukung teknologi seperti pengadaan server dan berbagai alat kerja berbasis teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi Divisi Teknologi ditingkatkan tidak hanya sebagai pendukung bagi keredaksian namun juga menjadi penyedia infrastruktur bisnis seperti platform CRM, Salesforce, Antarafoto.com sebagai marketplace karya foto Perum LKBN ANTARA, dan untuk mendukung pengembangan bisnis berbasis digital dan sustainability perusahaan.</p> <p>CAPEX (Capital Expenditure) perusahaan pada tahun 2024, selain difokuskan pada barang inventaris dan peralatan pendukung teknologi informasi, juga difokuskan pada Bangunan melalui</p>

No	Inisiatif Strategi 2024	Program Kerja dan Progress Hingga September 2024
		pembelian aset tetap milik Dana Pensiun LKBN ANTARA berupa bangunan kantor di Surabaya, yang saat ini digunakan sebagai kantor Biro Jawa Timur.
5	Pengembangan Talenta Inklusif dan Perbaikan Tata Kelola	<p>Di tahun 2024, Perum LKBN ANTARA tetap menargetkan adanya talenta perempuan dan talenta muda di BOD-1 yang dimasukkan ke dalam nominated talent. Akan tetapi hal ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan Perusahaan masih memaksimalkan proses regenerasi talenta perempuan dan talenta muda pada level BOD-2 dan BOD-3.</p> <p>Pengembangan talenta sepanjang tahun 2024 juga dilaksanakan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh insan ANTARA.</p> <p>Perum LKBN ANTARA juga melakukan berbagai perbaikan dari tata kelola di bidang Keuangan. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan beberapa pembaharuan dari tata kelola keuangan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan dan juknis. Sebagai tindaklanjut dari hasil asesmen di bidang manajemen risiko, keuangan, maupun GCG Di tahun 2024, perusahaan juga berupaya untuk melakukan penyelesaian piutang tak tertagih.</p> <p>Asesmen tata kelola juga tetap dilaksanakan oleh perusahaan sebagai upaya monitoring diantaranya Asesmen GCG, Sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ICORPAX, Internal Control on Financial Reporting (ICOFR), INDI 4.0, HC Maturity Level, IT Maturity Level, dan Audit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.</p>

Tabel 2.1. Capaian Inisiatif Strategis 2024

3. Pencapaian Target KPI Korporat dibandingkan RKAP

Tahun 2024, Perusahaan menargetkan beberapa indikator yang menjadi pertimbangan keberhasilan pencapaian strategi inisiatif perusahaan di tahun 2024, yang dituangkan dalam Key Performance Indikator (KPI) Perum LKBN ANTARA, sebagai berikut:

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
I NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA						
	Finansial				22,40	
1	EBITDA	37,78	40,10	106,13%	7,43	Indikator yang menggambarkan kemampuan Perusahaan yang dilihat dari pendapatan diterima sebelum pengurangan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dengan tujuan untuk mengetahui laba Perusahaan sebelum ada pengurangan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Formula yang digunakan yaitu, EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture. Ketercapaian Perusahaan dalam melampaui target EBITDA tahun 2024 melalui hasil prognosa didapatkan dari peningkatan pendapatan komersil yang dihasilkan, optimalisasi penyerapan PSO dan berbagai Upaya efisiensi yang telah dilakukan perusahaan
2	ROIC >= WACC	-4,11%	-4,08%	99,27%	3,97	<i>Economic Value Creation</i> tercipta ketika ROIC > WACC, tujuannya yaitu untuk mengetahui Nilai Ekonomis (<i>Economic Value Creation</i>) yang diukur dengan parameter tingkat kembalian investasi (<i>Return on Invested Capital</i> atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (<i>Weighted Average Cost of Capital</i> atau WACC) atas modal (atau <i>Invested Capital</i>). Formula yang digunakan: % GAP = ROIC -WACC Ketercapaian Perusahaan dalam hal ini menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan Perusahaan telah digunakan secara efektif

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	1,57	0,93	168,60%	6,60	<p>Indikator yang menggambarkan kemampuan laba dari aktivitas operasional perusahaan berikut dengan memperhitungkan beban depresiasi/amortisasi/depleksi, dengan tujuan untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan dari aktivitas operasional perusahaan</p> <p>Formula yang digunakan, yaitu: $\text{Total Debt} / \text{EBITDA}$ (EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture) Ketercapaian target ini mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu melakukan pengelolaan dan membayar kewajiban utangnya</p>
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	13,82%	11,81%	117,02%	4,40	<p>Indikator yang menggambarkan struktur finansial terkait kemampuan modal perusahaan untuk melunasi hutang berbunga. Tujuan dari indikator ini yaitu, untuk mengukur kelayakan perusahaan melakukan Investasi menggunakan hutang (berbunga)</p> <p>Formula yang digunakan: $\text{Total Debt} / (\text{Total Debt} + \text{Total Equity})$ Ketercapaian target ini menunjukkan bahwa kelayakan perusahaan melakukan investasi melalui utang pendanaan</p>
Operasional					15,40	
5	Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax dalam tahun Pemilu	400	800	200%	7,70	<p>Ketercapaian produksi berita untuk memberikan informasi yang mencerahkan baik terkait Pemilu pada khususnya dimana masyarakat mendapatkan berita/informasi yang benar, terverifikasi dan bertanggungjawab, untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan berita yang objektif dan imparsial serta menjadikan Kantor Berita ANTARA sebagai media penjernih informasi.</p>

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
						Formula yang digunakan adalah jumlah produksi berita cegah hoax sebanyak 400 berita dalam setahun. Ketercapaian produksi berita antihoax dalam prognosa pencapaian tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dikarenakan kondisi politik Indonesia yang meningkat sepanjang tahun 2024 sehingga berdampak pada banyaknya informasi yang tidak sesuai (hoax), selain itu adanya kebutuhan klafirikasi berita hoax untuk isu pasca pemilu, IKN, pilkada dan pergantian kepemimpinan nasional dari pihak Kominfo mendukung pencapaian produksi berita antihoax
6	Tingkat Keterbacaan Portal <i>antaranews.com</i>	80.000.000	100.000.000	125%	7,70	Jumlah halaman yang dibaca penuh oleh pengunjung pada portal <i>antaranews.com</i> Untuk melihat daya tarik, daya saing dan relevansi pemberitaan ANTARA di mata masyarakat, dengan formula jumlah <i>pageview</i> sebanyak 80juta/ tahun. Ketercapaian Tingkat keterbacaan portal didukung melalui perubahan kebijakan pemberitaan di portal yang berbasis pada keinginan pasar, antara lain melalui penerapan konten-konten <i>evergreen</i>
Sosial					16,50	
7	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	150	170	113%	5,50	Penyelenggaraan pelatihan terkait kompetensi jurnalistik bagi generasi jurnalis muda untuk menghasilkan jurnalis muda yang kompeten Ketercapaian ini menunjukkan adanya antusiasme jurnalis muda untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
8	Tingkat kelolosan produk berita PSO	80%	100%	124%	11,00	Ketercapaian kelolosan seluruh jenis produk berita PSO dibandingkan dengan jumlah produksi, dengan tujuan meningkatkan kualitas produksi berita terhadap penugasan

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
						<p>Pemerintah. Formula yang digunakan yaitu, jumlah berita PSO yang lolos verifikasi dibandingkan jumlah produksi berita PSO dengan target sebesar 80%.</p> <p>Ketercapaian Tingkat kelolosan PSO ini menandakan bahwa Perusahaan telah menghasilkan produksi konten PSO sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang di persyaratkan oleh PSO</p>
II	INOVASI MODEL BISNIS				13,54	
9	Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan	6.000.000.000	692.795.000	35%	1,04	<p>Pelaksanaan komersialisasi aset Perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan value Perusahaan Pelaksanaan monetasi aset perusahaan ini tidak mencapai target pada tahun 2024, dikarenakan pemanfaatan aset Antara Heritage Center (AHC) baru dimulai pada pertengahan tahun 2024 akibat keterlambatan proses renovasi gedung.</p>
10	<i>Sustainability AETP</i> melalui penambahan jumlah transaksi	15,00%	17%	113%	5,50	<p>Indikator yang menunjukkan penambahan jumlah transaksi di Platfrom Antara ETP untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau perkembangan bisnis dari Platform Antara ETP</p> <p>Setelah izin Conduit dari Bloomberg, telah diterima oleh Antara ETP, maka transaksi yang melalui Platform Antara ETP juga meningkat</p>
11	Sinergi Bisnis antar Anggota Klaster	1	1	100%	3,00	<p>Sinergi bersama antar anggota klaster dalam bentuk kolaborasi srategis (investasi, produksi, distribusi dan pemasaran) guna memberikan nilai tambah bagi sesama anggota klaster dengan target sebesar satu sinergi dalam satu tahun.</p> <p>Anggota klaster Danareksa: Jasa Keuangan: PT. Perusahaan Pengelola Aset, PT. Danareksa Finance, PT. Danareksa Capital, PT. BRI Manajemen Investasi, PT. BRI Danareksa Sekuritas</p>

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
						<p>Kawasan Industri: PT. Kawasan Industri Medan, PT. Jakarta Industrial Realestate Pulogadung, PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. Kawasan Industri Makasar, PT. Surabaya Industrial Real Estate Rungkut, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma</p> <p>Konstruksi: PT. Nindya Karya</p> <p>Media dan Teknologi: PT. Balai Pustaka, PT. Kliring Berjangka Indonesia, PT. Jalin Pembayaran Nusantara</p> <p>Sumber: website resmi KBUMN dan Danareksa</p> <p>Diluar holding (subklaster): Konsultan Karya: Virama Karya, Yodya Karya, Bina Karya, Indra Karya Pengelola air: PJT1,PJT2 Manufaktur: Barata Indonesia, Boma Bisma Indra</p> <p>Sinergi yang telah dilakukan oleh Antara adalah melalui kerjasama dengan PT Nindya Karya dalam proses renovasi gedung Antara Heritage Center (AHC)</p>
12	Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	4,00	<p>Terselesainya Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi risiko pada Unit Kerja Perusahaan • Pengkinian Pedoman dan SOP MR • Penyusunan Risk Appetite • Sertifikasi <i>Wave</i> • Pembentukan Risk Champion • Digitalisasi Sistem Informasi MR Terpadu • Pelatihan Lanjutan • Monitoring KRI • Integrasi MR dengan Perencanaan (RKAP dan RJPP) • Penerapan Audit Risiko • Pengembangan Database Loss Event • Evaluasi Maturitas Risiko

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
III	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI				13,70	
13	Penyelesaian Gap INDI 4.0	25%	25,00%	100%	6,00	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil asesmen INDI 4.0 menuju fase "Penerapan yang Matang" sesuai dengan Surat Aspirasi Pemegang Saham (S-949/MBU/10/2020), untuk mempersiapkan Perusahaan Menuju Fase Ke-3: Tingkat Kesiapan Matang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat berdasarkan temuan Gap INDI 4.0 tahun sebelumnya
14	Penerapan ERP di Perusahaan	75%	100%	133%	7,70	Pelaksanaan integrasi dari aplikasi perusahaan yang bersifat fungsional dan teknis dengan memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya, untuk menyediakan informasi real-time tentang aktivitas Perusahaan untuk kemudahan pengambilan keputusan bagi top manajemen
IV	PENINGKATAN INVESTASI				7,70	
15	Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)	15%	42,02%	280%	3,30	Kenaikan Followers & Engagement dari Media Sosial Antara 2023 = 3.749.481 2024 = 5.324.830 Angka followers hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan bertambah sekitar 180.000 followers baru, dengan adanya kejadian signifikan dalam mengangkat jumlah followers baru di sosial media Perusahaan di antaranya tema pemilu, kejadian pasca pemilu, seluk beluk pilkada, dan konten evergreen
16	Persentase Penyerapan Investasi	70%	108,97%	116%	4,40	Perencanaan Capex pada 2024 (62.57): <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Baru: 23.4M (sisa pembayaran 30%) • Inventaris TI: 8M • Tanah dan Bangunan Dapen di Surabaya: 7.67M • Pembuatan studio TV Pasar Baru: 7.5M • Renovasi Wisma Cisarua+Furniture: 5M • Inventaris & Fixture PT. AETP: 3M • Inventaris & Peralatan rutin: 3M

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
						<ul style="list-style-type: none"> • Renovasi Wisma Antara B (parkir+kantin): 2M • Renovasi Biro Daerah: 1M • Renovasi atas Tanah Hibah Kaltara: 1M • Genset: 1M <p>Penyerapan investasi CAPEX pada tahun 2024 melebihi target RKAP dikarenakan kondisi Perusahaan yang memungkinkan pemenuhan seluruh rencana investasi CAPEX</p>
V	PENGEMBANGAN TALENTA				9,82	
17	Rasio Top Talent Muda (\leq 42 tahun) dalam <i>nominated talent</i>	30%	0%	0%	-	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin muda < 42 tahun dalam manajemen (BoD-1) untuk menciptakan inklusifitas dalam lingkungan kerja. Formula perhitungan Talenta Muda sudah selaras dengan APS KBUMN. Ketidaktercapaian pada indikator tersebut dikarenakan perusahaan masih melakukan grooming talenta muda dan perempuan pada level BOD-1
18	Rasio perempuan dalam <i>nominated talent</i>	30%	0%	0%	-	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin perempuan dalam manajemen (BoD-1) untuk menciptakan inklusifitas dan diversitas. Formula perhitungan Talenta Perempuan sudah selaras dengan APS KBUMN. Ketidaktercapaian pada indikator tersebut dikarenakan perusahaan masih melakukan grooming talenta muda dan perempuan pada level BOD-1
19	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)	90%	100%	111%	5,50	Personil organ pengelola risiko meliputi: Seluruh anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. Seluruh Direksi termasuk didalamnya Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko. Seluruh anggota Komite Audit. Seluruh anggota Pemantau Risiko.

No	Indikator	Target 2024	Prognosa	Capaian (%)	Skor	Keterangan
						Kepala dan seluruh anggota Unit Kerja Manajemen Risiko. Kepala dan seluruh anggota SPI. Pada akhir tahun 2024, perusahaan mampu melakukan pemenuhan kualifikasi organ pengelolaan risiko sepenuhnya sesuai target RKAP dan arahan Kementerian BUMN
20	Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun	50%	54%	108%	4,32	Setelah ijin likuidasi Dana Pensiun dikeluarkan oleh OJK, ditargetkan Roadmap Dana Pensiun yang telah disetujui oleh OJK minimal 50% dari tahapan yang telah ditetapkan.
	TOTAL				99,06	

Tabel 2.1. Key Performance Indikator (KPI) Perum LKBN ANTARA

4. Kinerja Pendapatan Dibandingkan dengan RKAP

Sementara itu prognosa pencapaian kinerja pendapatan pendapatan PSO dan komersial pada tahun 2024 dibandingkan dengan RKAP dan laporan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Uraian	Audited 2023	RKAP 2024	2024 (Prognosa)
Penugasan Pemerintah (PSO)	172.001	176.350	176.147
Komersil	289.586	288.918	284.254
Divisi Layanan Data	190.614	178.201	195.865
Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	75.201	87.344	62.016
Biro Daerah	23.772	23.373	26.373
Anak Perusahaan PT AETP	15.394	16.056	16.909
Total	476.981	481.324	477.310

Tabel 4.1. Prognosa Komposisi Pendapatan Komersial ANTARA

Dari sisi pendapatan, kinerja perusahaan pada tahun 2024 diperkirakan pada akhir tahun akan berada di bawah target RKAP. Walaupun demikian, Pendapatan PSO tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan PSO tahun 2023 audited.

Pendapatan Komersil tahun 2024 pada akhir tahun diperkirakan akan mengalami lonjakan pada divisi Layanan Data melalui kerjasama kemitraan dengan Bloomberg dan LSEG (d/h Refinitiv atau Reuters) dibandingkan dengan target RKAP.

Beberapa aspek keuangan penting yang dapat menjadi indikator kinerja perusahaan pada tahun 2024 bisa digambarkan dalam tabel berikut:

(dalam juta rupiah)

Aspek	2023	RKAP 2024	2024 (Prognosa)
Pendapatan Usaha	476.981	481.324	477.310
Beban Pokok Usaha	(334.800)	(331.415)	(323.952)
Beban Umum	(104.492)	(132.783)	(125.039)
Laba Bersih	22.773	12.135	13.993
Arus Kas Operasi	(6.602)	17.379	11.096
Kas Setara Kas	86.005	95.548	90.045
EBITDA	50.198	37.784	40.099

Tabel 4.3. Perbandingan Capaian Keuangan 2023 dan 2024

5. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia dibanding RKAP

Perum LKBN ANTARA telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk karyawannya dalam bentuk pelatihan, dengan data realisasi pelatihan untuk karyawan Perum LKBN ANTARA hingga bulan September 2024 mencakup 73 In House training dengan jumlah peserta sebesar 3.753 orang, 128 pelatihan publik yang diikuti 765 peserta serta 8 pelatihan sertifikasi dengan peserta berjumlah 19 orang. Selain itu, guna memenuhi arahan Kementerian BUMN terkait Pelatihan Digital Talent dengan 9 area pengembangan pelatihan dari 18 area pengembangan, dengan jumlah 462 peserta.

Perum LKBN ANTARA juga telah melaksanakan Pelatihan bagi Organ Pengelola Risiko, sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas organ pengelola risiko dan telah tercatat oleh Departemen Manajemen Risiko. Pada periode Januari-September 2024 jumlah pengelola risiko menjadi 104 pegawai Perum LKBN ANTARA dengan pencapaian hingga sebesar 84,62% dari target 90%.

BAB III

RENCANA KERJA ATAS PENUGASAN PEMERINTAH

1. Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA

Dalam rangka mengembangkan pendapat publik yang sehat, mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia, Perum LKBN ANTARA mendapat penugasan Pemerintah c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation (PSO)* untuk Informasi Publik Bidang Pers tahun Anggaran 2025.

PSO Untuk Informasi Publik Bidang Pers merupakan penugasan khusus Pemerintah kepada Perum LKBN ANTARA berupa penyampaian pelayanan informasi jenis tertentu melalui perencanaan, pembuatan, penyampaian, distribusi, dan atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat Nasional, Daerah, maupun Internasional sesuai dengan konstruksi program bidang/tema dan kisi-kisi pemberitaan, serta agenda setting yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers ini diperlukan dalam rangka pemerataan penyediaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, mengembangkan pendapat publik, yang sehat, mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional.

Tujuan pelaksanaan PSO bidang pers Perum LKBN ANTARA adalah untuk:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan warga terhadap informasi publik dan komunikasi publik pemerintah yang bersifat memberdayakan serta memperbaiki karakter masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah, meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan sehingga masyarakat di dalam dan di luar negeri dapat mengikuti kebijakan pemerintah dan perkembangan pembangunan di Indonesia.
3. Membentuk opini positif serta menjaga citra positif negara dan pemerintah Indonesia.

Produk PSO bidang pers merupakan semua jenis produk berita pers yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, serta memperkuat rasa nasionalisme.

Perum LKBN ANTARA ditugaskan untuk melakukan penyampaian layanan informasi jenis tertentu dengan perencanaan, pembuatan, penyampaian, distribusi dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional sesuai dengan konstruksi program yang ditetapkan dalam perjanjian, sesuai dengan bidang, tema, kisi-kisi pemberitaan dan kriteria produk yang juga telah disepakati.

Produk pers yang ditampilkan dalam beragam wujud konten multimedia berupa teks, foto, video dan infografis. Secara spesifiknya, produk pers PSO Perum LKBN ANTARA terdiri dari:

1. Berita Teks Hardnews
2. Berita Teks Artikel,
3. Berita Foto,
4. Berita Cerita
5. Berita TV Features,
6. Berita TV Hardnews,
7. Berita Infografis,
8. Berita podcast,

Ruang lingkup penugasan PSO bidang pers ini mencakup: kuota produk, saluran distribusi, hak dan kewajiban, nilai perjanjian, cara pembayaran, pajak, sanksi, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan internal, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, perubahan dan adendum, dan jangka waktu.

Adapun kuota produksi pemberitaan untuk penugasan pemerintah (berita PSO) adalah sebagai berikut:

Produk Tahun	Teks Hardnews	Teks Artikel	Berita Foto	Photo Story	TV Features	TV Hardnews	Infografis	Podcast
2025 (Usulan)	144.250	1.500	17.000	45	40	8.000	180	20
2024	143.000	1.700	18.000	55	45	8.000	160	25
2023	145.550	1.400	17.500	45	40	7.500	150	15
2022	145.190	1.500	18.000	40	45	7.500	150	15
2021	146.000	1.700	17.000	50	40	7.500	100	-

Tabel 3.1. Perkiraan Kuota Produksi Berita Penugasan Pemerintah Bidang Pers Tahun 2025

Dasar hukum pelaksanaan PSO Perum LKBN ANTARA adalah melalui:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Harga Pokok Pelaksanaan PSO,
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Pelaksanaan PSO antara Direktorat Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Perum LKBN ANTARA

2. Gambaran PSO 2024

Sepanjang tahun 2024, Perum LKBN ANTARA bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menyepakati 3 (tiga) tema besar dalam memproduksi berita penugasan dalam kerangka program Kewajiban Pelayanan Public (*Public Service Obligation/PSO*).

Ketiga tema besar tersebut meliputi Bidang Kemaritiman, Perekonomian dan Investasi; Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga tema besar tersebut ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya dasar hukum berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksana PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024.

Penugasan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI dengan Perum LKBN ANTARA Nomor 03/MOU/DJIKP/HK.04.02/03/2024 dan Nomor: HK.08.00/006/DIR01.ANT/PKS/2024 tanggal 25 Maret 2024

Realisasi PSO 2024

Prognosa 2024

No.	Jenis	Bentuk Penugasan	Anggaran APBN (Satu Tahun)	Realisasi Pendapatan PSO	Persentase Pendapatan	Saldo Piutang PSO Tahun Berjalan (Sept 2024)	Kas yang Sudah Diterima atas PSO Tahun Berjalan (Sept 2024)	Saldo Piutang atas PSO Tahun-Tahun Sebelumnya
1	Informasi Publik Bidang Pers	Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligations/PSO)	176.322.920.000	176.146.597.080	99,90%	2.509.736.000	121.132.390.400	-

3. Ruang Lingkup Pemberitaan PSO

Perum LKBN ANTARA bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyepakati 3 (tiga) tema besar dalam memproduksi berita-berita penugasan dalam kerangka program Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) sepanjang tahun 2024. Ketiga tema besar tersebut meliputi:

1. Bidang Kemaritiman, Perekonomian dan Investasi;
2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan.

Ketiga tema besar tersebut ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksana PSO untuk informasi publik bidang pers tahun 2024 tertanggal 20 Februari 2023 dan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI dengan Perum LKBN ANTARA Nomor: 03/MOU/DJIKP/HK.04.02/03/2024 dan Nomor HK.08.00/006/DIR01.ANT/PKS/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Untuk tahun 2025, Pembahasan ruang lingkup Pemberitaan PSO baru akan dilaksanakan pembahasan pada triwulan keempat tahun 2024.

4. Saluran Distribusi Berita PSO

Di tahun 2025, Produk PSO yang dipercayakan kepada Perum LKBN ANTARA serta saluran distribusi untuk menyalurkan produk tersebut, melalui saluran distribusi berupa:

1. i-Media, yaitu generasi pertama media *Digital Out Of Home (DOOH)* yang memanfaatkan TV display yang dipasang di ruang tunggu kantor layanan publik, rumah sakit, dan kapal penumpang. Menampilkan berita dan materi promosi serta visual dalam format teks, foto, video dan infografis
2. Videotron, berupa media luar ruang layar lebar *Digital Out Of Home (DOOH)* yang dipasang pada titik-titik strategis TV, melalui TVRI Nasional, TVRI Daerah, TV Swasta Daerah, TV Swasta Nasional, TV Lokal berjaringan Jawa Pos, TV Swasta daerah
3. Radio, melalui RRI Nasional, RRI daerah khususnya daerah perbatasan Radio komunitas, Radio berjaringan, Radio swasta daerah,
4. Pameran foto di berbagai tempat publik / galeri di Indonesia
5. Media cetak daerah di 33 provinsi
6. Portal antaranews daerah di 33 provinsi
7. Jaringan global ACN Newswire dan AsiaNet

5. Hak dan Kewajiban PSO

Pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) berhak menetapkan konstruksi program, mengusulkan *agenda setting*, memperoleh produk PSO, memberikan tugas kepada LKBN ANTARA untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan distribusi produk PSO, serta memberikan teguran jika terjadi penyimpangan.

Sementara itu, kewajiban Kominfo adalah merencanakan pelaksanaan PSO, memberikan kompensasi, melaksanakan verifikasi, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Perum LKBN ANTARA berhak untuk menerima kompensasi atas pelaksanaan PSO berdasarkan hasil verifikasi.

Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk melaksanakan PSO bidang pers sesuai kesepakatan dan konstruksi program, melaksanakan agenda setting, melakukan kerja sama untuk distribusi, melakukan pendampingan saat verifikasi, membukukan anggaran PSO secara terpisah, membuat laporan pertanggung jawaban, mengembalikan kelebihan pembayaran kepada kas negara.

6. Nilai Perjanjian PSO

Berdasarkan data tahun sebelumnya, nilai perjanjian penugasan PSO bidang pers untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai kontrak (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)
2024 (Prognosa)	176.32	176.15
2023	172.77	172.00
2022	151.62	151.62
2021	166.16	166.15
2020	158.39	151.85
2019	159.07	156.13
2018	160.06	155.93

Tabel 3.2. Nilai Kontrak dan Realisasi Penugasan PSO

7. Jangka Waktu PSO

Jangka waktu perjanjian PSO bidang pers akan diperbarui setiap satu tahun sekali.

8. Evaluasi Mandiri atas Tata Kelola Penugasan Kewajiban PSO

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PSO yang telah dilakukan oleh Perum LKBN ANTARA, sejak tahun 2021 telah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) setiap tahunnya atas tata kelola penugasan PSO.

Pada tahun 2024 ini, Perum LKBN ANTARA telah melakukan *self asesment* sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PSO bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA Tahun 2023 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ruang lingkup evaluasi secara mandiri meliputi aspek-aspek dalam rangkaian proses bisnis pelaksanaan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA, mulai dari legalitas hingga monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA melalui penilaian atau evaluasi berdasar kriteria pemenuhan target atas setiap komponen proses bisnis PSO Bidang Pers, dengan dengan pemberian skor atau nilai.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan.
3. Memonitor konsistensi penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA, dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers.

Evaluasi secara mandiri dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan evaluasi secara mandiri dilakukan sebagai penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers ini yang merupakan bagian dari proses implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan berkelanjutan di Perum LKBN ANTARA, sehingga hasil evaluasi secara mandiri ini sekaligus merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG perusahaan sampai saat ini.

Aspek pengujian dalam evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, meliputi:

1. Legalitas
2. Pemenuhan Produk PSO 2023
3. Pemenuhan Distribusi mencakup:
 - a. Kanal Distribusi
 - b. Ketepatan waktu pelaksanaan
4. Pelaporan
5. Keuangan dan Perpajakan
6. Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri (*selfassessment*) atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA Tahun 2023, mencapai skor 100,82 dengan pemberian bobot pada masing-masing indikator seperti tertera pada Tabel di bawah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA Tahun 2023, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hasil evaluasi secara mandiri atas penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN ANTARA Tahun 2023 dapat dikhtisarkan sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot	Skor (%)	Capaian
1	Legalitas	15	100	15,00
2	Pemenuhan Produksi PSO	20	104	20,82
3	Pemenuhan Distribusi PSO	20	100	20,00
4	Pelaporan	15	100	15,00
5	Keuangan dan Perpajakan	15	100	15,00
6	Pengawasan Internal	15	100	15,00
Skor Keseluruhan		100		100,82
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG		Sangat Baik		

Tabel 3.3. Hasil Evaluasi Mandiri Penerapan Tata Kelola PSO

Hasil evaluasi secara mandiri yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek legalitas terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu Ketersediaan Payung Hukum Penugasan PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers yang melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Komunikasi dan Informatika RI tentang penugasan Kewajiban Pelayanan Publik/PSO untuk informasi publik bidang Pers tertanggal 1 Maret 2023 menetapkan bahwa penugasan PSO bidang pers tahun anggaran 2023 diberikan kepada Perum LKBN ANTARA, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS)

2. Aspek Pemenuhan Produk PSO

Berdasar hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan produk PSO 2023 terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, skor yang dicapai adalah 20 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- Produksi telah berjalan sejak awal tahun
- Tingkat ketidakkelolosan produk dalam proses verifikasi sekitar 5 (lima) persen
- Kualitas produk semakin baik, ditandai dengan tingkat kelolosan dalam proses verifikasi yang rata-rata mencapai 95-100 persen.

3. Aspek Pemenuhan Distribusi PSO

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pemenuhan distribusi PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2023, skor yang dicapai adalah 20 dari bobot sebesar 20 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%. Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan baik, yaitu:

- Jumlah produk yang didistribusikan atau diseminasi sesuai target
- Jumlah kanal distribusi yang digunakan, sesuai target

4. Aspek Pelaporan

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pelaporan PSO terhadap penerapan tata Kelola penugasan PSO Bidang Pers 2023, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata Kelola penugasan PSO Bidang Pers aspek pelaporan PSO, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

5. Aspek Keuangan dan Perpajakan

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek keuangan dan perpajakan PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2023, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers, pada aspek keuangan dan perpajakan PSO, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

6. Aspek Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil evaluasi secara mandiri yang telah dilakukan pada aspek pengawasan internal PSO terhadap penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers 2023, skor yang dicapai adalah 15 dari bobot sebesar 15 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 100%.

Angka tersebut berarti secara umum penerapan tata kelola penugasan PSO Bidang Pers pada aspek pengawasan internal PSO, mencapai kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Sedangkan untuk pelaksanaan PSO tahun 2024, hasil evaluasi mandiri mengenai penugasan PSO di LKBN ANTARA hingga semester 1 tahun 2024.

Hal ini ditandai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang berjalan dalam pelaksanaan PSO 2023 yaitu: 1) Kegiatan *monitoring dan evaluasi (monev)* baik secara *on desk* maupun *on site* di internal Perum LKBN ANTARA, 2) Keberadaan Laporan Monev PSO 2023.

9. Mekanisme Tindak Lanjut

Adanya mekanisme bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, dan Perum LKBN ANTARA untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Kominfo, terkait pelaksanaan penugasan PSO Bidang Pers kepada Perum LKBN ANTARA.

Hingga Oktober 2024 ini, evaluasi antara Inspektorat Kominfo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo serta Perum LKBN ANTARA masih dilaksanakan untuk melakukan reviu terhadap pekerjaan penugasan PSO bidang Pers Perum LKBN ANTARA.

10. Gambaran PSO 2025

Sejak tahun 2016, prosentase pendapatan melalui penugasan pemerintah selalu berada di bawah pendapatan melalui usaha komersial. Penurunan ini selaras dengan tujuan perusahaan yang ingin meningkatkan kemandirian keuangan tanpa bergantung kepada pemerintah.

Berikut adalah komposisi pendapatan Komersil dan Pendapatan PSO:



Grafik 3.1. Komposisi Pendapatan PSO dan Komersil

Selain keberhasilan menurunkan persentase pendapatan dari penugasan pemerintah, Perum LKBN ANTARA masih harus menjawab beberapa tantangan terkait pelaksanaan PSO bidang Pers.

Situasi politik pasca perubahan kepemimpinan negara pada Oktober 2024 turut mempengaruhi pelaksanaan PSO LKBN ANTARA. Walaupun Tahun 2024, PSO LKBN ANTARA masih tetap mampu dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang berlaku, akan tetapi masa transisi perubahan kepemimpinan tersebut berdampak pada mundurnya proses perencanaan teknis untuk pelaksanaan penugasan PSO tahun 2025.

Untuk Tahun 2025 ini, Perum LKBN ANTARA diperkirakan mendapat pagu PSO sebesar **Rp.184.513.560.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Dengan angka di atas, Perum LKBN ANTARA mengusulkan jumlah kuota produksi yang dihasilkan sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Produk</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025 (Usulan)</i>
1	<i>Teks Hardnews</i>	<i>145.550</i>	<i>143.000</i>	<i>144.250</i>
2	<i>Teks Artikel</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>
3	<i>Foto</i>	<i>17.500</i>	<i>18.000</i>	<i>17.000</i>
4	<i>TV Features</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>40</i>
5	<i>TV Hardnews</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6	<i>Infografis</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>180</i>
7	<i>Foto Story</i>	<i>45</i>	<i>55</i>	<i>45</i>
8	<i>Podcast</i>	<i>15</i>	<i>25</i>	<i>20</i>
<i>Total</i>		<i>172.200</i>	<i>170.985</i>	<i>171.035</i>

Tabel 3.4. Usulan Jumlah Kuota Produksi PSO

Hingga Oktober 2024 ini, usulan tersebut masih dilakukan dalam proses pembahasan intens pada level kementerian.

BAB IV

RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

1. Kondisi yang Mempengaruhi RKAP 2025

1.1. Situasi Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Pengambilan Keputusan Nasional

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dan proyeksi 2024 menunjukkan pola yang tidak merata. Negara-negara berkembang di Asia, seperti India dan Vietnam, mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun, ekonomi Tiongkok melambat akibat lemahnya konsumsi dan sektor properti. Di sisi lain, negara-negara maju seperti Jepang dan sebagian besar negara di Zona Eropa masih mengalami pertumbuhan yang lemah.

Ketegangan geopolitik yang meningkat dan perubahan iklim semakin memperumit lanskap ekonomi global. Fragmentasi geoekonomi dan proteksionisme mengancam rantai pasok global dan meningkatkan ketidakpastian investasi. Sementara itu, peristiwa ekstrem akibat perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir, dapat mengganggu produksi pangan dan energi.

Meskipun inflasi global telah melandai dari puncaknya pada tahun 2022, tingkat inflasi di banyak negara masih di atas target bank sentral. Kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju, terutama kenaikan suku bunga, bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

1.2. Implikasi bagi Pengambilan Keputusan Nasional, Khususnya BUMN

Situasi ekonomi global yang kompleks ini memiliki sejumlah implikasi bagi pengambilan keputusan nasional, terutama dalam penyusunan RKAP 2025 BUMN:

- *Meningkatkan Ketahanan:* BUMN perlu memperkuat ketahanan bisnis dengan diversifikasi pasar, optimalisasi rantai pasok, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
- *Fokus pada Inovasi:* Investasi dalam inovasi dan teknologi digital menjadi semakin penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:* Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
- *Kolaborasi dan Kemitraan:* Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dapat memperkuat posisi BUMN.
- *Keberlanjutan:* BUMN perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam menjalankan bisnis, termasuk lingkungan dan sosial.

Situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian menuntut BUMN untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan bisnis. Dengan memahami dinamika ekonomi global dan mengambil langkah-langkah strategis, BUMN dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita (LKBN) ANTARA (*selanjutnya ditulis ANTARA dalam huruf kapital*) sebagai perusahaan media nasional beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan domestik. Perubahan lanskap media yang begitu pesat, baik dari segi teknologi maupun preferensi konsumen, turut membentuk tantangan dan peluang baru bagi perusahaan.

Perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, konflik geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas, berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Hal ini, secara tidak langsung, juga mempengaruhi iklim bisnis media nasional, termasuk ANTARA.

- *Ketidakpastian Ekonomi:* Kondisi ekonomi global yang volatil dapat mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak pada pendapatan iklan, salah satu sumber pendapatan utama perusahaan media.
- *Perubahan Pola Konsumsi Media:* Pandemi COVID-19 telah mempercepat pergeseran konsumsi media dari media tradisional ke media digital. Hal ini menuntut ANTARA untuk terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.
- *Persaingan Global:* Persaingan di industri media semakin ketat dengan munculnya platform digital global yang menawarkan konten yang lebih beragam dan personalisasi.

Selain faktor global, dinamika ekonomi domestik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ANTARA. Kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial budaya merupakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

- *Regulasi Pemerintah:* Perubahan regulasi di bidang media, seperti regulasi terkait platform digital, dapat berdampak pada model bisnis perusahaan.
- *Perkembangan Teknologi:* Adopsi teknologi digital yang semakin masif membuka peluang bagi ANTARA untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih inovatif.
- *Perubahan Preferensi Konsumen:* Perubahan preferensi konsumen terhadap konten media yang lebih berkualitas, relevan, dan interaktif menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan.

Di tengah berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh ANTARA, antara lain:

- *Pertumbuhan Ekonomi Digital:* Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membuka peluang bagi ANTARA untuk mengembangkan bisnis digital, seperti platform berita online dan layanan berlangganan konten.
- *Permintaan Akan Informasi Berkualitas:* Masyarakat semakin membutuhkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mendalam, sehingga ANTARA memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
- *Kemitraan Strategis:* Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun media lain, dapat memperkuat posisi ANTARA di pasar.

Untuk dapat bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat, ANTARA perlu melakukan berbagai upaya adaptasi dan transformasi. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Setiap tahun *Reuters Institute* menerbitkan salah satu laporan tren media yang paling relevan. Tahun ini, berdasarkan survei terhadap 314 pemimpin ruang redaksi di 56 negara, laporan tersebut menekankan bahwa meningkatnya penggunaan dan prospek AI akan meninggalkan jejak yang signifikan dalam bisnis media.

Di tahun penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, Reuters memperkirakan bahwa jurnalis dan organisasi berita perlu memikirkan kembali peran dan tujuan mereka, karena sebagian besar konten internet akan diproduksi secara sintesis pada tahun 2026.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun mendatang, pengaruh AI akan meluas dari pembuatan konten hingga distribusinya. *Search Generative Experiences (SGE)* dan *chatbot* yang digerakkan oleh AI akan mendefinisikan ulang cara informasi diakses secara daring. Penurunan lalu lintas dari platform utama, seperti Facebook dan X (sebelumnya Twitter), dapat semakin menantang situs berita tradisional, yang mendorong penerbit untuk mencari kemandirian dan membangun hubungan langsung dengan khalayak.

Meskipun menghadapi tantangan, organisasi berita di seluruh dunia beradaptasi dengan merangkul AI, mengakui potensi dan risikonya sebagai narasi yang mendasari untuk tahun mendatang.

Kondisi ekonomi global yang penuh tantangan pada tahun 2024 memberikan sejumlah implikasi bagi BUMN dalam merumuskan program kerja strategis di tahun 2025. Dengan memiliki perspektif yang komprehensif dan program kerja yang tepat, BUMN dapat berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi tahun yang penuh tantangan namun sarat dengan peluang bagi dunia usaha. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pertumbuhan investasi di kisaran 5,2-5,9 persen secara tahunan, sebuah angka yang ambisius namun tetap realistis di tengah ketidakpastian kondisi global.

Berdasarkan paparan Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta, investasi memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya yang mencapai sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak utama perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik maupun global. Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian diperkirakan akan tumbuh stabil di kisaran 5,0-5,2 persen, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan terkendalinya inflasi.

Sementara itu, di tingkat global, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan stagnan di level 3,2 persen. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang diperkirakan tumbuh antara 5,0-5,7 persen.

Melihat proyeksi tersebut, perusahaan perlu menyusun strategi yang tepat untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. *Fokus pada Investasi:* Meningkatkan investasi baik dalam bentuk penambahan kapasitas produksi, pengembangan produk baru, maupun perluasan pasar menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
2. *Memanfaatkan Konsumsi Domestik:* Memahami tren konsumsi masyarakat dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.
3. *Mengelola Risiko:* Perusahaan perlu memiliki rencana yang matang untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan pemerintah, dan ketidakpastian geopolitik.

Tahun 2025 menawarkan peluang besar bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menyusun strategi yang tepat dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional, perusahaan dapat meraih kesuksesan yang berkelanjutan.

2. Asumsi Penyusunan RKAP 2025

Parameter	Prognosa 2024	Target RKAP 2025
Asumsi Makroekonomi		
Pertumbuhan ekonomi (% <i>,yoy</i>) – outlook 2024 vs APBN 2025	5,1	5,2
Inflasi (% <i>,yoy</i>) – outlook 2024 vs APBN 2025	2,7	2,5
Nilai tukar rupiah (<i>Rp/USD</i>) – outlook 2024 vs APBN 2025	Rp 16.000	Rp 16.000
Suku bunga (%) – outlook 2024 vs APBN 2025	6,9	7,0
Asumsi Pendapatan		
1. Penyerapan pagu anggaran PSO	100%	100%
2. Kenaikan Pendapatan Layanan Data	3%	14%
3. Kenaikan Pendapatan Layanan Komunikasi	18%	35%
Asumsi Beban dan Margin		
1. Persentase Margin Kotor	32.13%	33.27%
2. Persentase Margin Operasi	5,93%	8,90%
3. Beban Pokok Penjualan	Rp 323.9 miliar	Rp 365.6 miliar
Asumsi Arus Kas Operasi		
1. Asumsi Perputaran piutang & aset modal kerja lainnya	165Hari	149Hari
2. Asumsi perputaran utang dagang & utang kerja lainnya	53,59Hari	42,48Hari
3. Asumsi modal kerja lainnya	-	-
Asumsi Arus Kas Investasi		
1. Total Capex untuk new project	(45,156)	(20,694)
2. Total Capex untuk maintenance	(8,000)	(8,325)
3. Total Capex untuk expansion	(7,500)	(2,820)
4. Total Investasi Anorganik	-	-
Asumsi Arus Kas Pendaan		
1. PMN	-	-
2. Dividen	-	-
3. Asumsi Penerbitan dan (Pelunasan) Utang Pendanaan	48,205	-9,160
4. Asumsi Biaya Utang (bunga)	5.395	8.093

Tabel 2.1. Asumsi dan Proyeksi Angka Pertumbuhan dalam Peyusunan RKAP 2025 (dalam juta rupiah)

Dari asumsi ekonomi makro di atas, yang paling mempengaruhi kondisi laporan keuangan ANTARA adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US karena beberapa sumber pendapatan diperoleh dalam bentuk Dollar US.

Meskipun pengeluaran pembiayaan operasional misalnya *profit sharing* kepada mitra asing, pembayaran biaya operasional biro luar negeri dan pembiayaan liputan luar negeri akan membebani kondisi keuangan dalam jumlah yang cukup signifikan.

Tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya-biaya operasional.

3. Misi Perusahaan

Sebagai bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, menyesuaikan dengan peta jalan perkembangan perusahaan untuk Penguatan dan Pengembangan Kapabilitas Korporasi, maka pada tahun 2025, misi Perum LKBN ANTARA adalah:

**“Mempersiapkan Korporasi Menuju Akselerasi Bisnis Perusahaan
Berbasis Layanan Publik”**

Misi tersebut diangkat sebagai tahapan kedua dalam persiapan korporasi untuk melesatkan upaya komersil namun tetap menjaga marwah sebagai kantor berita milik publik. Sehingga, ANTARA akan tetap berupaya menjalankan penugasan pemerintah melalui *Public Service Obligation (PSO)* bidang Pers.

Hal tersebut sebagai upaya melayani masyarakat Indonesia dengan menghadikan informasi yang berkualitas, namun juga mampu menjalankan peran komersil sebagaimana peran perusahaan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Sasaran Usaha, dan Strategi Perusahaan

4.1. Kebijakan penganggaran dalam RKAP tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kenaikan pendapatan minimum 10% dari prognosa tahun 2024 dengan detail sebagai berikut:

- Rencana Pendapatan dalam RKAP 2025 sebesar Rp547,998 Miliar adalah:
 - Porsi pendapatan PSO diperkirakan sebesar Rp184,514 Miliar
 - Porsi pendapatan komersil sebesar Rp345,73 Miliar
 - Porsi pendapatan anak usaha (Antara ETP) Rp17,75 Miliar
- Mengalokasikan anggaran 4,1% dari total biaya *human capital*, untuk Program Pengembangan karyawan
- Mengalokasikan anggaran sekitar Rp500Juta sebagai kegiatan program TJSL tahun 2025 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- Arus Kas bersih operasional perusahaan tahun 2025 adalah Rp47,24 Miliar
- Tingkat pencapaian EBITDA Anggaran tahun 2025 sebesar Rp61,02 Miliar
- Tingkat pencapaian laba di tahun 2025 Rp26,23 Miliar
- Target atas Kas Setara Kas akhir tahun 2025 Rp 103,26 Miliar
- Rencana Kontribusi Pajak Kepada Negara tahun 2025 Rp. 104,10 Miliar
- Rasio BOPO tahun 2025 sebesar 89%

Pembiayaan program dan kegiatan yang terkait dengan Arah Kebijakan Strategis Perusahaan yang tercantum dalam RKAP 2025 berbasiskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN pada November 2024 sebagai tetap menjadi fokus prioritas.

Untuk mempermudah pembuatan program kerja yang sesuai dengan arah strategi dan kebijakan perusahaan, maka dibuatkan KPI yang bisa menjadi dasar pembuatan program kerja dan kegiatan agar menjadi terukur dan terarah.

4.2. Sasaran Kunci Perusahaan tahun 2025

Sejumlah sasaran kunci yang ingin dicapai perusahaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Analisis Hasil Q3 2024, Prognosa 2024 (dibandingkan dengan RKAP 2024) dan RKAP 2025 Disajikan ikhtisar Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Arus Kas :

(dalam juta rupiah)

Parameter	RKAP 2024	Triwulan III 2024	Prognosa 2024	Target RKAP 2025
Ikhtisar Laporan Keuangan				
Laporan Laba Rugi	12.135	14.543	13.993	26.231
Neraca	485.350	501.514	489.048	515.238
Arus Kas	95.548	95.221	90.045	103.259
Margin-margin	2,52%	4,22%	2,80%	3,76%
Key Financial Ratios				
ROA	2,55%	3,10%	2,86%	5,09%
ROE	4,25%	5,36%	5,02%	8,03%
ROIC	4,51%	5,70%	6,13%	8,82%
EVA	2,145	3,747	4,384	15,086
IBD to IC	14%	18%	12%	16%
IBD to EBITDA	1,57	1,98	0,93	1,02
EBITDA pada Beban Bunga	528%	862%	743%	754%
Collection Period	78 hari	95 hari	86 hari	70 hari

Tabel 4.1. Analisis Hasil Q3 2024

Sasaran kunci/target dari sisi keuangan perusahaan dalam RKAP 2025 ini sedikit berbeda dibandingkan dengan target keuangan yang menjadi basis sasaran dalam RJPP 2025-2029. Adapun perubahan target keuangan tersebut merupakan dampak dari bentuk tindak lanjut perapihan tata kelola perusahaan, yang telah terpotret dalam beberapa hasil asesmen yang dilakukan seperti ICoFR.

4.3. Strategi

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ANTARA 2025-2029, tahun 2025 perusahaan berada dalam fase jalan dengan mentargetkan:

- Penguatan dan Pengembangan Kapabilitas Korporat melalui penguatan posisi sebagai *Flag Carrier* Jurnalistik Indonesia,
- Penguatan Produk Layanan Data,
- Penguatan Layanan Media dan Komunikasi,
- Diversifikasi Produk dan Layanan sesuai segmentasi, dan
- Penguatan Tata Kelola dan Reputasi Organisasi secara keseluruhan.

Mengacu pada fase jalan tahun 2025, ANTARA menetapkan Proses Bisnis dan Sasaran Mutu yang akan diimplementasikan selama tahun 2025 digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.1. Proses Bisnis dan Sasaran Mutu ANTARA



5. Program Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, secara umum Program Kerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam RJPP 2025-2029 sebagai berikut:

Tahun	Tema	Strategi	Sub Strategi	Program Kerja	Unit
2025	Mempersiapkan Korporasi Menuju Akselerasi Bisnis Perusahaan Berbasis Layanan Publik	Peningkatan kualitas berita untuk mencerdaskan bangsa	Pelayanan Diseminasi Informasi Negara Republik Indonesia melalui <i>Public Service Obligation</i> (PSO)	Memastikan keberlangsungan PSO Kantor Berita ANTARA	Direktorat Pemberitaan
				Berkoordinasi dengan auditor untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi ekspektasi Kementerian Komunikasi dan Digital	Divisi Keuangan
				Menyediakan aplikasi media penyimpanan bagi mitra distribusi yang mudah digunakan	Koordinator Biro dan PSO
			Produksi berita/konten berdampak terhadap edukasi masyarakat dan menyehatkan ekosistem media	Optimalisasi Berita Anti Hoax sebagai Produk Unggulan	Direktorat Pemberitaan
				Perluasan Jangkauan Saluran Distribusi di Seluruh Indonesia	Direktorat Pemberitaan
				Optimalisasi produk/berita beranalisa kedalaman	Direktorat Pemberitaan
			Produksi berita/konten berwawasan pasar	Konten Kerjasama Peliputan dan Publikasi	Direktorat Pemberitaan
				Peningkatan tingkat keterbacaan <i>antaranews.com</i>	Direktorat Pemberitaan
				Peningkatan Aset Digital melalui Sosial Media	Direktorat Pemberitaan
				Perluasan peran Newsroom (National Newsroom, ASEAN newsroom, dll)	Direktorat Pemberitaan
				Menunjuk atau menghire petugas yang salah satu tugas utamanya adalah memantau kebijakan algoritma google	Direktorat Pemberitaan
				Menyusun laporan update kebijakan algoritma google setiap satu bulan sekali	Direktorat Pemberitaan
			Produksi berita/konten unggulan Nusantara	Peningkatan Kuantitas Berita	Direktorat Pemberitaan

Tahun	Tema	Strategi	Sub Strategi	Program Kerja	Unit
				Lokal/Khas Biro Daerah melalui laman Jelajah Nusantara	
				Peningkatan tingkat keterbacaan laman Jelajah Nusantara	Direktorat Pemberitaan
			Monetasi Aset digital Perusahaan (Sosial Media)	Pengelolaan afiliasi dengan platform sosial media	Direktorat Pemberitaan
		Pengembangan bisnis dan layanan ke pelosok Nusantara	Solusi Media dan Strategi Komunikasi Terintegrasi (IMCS)	Penambahan variasi produk portofolio layanan IMCS	Departemen Layanan Komunikasi Strategis
				Peningkatan pendapatan melalui peningkatan jumlah kerjasama layanan IMCS di segmentasi pasar Perusahaan BUMN	Departemen Layanan Komunikasi Strategis
				Peningkatan Kualitas Layanan Lembaga Pendidikan Antara sebagai Lembaga Pendidikan Jurnalistik terpercaya	Departemen Lembaga Pendidikan Antara
			Peningkatan Bisnis Biro Daerah	Peningkatan Pendapatan Bisnis Portal Biro Daerah	Biro Daerah
				Peningkatan kapasitas tenaga komersil Biro Daerah	Biro Daerah
			Memaksimalkan Bisnis Data dan Layanan Informasi Finansial	Mempertahankan Kerjasama Operasional dengan Bloomberg dan Reuters / LSEG Refinitiv	Departemen KSO Bloomberg dan Departemen KSO Reuters
					AntaraETP sebagai anak usaha
				Pengembangan produk portofolio Layanan Analisa Informasi Finansial	Departemen Layanan Analisa Informasi
				Memonitor progress pembaruan kontrak dan melibatkan Manajemen Risiko dalam proses reuiu kontrak untuk memastikan asumsi nilai tukar yang digunakan telah mempertimbangkan risiko dua tahun ke depan	Departemen KSO Bloomberg

Tahun	Tema	Strategi	Sub Strategi	Program Kerja	Unit
			Mengembangkan Bisnis dan Layanan Inovatif Berwawasan Pasar	Pengembangan produk berbasis infomediary	Divisi Layanan Media & Komunikasi
				Menunjuk Konsultan Manajemen Perubahan untuk membantu mengkampanyekan kebijakan baru demi sustainabilitaas perusahaan	Divisi Layanan Media & Komunikasi
				Mencari Talenta AE baru untuk membantu pencapaian target komersial	Divisi Layanan Media & Komunikasi
				Memberikan pelatihan insentif kepada AE yang ada	Divisi Layanan Media & Komunikasi
			Diversifikasi Agensi Media	Perluasan portfolio produk agensi media	Departemen Layanan Komunikasi Strategis
		Penguatan reputasi Korporasi dan pementapan tata kelola Perusahaan	Penguatan Reputasi Korporasi di Publik dan Tingkat Kepercayaan Regulator/Eksekutif dan Legislatif	Berkontribusi dalam Agenda Nasional Tahunan Negara	Sekretariat Perusahaan
				Program TJSJL atau literasi informasi hingga level publik di 3T	Departemen TJSJL & Komunikasi Perusahaan
			Menanamkan budaya Perusahaan AKHLAK	Tahapan internalisasi budaya Perusahaan	Departemen Pengembangan SDM
			Memperkuat Tata Kelola Perusahaan terstandarisasi dan berbasis risiko	Penerapan Manajemen Risiko dalam lini bisnis Perusahaan	Departemen Manajemen Risiko
				Penerapan tata kelola berbasis SNI ISO dan ketentuan lain yang menjadi standar nasional (INDI 4.0)	Divisi Manajemen Strategis
				Dukungan Integrasi Teknologi Informasi dalam Keterbukaan Informasi Publik (finansial, perpajakan dan korporasi)	Divisi Teknologi Informasi
				Mengembangkan dan menggunakan software compliance tracker	PT AETP
				Pembaruan kontrak dengan moratel dengan memasukkan SLA	Divisi Teknologi Informasi
				Penyusunan dan pelaksanaan DRP	Divisi Teknologi Informasi

Tahun	Tema	Strategi	Sub Strategi	Program Kerja	Unit
			Penguatan basis finansial Perusahaan	Peningkatan tata kelola keuangan dan pengendalian biaya Perusahaan	Divisi Keuangan
				Memasukkan biaya bunga dalam struktur HPP	Divisi Keuangan
				Pelatihan analisis pasar keuangan dan makroekonomi	Departemen Manajemen Risiko
				Memonitor tingkat kesehatan pinjaman	Divisi Keuangan
			Kebijakan Struktur Beban Pokok Baru	Menyusun kebijakan struktur beban pokok penjualan dari setiap produk perusahaan	Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Pengembangan Bisnis
			Likuidasi Dana Pensiun	Membuat perencanaan penjualan aset Dana Pensiun beresiko tinggi	Tim Likuidasi Dana Pensiun
				Memonitor selis penjualan aset Dana Pensiun beresiko tinggi	Tim Likuidasi Dana Pensiun
		Mempersiapkan Talenta Perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing	Mempersiapkan Talenta Perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing	Ketersediaan jenjang karir sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Departemen Manajemen SDM
				Peningkatan kompetensi SDM berwawasan digital	Departemen Pengembangan SDM
				Ketersediaan talenta sesuai kebutuhan perusahaan	Departemen Manajemen SDM

Tabel 5.1. Program Kerja Strategis ANTARA tahun 2025

5.1. Peningkatan Kualitas Berita untuk Mencerdaskan Bangsa

Sebagai Kantor Berita Indonesia yang berbasis Media Informasi publik, maka peran ANTARA adalah menciptakan berita yang mampu memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.

Dalam perannya sebagai Kantor Berita, ANTARA akan melaksanakan penugasan pemerintah melalui PSO di bidang informasi publik, sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai Kementerian teknis.

Hal tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga terhadap informasi publik dan komunikasi publik pemerintah yang bersifat memberdayakan serta memperbaiki karakter masyarakat, meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah, meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan.

Dalam peranannya sebagai Kantor Berita Indonesia, ANTARA memiliki jaringan distribusi informasi paling luas di Indonesia. Representasi ANTARA melalui kantor biro di 32 Provinsi dari

38 Provinsi di seluruh Indonesia menjadi keunggulan ANTARA dalam penyebaran informasi hingga ke pelosok negeri.

Di tahun 2025, ANTARA berencana untuk menguatkan jaluran distribusi informasi dengan memperluas kerjasama dengan surat kabar atau portal lokal daerah. Penguatan kantor biro provinsi sebagai representasi ANTARA juga dilakukan melalui pengembangan etalase Provinsi melalui portal biro Provinsi dengan keanekaragaman produk berita khas lokal daerah masing-masing.

Sebagai media massa, ANTARA juga menyediakan kanal yang diperuntukkan untuk masyarakat secara langsung melalui portal *antaranews.com* yang menyediakan produk jurnalistik berupa berita teks, foto, video, infografis dan podcast.

Portal *antaranews.com* diharapkan menjadi portal referensi utama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang berimbang, mencerahkan dan berkedalaman. Portal *antaranews.com* dikembangkan dengan mengacu pada kebutuhan pasar media di Indonesia. Salah satu program unggulan perusahaan di portal *antaranews.com* adalah memproduksi berita-berita yang mengklarifikasi berita bohong (hoax) yang pada tahun 2025 direncanakan akan tetap diproduksi selaras dengan kondisi politik dan ekonomi pasca pesta demokrasi tahun 2024.

Portal *antaranews.com* sebagai etalase ANTARA yang langsung melayani pelanggan masyarakat, seperti halnya portal media pada umumnya, portal *antaranews.com* juga menyediakan berita-berita berorientasi pada kebutuhan dan preferensi pasar informasi.

Untuk itu di tahun 2025, ANTARA akan lebih mengembangkan portal *antaranews.com* untuk mampu bersaing dan unggul dibandingkan dengan portal media lain melalui pemeringkatan portal / *SEO Tools* khusus. Salah satu yang akan ditonjolkan sebagai produk unggul portal *antaranews.com* adalah pengembangan konten-konten dengan sifat terus relevan sepanjang waktu (*evergreen*). Pengembangan konten *evergreen* ini diyakini akan dapat meningkatkan keunggulan portal *antaranews.com* sebagai referensi informasi terpercaya,

ANTARA memiliki produk yang menjadi salah satu khasnya, yaitu adalah berita artikel dengan analisis berkedalaman, yang dikenal sebagai produk Karangan Khas (Karkhas). Di tahun 2025, produk ini dikuatkan untuk dijadikan menjadi salah satu produk unggulan perusahaan.

Pesatnya penggunaan sosial media sebagai sarana distribusi juga dimanfaatkan oleh ANTARA sebagai bagian dari pencitraan perusahaan. ANTARA hadir dalam berbagai platform sosial media untuk menjangkau seluruh generasi pengguna sosial media. Saat ini, ANTARA sudah memiliki jutaan followers dari 5 platform sosial media ternama, seperti Youtube, X, Facebook, Instagram, dan Tiktok. Untuk itu, di tahun 2025, ANTARA akan menguatkan aset-aset digital tersebut melalui upaya-upaya untuk meningkatkan followers pada semua platform sosial media publik milik ANTARA, yang akan membawa manfaat bagi perusahaan melalui monetasi dari aset digital tersebut.

Portofolio bisnis ANTARA dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Bagan 5.2. Portofolio Bisnis ANTARA

Program Kegiatan bidang Produksi Pemberitaan: Peningkatan Kualitas Produk Pemberitaan (MPRN)



Connect with us



1. Pemenuhan Kebutuhan Warga terhadap Informasi Publik dan Komunikasi Publik Pemerintah yang bersifat memberdayakan, memperbaiki karakter Masyarakat, me ningkatkan partisipasi public terhadap pemerintah, meningkatkan kecepatan penyebaran informasi tentang kenegaraan dan kemasyarakatan
2. Kanal untuk Masyarakat melalui portal www.antaraneews.com, dengan salah satu produk unggul berupa berita yang mengklarifikasi berita bohong (hoax)
3. Memperkuat Jaringan Distribusi Informasi di Indonesia. Representasi LKBN ANTARA melalui kantor biro di 32 Provinsi dan 2 Perwakilan di Luar Negeri
4. Penambahan Aset Digital Perusahaan melalui pengembangan sosial media dengan peningkatan jumlah followers

5.2. Pengembangan Bisnis dan Layanan ke Pelosok Nusantara

Sebagai korporasi berbadan hukum Badan Usaha Milik Negara, ANTARA memiliki juga tuntutan untuk mampu mengembangkan perusahaan melalui upaya aktivitas bisnis komersial. Pengembangan bisnis ANTARA tahun 2025, akan difokuskan pada produk-produk unggulan perusahaan melalui strategi pemasaran berbasis segmentasi pasar, sebagai berikut:

Segmentasi Layanan Korporasi Media

Segmentasi ini adalah segmentasi layanan yang berbasis produksi dan distribusi konten berita multimedia. Terbagi atas sub-segmentasi yang terdiri dari:

a. Konten Berita *Public Service Obligation* (PSO)

PSO memfokuskan pada produk dan layanan berita yang disepakati dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, berupa jenis produk berita yang dihasilkan, kisi-kisi yang menjadi panduan utama tahunan dalam program diseminasi informasi, serta bentuk jaringan distribusi informasi.

Untuk tahun 2025, Layanan berbasis PSO dijabarkan dalam Bab tersendiri dalam buku dokumen RKAP ini.

b. Konten Berita Non-PSO (*antaranews.com*)

ANTARA juga mengembangkan produk berita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar informasi, di luar dari berita yang di persyaratkan oleh PSO. Berita-berita ini didistribusikan melalui kanal milik korporasi, yang langsung menyentuh kepada pengguna akhir atau konsumen perusahaan (*Business to Customer/B2C*).

Produk yang menjadi andalan adalah kanal *Antaranews.com*, kanal *AntaraTV.com*, kanal *AntaraFoto.com*, kanal portal 32 Biro ANTARA daerah di seluruh Indonesia serta media sosial pemberitaan milik korporasi.

Di tahun 2025, segmentasi Non-PSO melalui kanal berita milik ANTARA, akan mengembangkan sisi komersilnya baik melalui penjualan banner secara retail pada kanal portal, maupun pengembangan konten kolaborasi dalam model bisnis *infomediary*/kanal kekhususan.

c. Platform Penyedia Konten Berita untuk Media Massa (*Newswire*)

Produk berita yang dihasilkan oleh ANTARA juga disebarakan melalui platform berlangganan BRANDA yang menasar pada media atau pemangku kepentingan lain yang membutuhkan bank data berita harian.

Di tahun 2025, BRANDA sebagai layanan fungsi Kantor Berita (*news agency*) akan berupaya memperluas jaringan penjualannya dengan mengembangkan metode prabayar dengan kuota tertentu, agar dapat lebih menjangkau sasaran konsumen ritel yang lebih luas.

d. Kanal Distribusi

Dalam peranannya sebagai Kantor Berita, ANTARA juga memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi langsung ke publik (B2C). Salah satu kanal distribusi yang langsung menyentuh publik dalam skala luas adalah media digital luar ruang berupa TV Robot dan *Digital Out-of-Home* (DOOH).

Di Tahun 2025, ANTARA akan memperluas kanal distribusi media digital luar ruang tersebut melalui penambahan titik penempatan di tempat-tempat strategis dan terjangkau oleh khalayak / publik di seluruh Indonesia.

Segmentasi Bisnis Layanan Informasi Finansial

Melalui kerjasama kemitraan yang sudah terbina lama dengan baik antara Perum LKBN ANTARA dengan Bloomberg LP maupun London Stock Exchange Group (LSEG, dahulu Refinitiv/Reuters), ANTARA akan terus memberikan layanan perluasan pasar penyedia data global yang dimiliki oleh mitra-mitra tersebut. Aktivitas utamanya melalui penjualan perangkat keras (Terminal) dan perangkat lunak (platform) layanan di pasar regional Indonesia.

Di tahun 2025, ANTARA akan melakukan penguatan kerjasama kemitraan dengan Bloomberg maupun LSEG dalam hal penambahan jenis produk dan layanan milik mitra yang dijualkan melalui ANTARA.

Selain menjualkan produk dan layanan data milik mitra Bloomberg maupun LSEG, ANTARA juga berupaya mengembangkan produk layanan digital melalui platform solusi digital atau perangkat lunak finansial yang akan disesuaikan dengan permintaan pasar melalui Layanan Analisa Informasi. Secara lebih lanjut, Layanan Analisa Informasi akan dikembangkan untuk memperluas peran ANTARA dalam solusi teknologi informasi berbasis *Big Data* dan *Machine Learning* (Mesin Pembelajaran).

Segmentasi Anak Perusahaan melalui PT AntaraETP

PT Antara Elektronik Transaksi Pratama (Antara ETP) adalah Anak Usaha ANTARA yang menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penunjang jasa keuangan bukan asuransi, bukan penjamin dan dana pensiun, yaitu penyelenggaraan infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Antara ETP memiliki kemitraan eksklusif dengan Bloomberg untuk penyediaan layanan *Electronic Trading Platform (ETP)* dalam ekosistem Bloomberg untuk transaksi pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia.

Di Tahun 2025, PT ANTARA ETP akan melakukan beberapa upaya peningkatan pendapatan dan profitabilitas perusahaan serta mendukung Induk usaha melalui beberapa program kerja umum sebagai berikut:

No	Kebijakan Umum	Sasaran Usaha
1	Peningkatan Pendapatan dan Profitabilitas serta Optimasi Cash Flow Perusahaan	Pendapatan Usaha, EBITDA, Cash Flow Operasional Positif
2	Peningkatan Maturitas Pengelolaan Risiko serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan perjanjian kerjasama dengan Bloomberg	Pengembangan Enterprise Risk Management (ERM), Pemantauan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan corporation agreement yang telah disepakati
3	Program CSR yang selaras dengan tujuan berkelanjutan perusahaan dan menciptakan dampak sosial yang positif	Pelaksanaan kegiatan CSR
4	Mendorong inovasi melalui pengembangan dan peluncuran produk/layanan baru dan memperkuat sinergi dengan induk perusahaan	Peluncuran produk/layanan baru, dan peningkatan kolaborasi produk dengan induk
5	Investasi dalam teknologi baru untuk pengembangan internal serta otomatisasi dalam proses bisnis	Inovasi teknologi baru dan otomasi proses bisnis melalui teknologi informasi
6	Peningkatan keamana sistem melalui tindak lanjut penetration testing	Penetration testing report secara berkala
7	Penambahan sumber pendapatan jangka panjang	Implementasi global rate card sesuai standar Bloomberg

Segmentasi Layanan Media dan Komunikasi

Segmentasi ini adalah segmentasi layanan satu pintu (*one stop shopping*) hulu-hilir untuk berbagai kebutuhan strategi komunikasi publik, mulai dari hulu ke hilir. Melalui *Integrated Media and Communication Services (IMCS)*, ANTARA telah membantu perusahaan BUMN maupun swasta, serta instansi pemerintahan untuk dapat mengelola dan mengkomunikasikan isu, strategi maupun produk yang dimiliki, melalui kelengkapan infrastruktur pendukung, produksi isu serta jaringan distribusi yang dimiliki.

ANTARA melalui layanan IMCS di tahun 2024 akan mengarahkan pendekatan kebutuhan pasar (*supply driven*) dengan melakukan kageterisasi atau *pipelining* pada industri-industri yang menjadi potensi pendapatan yang besar bagi perusahaan. Tenaga pemasar layanan solusi komunikasi IMCS akan disentralisasi dari pusat namun dengan jangkauan pasar di seluruh Indonesia melalui kantor Biro ANTARA yang tersebar di 33 Provinsi seluruh Indonesia dan Luar Negeri.

Diharapkan dengan demikian maka potensi pasar yang bisa diraih oleh ANTARA melalui layanan IMCS akan lebih besar.

Di tahun 2025, ANTARA akan mengagendakan penyelenggaraan kegiatan besar (*flagship events*) seperti Antara Festival, Antara Business Forum, Color Run, dan Merawat Sang Legenda.

Segmentasi Layanan Pendidikan dan MICE

Segmentasi ini merupakan bagian dari ekosistem dan infrastruktur pendukung layanan IMCS. Dioperasikan dengan memanfaatkan kompetensi utama perusahaan di bidang komunikasi dan pemanfaatan aset milik perusahaan.

Layanan Pendidikan dikembangkan melalui *Lembaga Pendidikan Antara (LPA)*, yang berfokus pada pelayanan pendidikan dalam bidang komunikasi seperti jurnalistik, kehumasan, dan sosial media. Didukung dengan staf pengajar yang andal dan kompeten di bidang komunikasi strategis, *Public Relation*, jurnalistik, serta media massa, Lembaga Pendidikan Antara diharapkan dapat mampu berkembang menjadi suatu entitas pendidikan non formal yang terpercaya di bidang komunikasi.

Melalui model bisnis MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Event*), ANTARA akan mampu memaksimalkan monetasi aset dan ruang yang dimiliki oleh ANTARA. Baik untuk mendukung layanan IMCS, maupun untuk kegiatan-kegiatan MICE lainnya sesuai kebutuhan pasar dan visi misi perusahaan. ANTARA memiliki aset unggul berupa gedung heritage kelas 1 di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

5.3. Penguatan Reputasi Korporasi dan Pemanjapan Tata Kelola Perusahaan

Program kerja perusahaan tahun 2025 juga mencakup penguatan reputasi korporasi dan pemanjapan internal perusahaan melalui tata kelola berbasis *Good Corporate Governance (GCG)*.

a. Penguatan Reputasi dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

ANTARA akan terus berkontribusi dalam berbagai agenda nasional tahunan kenegaraan, seperti penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar-negara (*International Summit*) atau pesta olahraga skala nasional dan internasional. ANTARA akan berupaya untuk hadir dan menjadi penyedia informasi resmi (*official broadcaster*), mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi agenda nasional tersebut.

Peningkatan reputasi melalui pencitraan merek (*branding*) korporasi juga terus dilakukan oleh ANTARA melalui platform sosial media perusahaan yang disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dibidik.

Perbaikan menyeluruh di dalam perusahaan juga terus dilakukan oleh ANTARA, melalui penguatan budaya AKHLAK sebagai *core value* di perusahaan sesuai dengan *milestone* yang telah ditetapkan, serta membenahan tata kelola perusahaan terstandarisasi dan berbasis risiko, sehingga perusahaan.

Keberlangsungan korporasi didukung dengan penguatan basis finansial perusahaan. Selain dari upaya pencapaian target pendapatan, ANTARA juga akan melakukan perbaikan tata kelola keuangan perusahaan serta melakukan upaya pengendalian biaya perusahaan berbasis risiko.

b. Talenta dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, ANTARA harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap memiliki budaya AKHLAK, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan yang fokus pada pengembangan talenta digital, memberikan kesempatan kepada perempuan dan top talent muda (*millennial*) untuk mengisi jabatan di perusahaan serta hal-hal yang terkait dengan perkembangan teknologi terbaru. ANTARA mendesain dan menjalankan program-program yang mendukung perkembangan talenta, ketersediaan peraturan dan kebijakan yang mengatur terciptanya ekosistem kerja yang dinamis dan agile, dengan harapan dapat mendukung peningkatan pendapatan menuju Perusahaan yang mandiri. Keberagaman talenta perusahaan pada level struktural sebagai kunci dari jalannya perusahaan akan ditingkatkan melalui berbagai upaya persiapan pembekalan/*grooming* agar mampu menduduki posisi-posisi struktural hingga tingkat puncak pimpinan. Tahun 2025, ANTARA akan melakukan pengkaderisasi dengan lebih melibatkan pengembangan talenta inklusif (muda milenial dan perempuan) untuk dapat siap dalam posisi BOD-1 dan BOD-2.

Perhatian terhadap pentingnya pengembangan kompetensi insan perusahaan mendorong tingkat produktivitas dari seluruh insan Perum LKBN Antara untuk dapat mampu mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat mengukur seberapa jauh insan ANTARA berkontribusi terhadap perusahaan, Perum LKBN ANTARA akan membandingkan dari EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*; atau Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi) dibandingkan dengan total pegawai perusahaan. Dari sini akan terlihat seberapa besar kontribusi insan ANTARA terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menyiapkan perusahaan terhadap tantangan terhadap perkembangan teknologi dan target di atas, maka perusahaan perlu menyiapkan talenta-talenta digital yang melek teknologi. Untuk keperluan tersebut perusahaan telah menyiapkan master plan teknologi dan informasi, bukan saja untuk fungsi IT tetapi fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Dikarenakan saat ini talenta Antara belum mumpuni untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah lebih banyak dilaksanakan secara berdasarkan digital.

Selain mengembangkan kompetensi di bidang kewartawanan yang menjadi bisnis inti perusahaan, ANTARA juga memfokuskan pada peningkatan kompetensi di bidang teknis seperti bidang hukum, bidang sumber daya manusia, bidang manajemen risiko, bidang keuangan, bidang pemasaran, dan lainnya, baik melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan bidang teknis masing-masing ataupun melalui berbagai sertifikasi yang diakui nasional dan internasional.

Selain menyiapkan talenta digital perusahaan juga menyiapkan sumber daya manusia yang inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan agile. Dalam hal ini perusahaan telah mempunyai kebijakan berperilaku saling menghargai di tempat kerja (*Respectful Workplace Policy/RWP*) di lingkungan ANTARA sesuai dengan SKEP Nomor: Per-008/DIR01.ANT/VIII/2022. Dalam peraturan ini, dijelaskan terkait menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, menghargai keberagaman, bebas dari ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dapat memberikan efek positif bagi para insan ANTARA. Selain juga harapan dari KBUMN yang disampaikan melalui APS Penyusunan RKAP tahun 2024 untuk para Perusahaan BUMN untuk dapat mengimplementasikan RWP secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sadar atas pentingnya kesehatan fisik maupun mental dari insan ANTARA dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan berkontribusi positif, ANTARA juga berupaya untuk membangun budaya kerja yang kondusif dan berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja perusahaan dengan mengutilisasi kebijakan-kebijakan atau program yang mementingkan *Employee Well-Being (EWB)*. Program kesejahteraan insan ANTARA secara menyeluruh akan meliputi kesejahteraan dalam aspek fisik, mental, sosial dan finansial termasuk memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung kinerja perempuan dan penyandang disabilitas. Diharapkan dari adanya kebijakan *employee well being* ini, maka akan tercipta *work life balance* (keberimbangan hidup) insan ANTARA yang berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

ANTARA senantiasa melakukan perbaikan sistem terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas perusahaan. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal serta menyempurnakan struktur organisasi.

Berdasarkan tahapan dalam AKHLAK Cultural Journey, di tahun 2025 penerapan nilai budaya AKHLAK sebagai core value di Perum LKBN ANTARA telah sampai pada tahapan Perubahan Perilaku (*Behaviour Change*), dimana dalam tahapan ini nilai-nilai AKHLAK telah tercermin dalam perilaku positif seluruh anggota organisasi yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam tahapan Perubahan perilaku ini, seluruh insan ANTARA diharapkan telah secara sadar menerapkan nilai-nilai AKHLAK dalam kegiatan kesehariannya.

c. Peningkatan Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka memaksimalkan upaya efisiensi di segala lini perusahaan dan mendukung pencapaian komersil, ANTARA terus melakukan pembenahan pada tata kelola keuangan perusahaan melalui upaya-upaya seperti penyeragaman kebijakan penentuan biaya proyek, perapihan akun perusahaan, pengurangan rasio piutang perusahaan tidak tertagih.

Sebagai bagian dari mitigasi risiko bisnis, ANTARA telah berupaya untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai perjanjian termasuk perjanjian bisnis dan telah melakukan standarisasi dokumen perjanjian sesuai dengan pedoman tata persuratan perusahaan melalui PER – 001/DIR01/ANT/I/2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum LKBN ANTARA. Di tahun 2025 ini, ANTARA akan terus mengedepankan kepatuhan dalam hal dokumen perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Penyelarasan tata kelola juga dilakukan sebagai tindaklanjut dari berbagai basis penilaian (asesmen) yang diterapkan di perusahaan. Berbagai upaya peningkatan tata kelola berbasis penilaian di tahun 2025 yang terus akan dilakukan antara lain ANTARA akan memastikan:

- Penerapan berkelanjutan dari peningkatan kualitas produksi serta komersil berbasis sertifikasi internasional ISO 9001:2015
- Penerapan berkelanjutan kebijakan dan praktek anti penyuapan dalam segala lini perusahaan melalui penerapan sertifikasi ISO 37001: 2016
- Penerapan tata kelola perusahaan berkelanjutan melalui peningkatan skor *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX)*
 - a. Pemenuhan gap teknologi sebagai bagian dari Transformasi INDI 4.0 sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan
 - b. Penataan terhadap aset perusahaan, dengan konsisten menyampaikan daftar aset tetap melalui Portal Aset BUMN
 - c. Upaya Penataan terhadap sertifikat-sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki ANTARA
 - d. Penerapan implementasi peta jalan dari hasil penilaian *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* di semua lini
 - e. Peningkatan aspek hukum dalam setiap lini pengelolaan perusahaan dalam rangka pengendalian risiko
 - f. Penerapan berbagai kebijakan kematangan penerapan manajemen risiko perusahaan untuk meningkatkan skor *Risk Maturity Index*
 - g. Peningkatan kematangan pengelolaan SDM (*Human Capital Management Maturity Level*) secara berkelanjutan berdasarkan Arsitektur SDM BUMN
- Penerapan berbagai kebijakan dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan

Berbagai upaya perbaikan tata kelola tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan dari seluruh insan perusahaan. Untuk itu, ANTARA akan membentuk tim perubahan (*change agent*), sebagai tim yang membantu dalam mengkomunikasikan perubahan kepada semua lini, memastikan percepatan penerimaan perubahan diterapkan oleh seluruh insan ANTARA serta memastikan penerapan perubahan yang dilakukan berdampak pada upaya perusahaan menuju target korporasi yang telah ditetapkan. Diharapkan kehadiran tim perubahan ini dapat

meminimalisir berbagai risiko yang ditimbulkan akibat dari dampak perubahan yang dilakukan di perusahaan.

Sebagai korporasi, Perum LKBN ANTARA tetap berkomitmen untuk terhadap keterbukaan informasi publik, dengan informasi atau data yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dalam Laporan Tahunan sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 maupun Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui ketentuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

h. Pengalihan Dana Pensiun ANTARA dari DPPK ke DPLK

Tahun 2025 menjadi tahun kedua bagi ANTARA dalam rangka melakukan aksi korporasi Pengalihan Dana Pensiun ANTARA dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sekaligus melakukan likuidasi terhadap Dana Pensiun ANTARA.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam melakukan efisiensi pada lini supporting, mengingat dalam Dana Pensiun dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebelum di putuskan untuk dilikuidasi menyumbang beban umum dan administrasi cukup signifikan sebesar Rp. 10 miliar per tahun untuk ditanggung oleh perusahaan.

Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan selama target waktu 2 (dua) tahun, melalui proses kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah izin likuidasi Dana Pensiun di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-52/D.05/2014 tanggal 21 Juni 2024 serta persetujuan atas Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun ANTARA (Dalam Likuidasi) telah disetujui melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-603/PD.12/2024 tanggal 9 Oktober 2024, maka proses likuidasi Dana Pensiun ANTARA sudah dijalankan sejak 16 Oktober 2024 melalui pencairan manfaat pensiun sekaligus kepada peserta Dana Pensiun dari pensiunan.

Berdasarkan Rencana Kerja yang telah disetujui tersebut, pada tahun 2024 tahapan yang telah dilaksanakan antara lain:

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pertemuan awal penetapan langkah likuidasi antara Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas Dana Pensiun, perwakilan Karyawan, perwakilan Pensiunan dan Konsultan	Sudah dilakukan sejak tahun 2023
2	Sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh peserta dan perwakilannya	Dimulai pada 25 Maret 2024 untuk peserta aktif dan pensiunan pada 22 April 2024
3	Inventarisasi data kepesertaan per tanggal pembubaran (31 Desember 2023) dan kegiatan rekapitulasi data selama proses likuidasi	Sudah selesai dilakukan sebagai bagian dari syarat persetujuan Rencana Kerja
4	Pemberitahuan pembubaran melalui pengiriman surat tercatat kepada setiap bekas karyawan	Telah selesai dilakukan pada minggu ke 4 Juli 2024

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
5	Inventarisasi Kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun serta rekapitulasi selama proses likuidasi	Inventarisasi telah selesai dilakukan sebagai bagian dari syarat persetujuan Rencana Kerja
6	Penyelesaian investasi dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, sukuk, SDM	Bertahap, memperhatikan tata kelola yang berlaku atas pelepasan investasi
7	Penyelesaian investasi dalam bentuk penempatan langsung, tanah dan bangunan, termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai aset operasional	Tanah dan Bangunan berupa rukan di Surabaya, Jawa Timur disepakati untuk dibeli Pendiri pada akhir 2024. Pelepasan investasi tanah dan bangunan lainnya akan dilaksanakan secara bertahap
8	Penyelesaian piutang-piutang iuran dan kekurangan solvabilitas	Piutang iuran telah dilunasi, sesuai komitmen tertulis Pendiri yang akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Pelunasan pertama sebesar Rp. 16.000.000.000,- dilakukan pada November 2024
9	Penyelesaian inventaris berupa peralatan komputer, peralatan kantor, aset operasional lainnya	Akan diselesaikan melalui mekanisme lelang internal atau eksternal, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang berlaku
10	Proses audit laporan Keuangan Dana Pensiun per tanggal pembubaran oleh Kantor Akuntan Publik serta dan perhitungan aktuaris per tanggal pembubaran oleh aktuaris	Telah selesai dilaksanakan sebagai bagian dari syarat persetujuan Rencana Kerja, telah disampaikan pada 2 September 2024
11	Menetapkan hak setiap peserta atas manfaat pensiun dan manfaat lain per tanggal efektif pembubaran berdasarkan laporan keuangan audit dan laporan aktuaris	Dilaksanakan bertahap sesuai proses pembayaran manfaat sekaligus bagi pensiunan (2024)/pengalihan ke DPLK bagi karyawan aktif (2025)
12	Pembayaran hak atas manfaat pensiun sekaligus	Pembayaran hak atas manfaat pensiun sekaligus kepada pensiunan dilaksanakan secara bertahap dimulai 16 Oktober 2024
13	Penetapan DPLK yang ditunjuk untuk karyawan aktif	Telah dilaksanakan dimulai Akhir Juli 2024
14	Penyelesaian piutang hasil investasi	Dilakukan bertahap menyesuaikan dengan proses pencairan dan pelepasan investasi kekayaan dana pensiun
15	Pengalihan hak bekas karyawan ke DPLK atas pilihannya	Penyelesaian dilakukan di tahun 2024

Sedangkan tahapan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebagai tahapan penyelesaian proses Pengalihan Dana Pensiun DPPK ke DPLK dan Likuidasi Dana Pensiun ANTARA, antara lain:

No	Uraian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1	Pengalihan seluruh hak peserta aktif ke DPLK yang ditunjuk	Semester II tahun 2025
2	Proses audit laporan keuangan Dana Pensiun per tanggal penyelesaian likuidasi	Ditargetkan dimulai Agustus 2025
3	Penyusunan laporan penyelesaian likuidasi oleh tim likuidasi dan laporan hasil pengawasan oleh Dewan Pengawas	November 2025

4	Pengajuan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi ke OJK	Paling lambat diharapkan persetujuan OJK diterima Akhir Desember 2025
5	Pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) atas persetujuan OJK atas laporan penyelesaian likuidasi, keputusan OJK tentang Pembubaran dan ringkasan laporan penyelesaian likuidasi	Awal Januari 2026
6	Pengajuan pembatalan NPWP Dana Pensiun ke Kantor Pajak	Januari 2026

Pengalihan Dana Pensiun Perum LKBN Antara dari DPPK ke DPLK sekaligus likuidasi Dana Pensiun LKBN Antara sebagai bagian dari aksi korporasi Perusahaan berdampak pada keuangan Perusahaan yang tergambarkan melalui rasio-rasio sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2025	RKAP 2025
		(non Dapen)
EBITDA	61.024 M	61.024 M
Profit Margin	4,79%	7,71%
Asset Turnover	94,02%	96,94%
ROA	5,09%	7,95%
ROE	8,03%	12,92%
ROIC	8,82%	12,94%
ROIC-WACC	-0,55%	3,57%

5.4. Program Kegiatan bidang Teknologi: Rencana Strategis IT bidang AI dan Cyber Security

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) oleh perusahaan sudah diimplementasikan namun terbatas pada modul Newsroom dengan menggunakan Generative AI versi publik. Pemanfaatan AI diantaranya adalah untuk "Auto Generate Translate" keterangan foto (caption) dari bahasa Indoensia menjadi beberapa bahasa Internasional

Tahun 2025, ditargetkan penerapan Generative AI berlisensi yang disematkan di modul Newsroom dan telah menggunakan server Generated AI.

Peningkatan IT Security merupakan prrogram prioritas teknologi informasi di perusahaan dalam rangka mengamankan portal perusahaan dari serangan siber

Tahun 2025 akan dilakukan Penyediaan *Monitoring Tools* Perangkat dan Komponen TI, penetration testing jaringan dan aplikasi, penerapan *Hardening Endpoint Device*, Penerapan SIEM (*Security Information and Event Management*).

Unit Teknologi Informasi juga akan mendukung kinerja portal perusahaan, melalui dukungan Search Engine Optimizer (SEO) tools untuk monitoring tingkat keterbacaan portal *antaranews.com*. Optimalisasi SEO pada portal diharapkan akan berdampak pada upaya perusahaan untuk dapat melakukan monetasi dari konten-konten online, seperti monetasi Google AdSense.

*) Mengenai Program kerja bidang Teknologi Informasi, terlampir dalam Bab tersendiri.

5.5. Program Kerja Investasi Perusahaan

Perum LKBN ANTARA tidak memiliki Program Kerja untuk rencana investasi baik ke dalam Perusahaan maupun Penyertaan ke Perusahaan lain

Program Kerja bidang Pengadaan: Perencanaan Pengadaan



Rencana Pengadaan Perusahaan antara lain:

1. Pembangunan villa Antara (d/h Wisma Grafika) di Cisarua, Bogor, meliputi Pengadaan Konsultan Independen, Pengadaan Konsultan Perencana, Pengadaan Konsultan Pelaksana, Pengadaan Konsultan Pengawas dan Pengurusan Pembangunan
2. Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Pendukung berupa Alat kerja Operasional di Pusat dan Biro Provinsi, Pengadaan Sarana Prasarana (Laptop, Desktop, Kamera, Printer, dll) serta Pengadaan Furnitur
3. Perbaikan menyeluruh pada standar korporat di Kantor dan Rumah Dinas Biro Provinsi, meliputi standarisasi papan nama Kantor dan Rumah Dinas Biro Provinsi
4. Pembelian Lahan dan Pembangunan Biro Nusa Tenggara Barat
5. Renovasi Kantor dan Rumah Dinas Biro Provinsi sebagai upaya maintenance
6. Realisasi Renovasi Kantor dan Rumah Dinas Biro tahun 2024
7. Rencana Pengadaan pembaharuan mobil operasional biro
8. Dukungan pengadaan APD untuk program P2K3
9. Pembelanjaan CAPEX dan Kebutuhan Operasional Perusahaan melalui PadiUMKM sesuai arahan Kementerian BUMN

6. Rencana CAPEX dan Investasi Anorganik

Perum LKBN ANTARA pada RKAP 2025 tidak merencanakan Investasi Anorganik berupa akuisisi perusahaan, joint venture, maupun penyertaan modal ke anak perusahaan.

Capex New Project 2025

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Tujuan Proyek	Dampak	Total
1	Kendaraan Operasional Biro	peremajaan kendaraan dinas	mengoptimalkan proses bisnis	1.890
2	Pembangunan Wisma Grafika	Infrastruktur Pendukung MICE untuk kegiatan berbasis event dan layanan pendidikan	peningkatan pendapatan	10.000
3	Pengadaa AC Lantai 4 Wisma Antara B	peningkatan kapasitas peralatan perusahaan	mengoptimalkan proses bisnis	600
4	Pengadaan Desktop	peremajaan perangkat kerja pegawai	mengoptimalkan proses bisnis	750
5	Pengadaan Furniture	Inventaris	mengoptimalkan proses bisnis	1.000
6	Pengadaan Kamera	peremajaan perangkat kerja pegawai	mengoptimalkan proses bisnis	1.750
7	Pengadaan Laptop Pusat dan Daerah	peremajaan perangkat kerja pegawai	mengoptimalkan proses bisnis	1.629
8	Penerapan AI	Peningkatan kualitas operasional perusahaan untuk mengoptimalkan monetasi portal	peningkatan pendapatan	1.575
9	Peningkatan IT Security	peningkatan kapasitas operasional perusahaan untuk mengoptimalkan monetasi portal	cyber security zero beach	1.500
Grand Total				20.694

Capex Maintenance 2025

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Tujuan Proyek	Dampak	Total
1	Renovasi Kantor Biro	Peningkatan Kapasitas Gedung	mengoptimalkan proses bisnis	800
2	Renovasi Rumah Dinas Biro	Peningkatan Kapasitas Gedung	mengoptimalkan proses bisnis	1.600
3	Peremajaan Hardware & Software	peremajaan perangkat kerja pegawai, penyusunan capacity	mengoptimalkan proses bisnis	3.500

No	Keterangan	Tujuan Proyek	Dampak	Total
		plan, peremajaan lisensi software		
4	Jaringan dan Pengembangan Sistem lainnya	peremajaan perangkat kerja pegawai, penyusunan capacity plan, peremajaan lisensi software	mengoptimalkan proses bisnis	2.425
Grand Total				8.325

Capex Expansion 2025

(dalam juta rupiah)

No	Keterangan	Tujuan Proyek	Dampak	Total
1	Pembelian Lahan Kantor dan Rumah Dinas Biro NTB	infrastruktur pendukung kegiatan operasional perusahaan	mengoptimalkan proses bisnis	600
2	Pengadaan Papan Nama Biro Selindo	corporate branding/image	mengoptimalkan proses bisnis	1.120
3	Kantor Biro NTB	Peningkatan Kapasitas Gedung	mengoptimalkan proses bisnis	1.100
Grand Total				2.820

7. Rencana Kontribusi Perusahaan Kepada Negara

Sebagai Korporasi BUMN, kontribusi ANTARA kepada negara dilakukan melalui kontribusi pajak dengan proyeksi sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Parameter	Prognosa 2024	Target RKAP 2025
A, Pajak		
1, Pajak Penghasilan	39.603	43.437
2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	54.959	60.280
3, Bea Masuk/Keluar, Bea & Cukai, dan Bea Materai	0	0
4, PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)	0	0
5, Pajak Pemerintah Pusat Lainnya (misalnya Pajak Karbon)	0	0
6, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), termasuk PPB P2 (Perkotaan dan Pedesaan)	350	384
Total Kontribusi Pajak (Total A)	94.912	104.100

Parameter	Prognosa 2024	Target RKAP 2025
B, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1, Dividen	0	0
2, PNBP Lainnya	0	0
Total Kontribusi PNBP (Total B)	0	0
Total Kontribusi kepada Negara (Total A & B)	94.912	104.100

8. Kebijakan Perusahaan

8.1. Inisiatif Strategis Tahun 2025

Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, maka perusahaan menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam rencana kinerja korporasi dalam Key Performance Indicator (KPI) Korporat tahun 2025, sebagai berikut:

No	Inisiatif Strategis 2025	ESG	Usulan KPI 2025
1	Ekspansi yang <i>profitable</i>	C	EBITDA
2	Menciptakan <i>Economic Value Creation</i> dengan menurunkan Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)	C	Formula Rasio BOPO = $(\text{beban operasi} + \text{harga pokok penjualan}) / \text{penjualan bersih}$
3	Ekspansi yang <i>profitable</i>	C	Arus Kas Operasi (CFO)
4	Peningkatan Kualitas Berita untuk mencerdaskan bangsa	G	Jumlah produksi berita anti hoax
5	Peningkatan Kualitas Berita untuk mencerdaskan bangsa	C	Peningkatan performa portal <i>antaranews.com</i>
6	Peningkatan Kualitas Berita untuk mencerdaskan bangsa	C	Peningkatan performa sosial media milik ANTARA
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penugasan Pemerintah	S	Tingkat kelolosan Produksi PSO
8	Pengembangan Bisnis dan Layanan ke seluruh pelosok Nusantara	C	Pelaksanaan monetasi aset melalui layanan MICE (<i>meeting, incentive, conference, exhibition</i>)
9	Peningkatan Bisnis Baru	C	Penerapan <i>Global Rate Card (GRC)</i> untuk PT ANTARA ETP
10	Peningkatan keamanan siber perusahaan	C	Cyber Security Zero Breach Incident
11	Pemantapan Tata Kelola Perusahaan	G	Penerapan ERP berupa integrasi fungsi sistem informasi
12	Kesesuaian realisasi atas investasi yang dilakukan	C	Persentase Penyerapan Investasi
13	Mempersiapkan Talenta Perusahaan Berwawasan digital dan berdaya saing	S	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Top Talent Muda (≤ 42 tahun) dalam struktural perusahaan (BOD-1 s.d BOD-2) Rasio Perempuan dalam struktural perusahaan (BOD-1 s.d BOD-2)

BAB V

RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS

9. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/2023 tanggal Maret 2023 tentang Tata Kelola Signifikan Korporasi Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
2. Pasal 14 Ayat (11) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Pasal 57 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagai organ pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a. memiliki fungsi:
 - a. Manajemen Risiko;
 - b. Audit Intern; dan
 - c. Tata Kelola Terintegrasi.

Selain peraturan perundang-perundangan di atas, juga dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) tahun 2021, terdapat empat pilar governansi korporat Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA menyusun Rencana Kerja Dewan Pengawas. Rencana Kerja Dewan Pengawas ini sebagai panduan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP 2025.

10. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 3 Agustus 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-1/MBU/2023 tanggal Maret 2023 tentang Penugasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/2023 tanggal Maret 2023 tentang Tata Kelola Signifikan Korporasi Badan Usaha Milik Negara

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-3/MBU/2023 tanggal Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No: S-468/MBU/09/2024. Tanggal 30 September 2024 Perihal Aspirasi Pemegang Saham/Menteri untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025

11. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dewan Pengawas ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan standar dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengawas;
2. Mewujudkan hasil kerja yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*;
3. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

12. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum LKBN ANTARA No. SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan SK- 215/MBU/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, No. SK-29/MBU/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan SK-184/MBU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, dan No. SK-226/MBU/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 telah diangkat nama-nama Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Kemal Effendi Gani, sebagai Ketua Dewan Pengawas
2. Mayong Suryo Laksono, sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen
3. Monang Sinaga, sebagai Anggota Dewan Pengawas
4. Widodo Muktiyo sebagai Anggota Dewan Pengawas
5. Ariawan sebagai Anggota Dewan Pengawas
6. Virgandhi Prayudantoro sebagai Anggota Dewan Pengawas

13. Pembagian Tugas Dewan pengawas dan Komite Dewan Pengawas

1. Pembagian Tugas Dewan Pengawas
Dewan Pengawas telah melakukan pembagian tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Nomor : SKEP-05/DEWAS/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 Tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Pengawas.
2. Komite Audit
Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA Nomor: SKEP-04/DEWAS/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perum LKBN ANTARA, maka susunan Komite Audit sebagai berikut:
 - a. Monang Sinaga, sebagai Ketua Komite
 - b. Harsana, sebagai Anggota Komite

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA Nomor: SKEP-05/DEWAS/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perum LKBN ANTARA: Mayong Suryo Laksono, sebagai Ketua merangkap Anggota Komite

4. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA Nomor: SKEP-02/DEWAS/02/2023 tanggal 01 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perum LKBN ANTARA, maka susunan Komite Manajemen Risiko Perum LKBN sebagai berikut:

- a. Widodo Muktiyo, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
- b. Singgih Budihartono, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

14. Rencana Kerja Dewan Pengawas Tahun 2025

Berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham/Menteri, untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025, Rencana Kerja Dewan Pengawas tahun 2025 diarahkan untuk mengawasi dan memantau mulai penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban RKAP 2025 oleh Direksi Perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi fokus Rencana Kerja Dewan Pengawas pada tahun 2025 adalah melakukan pengecekan atas penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban RKAP 2025 yang didasarkan pada Aspirasi Pemegang Saham dengan hal-hal sebagai berikut:

Selain memperhatikan Aspirasi Pemegang Saham/Menteri utama, sebagaimana tersebut di atas, juga pada aspek *Enabler* sebagai berikut: Fungsi Keuangan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), Fungsi Teknologi dan Informasi (TI), Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lainnya.

1. Rencana Kerja Pengawasan atas Pelaksanaan Visi dan Misi Klaster Master Plan (2025-2029) dan Arah Taktis RKAP 2025.
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan Pemerintah dalam rangka diseminasi informasi publik, di dalam dan luar negeri, berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Teknis.
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas Rencana Kerja Perusahaan untuk dapat mengikuti perkembangan media digital melalui pemanfaatan semua platform media, *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* serta pengembangan talenta unggul berbasis digital.
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas Rencana Kerja Optimalisasi bisnis komersial untuk mewujudkan perusahaan yang sehat dan bertumbuh.
 - d. Melakukan pengawasan atas kinerja keuangan khususnya perbaikan model bisnis guna menurunkan jumlah piutang tak tertagih perusahaan;

- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) Prioritas
 - f. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas realisasi rencana kerja pada Aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) - termasuk Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL.
2. Rencana Kerja atas Fungsi Dewan Pengawas dan Fungsi *Enabler* yang tercantum dalam Aspirasi Pemegang Saham.
- a. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern dan Fungsi *Enabler* Keuangan pada Aspirasi Pemegang Saham, Dewan Pengawas melalui Komite Audit melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan dan pengawasan atas realisasi Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Keuangan pada aspek *Profitable Expansion, Economic Value Creation, Sustainable Financial Position*.
 - 2) Pengawasan atas rekomendasi perbaikan tata kelola dana *Public Services Obligation* (PSO) dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Digital.
 - 3) Pengawasan atas rekomendasi Konsultan *Change Management* sebagai salah satu tindak lanjut dari Efisiensi dan Penataan Harga Pokok Produksi baik di Bidang *Public Service Obligation* (PSO) dan Bidang Komersial.
 - 4) Melakukan pengawasan atas strategi dan upaya efisiensi di segala lini bisnis yang telah ditetapkan dalam RKAP 2025.
 - 5) Melakukan pengawasan atas Aksi Korporasi Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun yang menggunakan sumber dana dari perusahaan. Sebagaimana persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-603/PD.12/2024.
 - 6) Memastikan bahwa SPI telah menjalankan fungsi Audit Intern, baik untuk LKBN ANTARA maupun PT Antara ETP (Anak Perusahaan).
 - 7) Memberikan persetujuan atas revisi piagam Audit Intern (*internal audit charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI.
 - 8) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI.
 - 9) Menunjuk Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan (berdasarkan evaluasi komite audit) dan berdasarkan Pasal 78; PER-2/MBU/2023 tanggal Maret 2023 tentang Tata Kelola Signifikan Korporasi Badan Usaha Milik Negara.
 - 10) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*).
 - 11) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri seperti
 - 12) Memastikan Laporan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 selesai tepat waktu dan dapat diunggah melalui sistem Informasi Manajemen K-BUMN pada 15 April 2025 dan melakukan *Audit Upon Procedure* (AUP) atas paket Informasi Laporan Audit.
 - 13) Menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Pemantauan dan pengawasan atas Tindak lanjut rekomendasi Konsultan Independen *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR).
 - b) Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas

Management Letter dari Kantor Akuntan Publik.

- c) Pemantauan dan pengawasan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Asesmen *Good Corporate Governance* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - d) Pemantauan dan pengawasan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Asesmen *Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX)* dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi Konsultan *Change Management* sebagai salah satu tindak lanjut dari Efisiensi dan Penataan Harga Pokok Produksi baik Bidang *Public Service Obligation (PSO)* maupun Bidang Komersial.
 - e) Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Audit Badan Pengawasan dan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
- b. Dalam pelaksanaan Fungsi *Enabler* - Manajemen Sumber Daya Manusia, Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemantauan atas Tindak lanjut rekomendasi Konsultan Independen Sumber Daya Manusia, berkenaan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Perusahaan.
 - 2) Pemantauan dan pengawasan atas Rencana Kerja Penguatan *Talenta*.
 - 3) Pemantauan dan pengawasan atas penguatan Budaya AKHLAK sebagai *core value*.
 - 4) Pemantauan dan pengawasan atas penerapan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*).
 - 5) Pemantauan dan pengawasan atas produktivitas tenaga kerja (*employee productivity*).
 - 6) Pemantauan dan pengawasan atas Rencana Kerja Peningkatan Jumlah *Digital Talent*.
 - 7) Pemantauan dan pengawasan atas *Employee Wellbeing Program*.
 - 8) Pemantauan atas Rekomendasi Konsultan *Change Management* sebagai salah satu tindak lanjut dari Efisiensi dan Penataan Harga Pokok Produksi baik Bidang *Public Service Obligation (PSO)* maupun Bidang Komersial terutama berkenaan dengan dampak perubahan remunerasi.
 - 9) Pemantauan atas Kemajuan Pelaksanaan Tindak Lanjut Likuidasi Dana Pensiun Perum LKBN Antara.
- c. Dalam pelaksanaan Fungsi *Enabler* - Manajemen Risiko, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Risiko akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pengawasan atas Penyusunan RKAP 2025 berbasis risiko.
 - 2) Pengawasan atas penetapan *risk profile 2025*.
 - 3) Penetapan *Risk Appetite* oleh Dewan Pengawas.
- d. Pemantauan atas penetapan Risiko Utama (*Top Risk*).
- 1) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pada Laporan Manajemen Risiko setiap Triwulan.
 - 2) Evaluasi kebijakan serta strategi Manajemen Risiko pada Laporan Manajemen setiap Triwulan.
 - 3) Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

Menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Pemantauan dan pengawasan atas Tindak lanjut rekomendasi Konsultan Independen *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR).
 - b) Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas *Management Letter* dari Kantor Akuntan Publik.
 - c) Pemantauan dan pengawasan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Asesmen *Good Corporate Governance* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - d) Pemantauan dan pengawasan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Asesmen *Indonesian Corporate Accountability Index* (ICORPAX) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - e) Pengawasan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil Asesmen *Risk Maturity Index* (RMI).
- e. Pemantauan dan pengawasan atas keterkaitan dan kesesuaian manajemen risiko perusahaan dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) pada bagian Misi Arah Tujuan Pembangunan Nasional (2025-2045).
- f. Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi Konsultan *Change Management* sebagai salah satu tindak lanjut dari Efisiensi dan Penataan Harga Pokok Produksi baik Bidang *Public Service Obligation* (PSO) maupun Bidang Komersial.
- g. Dalam pelaksanaan Fungsi *Enabler* – Teknologi Informasi, Dewan Pengawas akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemantauan dan pengawasan atas peran Divisi Teknologi Informasi atas perannya terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital.
 - 2) Pemantauan dan pengawasan atas realisasi pelaksanaan peta jalan (*roadmap*) dan pembiayaan Divisi Teknologi Informasi pada 2025.
 - 3) Pemantauan dan pengawasan atas tindak lanjut penyelesaian data piutang dari sisi – Divisi Teknologi Informasi khususnya pada aplikasi - Accounting Information System (AIS Ver2).
 - 4) Pemantauan dan pengawasan atas rencana pengamanan siber (melalui *Cyber Security* ISO 27001).
 - 5) Pemantauan dan pengawasan atas Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas *Management Letter* dari Kantor Akuntan Publik -khususnya pada aspek Teknologi Informasi.
 - 6) Pemantauan dan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi Konsultan Independen *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR) khususnya di bidang Teknologi Informasi.
 - 7) Pemantauan dan pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan Audit Pelaksanaan Teknologi Informasi oleh pihak Independen.
- h. Dalam pelaksanaan Fungsi *Enabler* – Peraturan Perundang-undangan, Dewan Pengawas akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemantauan dan pengawasan atas Pelaporan dan Tindak Lanjut temuan.
 - 2) Pemantauan dan pengawasan atas Peningkatan Kompetensi Insan Hukum, Peningkatan Fungsi Hukum dan Penyelesaian penanganan masalah-masalah hukum.

- 3) Pemantauan dan pengawasan atas percepatan Sertifikasi Tanah dan Bangunan dan Audit Daftar Aset.
 - 4) Pemantauan dan pengawasan atas Penyesuaian Prosedur Operasional Standar (SOP) dengan Per -1/MBU/03/2023 dan Per -2/MBU/03/2023.
 - 5) Pemantauan dan pengawasan atas Rencana Kerja *Review* Perjanjian-Perjanjian dan standarisasi dokumen perjanjian.
- i. Dalam pelaksanaan Fungsi *Enabler* – Lainnya, Dewan Pengawas akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemantauan dan pengawasan atas Keterbukaan Informasi Publik termasuk pembuatan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan juga terkait dengan hasil evaluasi dari Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat.
 - 2) Pemantauan dan pengawasan atas rencana memaksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

15. Metode Pelaksanaan Pengawasan

Adapun metode pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Gabungan, Dewan Pengawas dan Direksi.
2. Melaksanakan Rapat Internal Dewan Pengawas.
3. Melaksanakan Rapat Khusus Pembahasan Hal-Hal yang Sangat Penting.
4. Rapat Pembahasan Rancangan RKAP Tahun 2026.
5. Menyampaikan Surat kepada Direksi.
6. Menyampaikan Surat/Laporan Tanggapan kepada Menteri dan pihak terkait.
7. Evaluasi Rencana Kerja Pengawasan Tahunan Divisi SPI.
8. Evaluasi Kinerja Audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.
9. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Perusahaan di tingkat biro-biro daerah.

16. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi Ketentuan dalam Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023, Tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Seminar/*workshop*/pelatihan yang akan dilaksanakan dan diikuti Dewan Pengawas dan Komite selama tahun 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui parameter jam pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan bidang-bidang tugas dan jenis materi pelatihan dan sertifikasi yang telah ditetapkan sebagaimana petunjuk teknis tersebut.

17. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola Signifikan Korporasi Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 17. Dewan Pengawas melakukan evaluasi efektivitas dewan, komite, setiap individu Dewan Pengawas dan hasil evaluasi disampaikan kepada kepada RUPS/Menteri.

18. Aspek Pelaporan

Dewan Pengawas memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2024 kepada RUPS/Menteri.

BAB VI ANGGARAN PERUSAHAAN

1. Gambaran Umum Laba/Rugi Usaha

Catatan terpenting pada kinerja laba rugi perusahaan pada tahun 2025 adalah kenaikan laba sebesar 87% dari prognosa tahun 2024. Kenaikan tersebut sejalan dengan rencana perusahaan pada RJPP 2025-2030 untuk mencapai omset Rp 1 Triliun.

Kontribusi kenaikan pendapatan terbesar berasal dari:

- a. Divisi Layanan Data dengan kenaikan sebesar 14% dari prognosa 2024 atau Rp 27,47 Miliar
- b. Divisi Layanan Media dan Komunikasi dengan kenaikan sebesar 35% dari prognosa 2024 atau Rp 21,95 Miliar

2. Anggaran Pendapatan Usaha

Sub-bab ini merupakan gambaran terhadap target pendapatan untuk setiap unit usaha *profit center* perusahaan dengan detail sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH					KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RJPP 2025	RKAP 2025	RKAP 2025 (Non Dapen)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7 = 5-3	7
PENDAPATAN PSO	172.001	176.147	183.774	184.514	184.513	8.367	0,05
PENDAPATAN KOMERSIL	289.586	284.254	345.730	345.730	345.739	61.475	0,22
Divisi Layanan Data	190.614	195.865	232.982	223.338	222.338	27.473	0,14
Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	75.201	62.016	79.446	83.962	83.962	21.946	0,35
Biro Daerah	23.772	26.373	33.300	38.430	38.430	12.057	0,46
PENDAPATAN PT AETP	15.394	16.909	18.058	17.755	17.555	845	0,05
TOTAL	476.981	477.310	547.562	547.998	547.998	70.688	0,15

Tabel 5. 1. Anggaran pendapatan 2025

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN PSO	172.001	176.147	184.514	8.367	0,05
PENDAPATAN KOMERSIL	289.586	284.254	345.730	61.475	0,22
DIVISI LAYANAN DATA	190.614	195.865	223.338	27.473	0,14
Dept. Kerjasama Operasi Reuters	15.813	176.211	201.113	24.901	0,14
Dept. Kerjasama Operasi Bloomberg	172.066	16.432	18.426	1.995	0,12

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Dept. Layanan Analisa Dan Informasi	2.735	3.222	3.799	577	0,18
DIVISI LAYANAN MEDIA DAN KOMUNIKASI	75.201	62.016	83.962	21.946	0,35
Dept. Kerjasama Konten	46.965	29.882	35.899	6.017	0,20
Dept. Layanan Komunikasi Strategis	26.383	28.834	41.934	13.100	0,45
Dept. Lembaga Pendidikan Antara	1.852	3.300	6.128	2.829	0,86
BIRO DAERAH	23.772	26.373	38.430	12.057	0,46
Biro Maluku	195	216	315	99	0,46
Biro Nangroe Aceh Darusalam	615	682	994	312	0,46
Biro Lampung	389	432	629	197	0,46
Biro Jawa Barat	1.386	1.538	2.241	703	0,46
Biro Bangka Belitung	788	875	1.274	400	0,46
Biro Kalimantan Selatan	2.160	2.397	3.492	1.096	0,46
Biro Kepulauan Riau	315	350	510	160	0,46
Biro Bengkulu	151	168	245	77	0,46
Biro Bali	579	643	937	294	0,46
Biro Gorontalo	226	250	365	114	0,46
Biro Jambi	471	523	762	239	0,46
Biro Papua	349	387	564	177	0,46
Biro Sulawesi Tenggara	357	396	577	181	0,46
Biro Nusa Tenggara Timur	137	152	221	69	0,46
Biro Sulawesi Selatan	442	490	714	224	0,46
Biro Sulawesi Utara	187	207	302	95	0,46
Biro Nusa Tenggara Barat	628	697	1.016	319	0,46
Biro Sumatera Utara	539	598	871	273	0,46
Biro Sumatera Barat	669	743	1.082	340	0,46
Biro Kalimantan Tengah	3.025	3.355	4.890	1.534	0,46
Biro Sumatera Selatan	419	465	678	213	0,46
Biro Sulawesi Tengah	279	310	451	142	0,46
Biro Riau	729	809	1.179	370	0,46
Biro Kalimantan Barat	485	538	784	246	0,46
Biro Kalimantan Timur	1.089	1.208	1.761	552	0,46
Biro Jawa Tengah	1.121	1.244	1.813	569	0,46
Biro Jawa Timur	4.342	4.817	7.019	2.202	0,46
Biro Maluku Utara	1	1	1	0	0,46
Biro Yogyakarta	122	135	197	62	0,46
Biro Penyangga Jakarta	935	1.038	1.512	474	0,46
Biro Banten	310	344	501	157	0,46
Biro Luar Negeri	0	0	0	0	0,46
Biro Kalimantan Utara	240	266	388	122	0,46

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Biro Papua Barat	90	99	145	45	0,46
PT AETP	15.394	16.909	17.755	845	0,05
TOTAL	476.981	477.310	547.998	70.688	0,15

Tabel 5. 2. Rincian Anggaran Pendapatan 2025

3. Anggaran Biaya Usaha

A. Berdasarkan Akun

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
BEBAN POKOK USAHA	326.466,15	323.952,48	365.659,30	41.706,82	0,13
Hpp Pso Pihak Ke-3	14.916,66	14.994,43	15.744,15	749,72	0,05
Hpp Pso Rapat	3.478,71	2.388,59	3.010,45	621,87	0,26
Hpp Pso Distribusi	52.188,23	57.787,94	70.499,45	12.711,52	0,22
Hpp Komersil Pihak Ke-3	156.544,98	161.579,75	187.388,29	25.808,54	0,16
Hpp Imq Sdm	12.248,90	13.527,36	14.203,73	676,37	0,05
Gaji	43.887,79	40.448,05	41.904,33	1.456,27	0,04
Incentif	4.792,70	5.600,48	5.824,50	224,02	0,04
Tunjangan Tetap	31.939,49	18.909,62	19.584,48	674,86	0,04
Lembur	58,61	18,40	19,14	0,74	0,04
Internet	4.129,26	4.065,43	4.228,05	162,62	0,04
Konsultan	2.280,82	4.632,43	3.252,73	(1.379,70)	(0,30)
BEBAN PENJUALAN	136,86	369,84	384,63	14,79	0,04
Jamuan	--	2,89	3,00	0,12	0,04
Promosi Penjualan	136,86	366,95	381,63	14,68	0,04
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	112.934,60	124.669,33	133.181,70	8.512,37	0,07
Bonus	5.122,44	12.091,61	12.575,27	483,66	0,04
Thr	6.979,46	7.197,18	7.485,06	287,89	0,04
Asuransi	7.663,10	7.122,61	7.407,52	284,90	0,04
Pensiun	12.182,42	5.409,88	5.626,28	216,40	0,04
Penghargaan Karyawan	1.360,77	1.066,28	1.108,93	42,65	0,04
Pesangon	105,93	25,54	4.000,00	3.974,46	155,64
Pelatihan	1.824,14	3.108,28	3.232,61	124,33	0,04
Ibo	677,77	1.014,77	1.055,36	40,59	0,04
Rekrutasi	144,50	1,07	1,11	0,04	0,04
Promosi	732,92	220,83	229,66	8,83	0,04
Outbound	1.412,18	2.433,96	1.831,32	(602,64)	(0,25)
Gaji - Outsource	6.922,17	7.456,05	7.754,29	298,24	0,04

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Tunjangan Tidak Tetap	22.501,88	38.129,52	41.632,75	3.503,24	0,09
Atk	657,27	418,25	434,98	16,73	0,04
Listrik	1.384,32	1.497,11	1.556,99	59,88	0,04
Telepon	74,56	53,90	56,06	2,16	0,04
Sewa Gedung	3.329,65	1.300,30	1.352,31	52,01	0,04
Sewa Alat Kerja	708,22	1.903,68	1.979,82	76,15	0,04
Perawatan Alat Kerja	3.068,18	790,43	822,05	31,62	0,04
Air	131,23	98,92	102,88	3,96	0,04
Rtk	1.403,92	1.189,03	1.236,59	47,56	0,04
Keanggotaan	175,44	41,15	42,80	1,65	0,04
Rapat	2.928,16	1.913,51	2.171,63	258,13	0,13
Buku	108,03	115,65	120,28	4,63	0,04
Kontribusi Lingkungan	1.270,33	978,61	1.065,75	87,14	0,09
Materai	40,50	78,98	82,14	3,16	0,04
Sppd Non Project	4.888,32	3.203,75	2.595,08	(608,67)	(0,19)
Transportasi Umum	3.759,39	988,59	1.028,14	39,54	0,04
Pengiriman	300,72	391,72	407,39	15,67	0,04
Operasional Kendaraan	--	1.080,52	1.123,74	43,22	0,04
Depresiasi	--	8.118,53	8.443,28	324,74	0,04
Amortisasi	10.158,99	733,85	763,20	29,35	0,04
Biaya Penyusutan Aset Hak Guna	2.364,13	1.921,96	1.998,84	76,88	0,04
Bad Debt Pendapatan	6.400,00	7.036,81	7.599,61	562,80	0,08
Beban Pph. Ps. 21	1.465,20	2.617,99	2.722,71	104,72	0,04
Beban Pph. Ps. 22	--	6,77	7,04	0,27	0,04
Beban Pph. Ps. 23	4,31	85,27	88,68	3,41	0,04
Beban Ppn	15,16	207,87	216,18	8,31	0,04
Pajak Daerah Dan Pajak Lainnya	545,07	2.585,58	1.189,00	(1.396,58)	(0,54)
Pnbp (Pendapatan Negara Bukan Pajak)	2,55	23,09	24,02	0,92	0,04
Beban Pph. Ps. 4(2)	121,26	9,95	10,34	0,40	0,04
TOTAL	439.538	448.992	499.226	50.234	0,11

Tabel 5.4. Anggaran Biaya Usaha 2025

Jika dilihat pada tabel diatas, diketahui bahwa kenaikan signifikan pada Beban Umum dan Administrasi RKAP 2025 akibat kenaikan beban pesangon sebesar Rp 4M. Kenaikan tersebut didasari oleh rencana perusahaan untuk melakukan pensiun dini (GSH) pada 2025.

Beban Usaha tahun 2025 berbeda dengan detail beban dalam buku RJPP 2025-2029 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN pada bulan November 2024 dikarenakan adanya perubahan pemetaan akun-akun (remapping) di Internal Perusahaan sebagai bagian dari tindak lanjut pemenuhan gap ICoFR.

B. Berdasarkan Unit*(dalam juta rupiah)*

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Direktorat Pemberitaan	61.982	58.914	60.420	1.506	0,03
Koordinator Biro Dan Pso	63.624	61.388	74.770	13.382	0,22
Kurator	731	864	899	35	0,04
Divisi Layanan Data	565	921	957	37	0,04
Dept. Kerjasama Operasi Bloomberg	128.066	126.683	144.248	17.564	0,14
Dept. Kerjasama Operasi Reuters	9.899	8.363	9.099	736	0,09
Dept. Layanan Analisa Dan Informasi	2.674	3.468	3.237	(231)	(0,07)
Divisi Layanan Media Dan Komunikasi	1.280	647	673	26	0,04
Dept. Kerjasama Konten	8.444	6.280	5.556	(724)	(0,12)
Dept. Layanan Komunikasi Strategis	26.772	11.779	13.738	1.958	0,17
Dept. Lembaga Pendidikan Antara	2.287	3.831	5.161	1.330	0,35
Dept. Pendukung Bisnis	--	1.166	1.212	47	0,04
Biro Maluku	734	836	908	72	0,09
Biro Nangroe Aceh Darusalam	1.344	1.473	1.653	180	0,12
Biro Lampung	1.327	1.535	1.673	138	0,09
Biro Jawa Barat	2.778	2.793	3.178	385	0,14
Biro Bangka Belitung	1.363	1.521	1.737	216	0,14
Biro Kalimantan Selatan	2.255	2.882	3.422	541	0,19
Biro Kepulauan Riau	827	1.134	1.242	107	0,09
Biro Bengkulu	778	877	942	65	0,07
Biro Bali	1.475	1.742	1.925	184	0,11
Biro Gorontalo	627	715	789	73	0,10
Biro Jambi	985	1.181	1.321	140	0,12
Biro Papua	1.157	1.315	1.436	121	0,09
Biro Sulawesi Tenggara	966	1.080	1.193	113	0,11
Biro Nusa Tenggara Timur	902	920	984	64	0,07
Biro Sulawesi Selatan	1.925	2.299	2.478	179	0,08
Biro Sulawesi Utara	893	955	1.030	75	0,08
Biro Nusa Tenggara Barat	1.582	1.663	1.853	190	0,11
Biro Sumatera Utara	1.806	1.872	2.053	181	0,10
Biro Sumatera Barat	1.807	2.069	2.284	215	0,10
Biro Kalimantan Tengah	2.710	3.295	4.023	727	0,22
Biro Sumatera Selatan	1.088	1.217	1.348	131	0,11
Biro Sulawesi Tengah	731	898	989	91	0,10
Biro Riau	1.276	1.568	1.774	206	0,13
Biro Kalimantan Barat	1.120	1.179	1.321	143	0,12
Biro Kalimantan Timur	1.290	1.678	1.960	282	0,17
Biro Jawa Tengah	3.779	4.063	4.446	383	0,09
Biro Jawa Timur	5.086	6.128	7.228	1.100	0,18

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Biro Maluku Utara	205	243	253	10	0,04
Biro Yogyakarta	1.465	1.494	1.578	84	0,06
Biro Penyangga Jakarta	1.564	1.974	2.237	263	0,13
Biro Banten	1.472	1.793	1.926	133	0,07
Biro Luar Negeri	1.257	1.088	1.132	44	0,04
Biro Kalimantan Utara	690	876	958	82	0,09
Biro Papua Barat	567	647	691	44	0,07
Dewan Pengawas	4.288	2.440	2.982	542	0,22
Komite Audit	511	273	283	11	0,04
Direksi	15.574	5.394	5.610	216	0,04
Sekretariat Perusahaan	2.593	3.441	2.878	(562)	(0,16)
Dept. Hukum Dan Administrasi	1.275	1.647	1.712	66	0,04
Dept. Tjsl Dan Komunikasi Perusahaan	1.850	1.770	1.889	119	0,07
Satuan Pengawasan Internal	527	744	773	30	0,04
Dept. Audit Keuangan Dan Operasional	294	589	612	24	0,04
Dept. Gcg Dan Penugasan Khusus	738	692	720	28	0,04
Divisi Manajemen Strategis	581	526	547	21	0,04
Dept. Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja	654	823	855	33	0,04
Dept. Pengelolaan Data Dan Inovasi	1.613	1.434	1.492	57	0,04
Divisi Msdm	2.172	683	711	27	0,04
Dept. Manajemen Sdm	39.087	23.256	28.447	5.191	0,22
Dept. Pengembangan Sdm	2.453	4.143	4.309	166	0,04
Divisi Teknologi Informasi	592	603	627	24	0,04
Dept. Perencanaan Dan Tata Kelola Ti	--	603	627	24	0,04
Dept. Pengembangan Ti	1.091	960	999	38	0,04
Dept. Operasional Ti	4.970	4.425	4.602	177	0,04
Divisi Keuangan	577	684	712	27	0,04
Dept. Anggaran, Akuntansi Dan Pelaporan	(34.152)	11.283	14.664	3.381	0,30
Dept. Treasury, Piutang Dan Perpajakan	1.602	5.535	4.256	(1.279)	(0,23)
Dept. Manajemen Risiko	--	1.284	735	(549)	(0,43)
Divisi Umum Dan Aset	--	473	492	19	0,04
Dept. Umum	22.241	18.714	17.746	(968)	(0,05)
Dept. Pengadaan Dan Manajemen Aset	--	1.736	1.805	69	0,04
Pt Aetp	12.249	13.527	14.204	676	0,05
TOTAL	439.538	448.992	499.226	50.234	0,11

4. Laba Bruto Persegmentasi Komersil

A. Divisi Layanan Data

a. Departemen Kerjasama Operasional Bloomberg

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	172.066	176.211	201.112	24.091	0,14
Beban Pokok Usaha	126.537	125.362	142.873	17.511	0,14
Laba Bruto	45.529	50.848	58.239	7.389	0,15

b. Departemen Kerjasama Operasional Reuters

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	15.813	16.431	18.426	1.995	0,12
Beban Pokok Usaha	8.822	6.831	7.505	674	0,10
Laba Bruto	6.990	9.600	10.920	1.320	0,14

c. Departemen Layanan Analisa dan Informasi

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	2.734	3.222	3.799	576	0,18
Beban Pokok Usaha	2.538	3.079	2.832	(246)	(0,08)
Laba Bruto	197	142	966	823	5,77

B. Divisi Layanan Media dan Komunikasi

a. Departemen Kerjasama Konten

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	40.179	29.882	35.899	6.017	0,20
Beban Pokok Usaha	8.064	5.818	5.075	(742)	(0,13)
Laba Bruto	32.115	24.064	30.823	6.759	0,28

b. Departemen Layanan Komunikasi Strategis

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	33.169	28.834	41.934	13.100	0,45
Beban Pokok Usaha	25.621	10.699	12.614	1.915	0,18
Laba Bruto	7.547	18.134	29.319	11.184	0,62

c. Departemen Layanan Pendidikan Antara

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	1.852	3.299	6.128	2.828	0,86
Beban Pokok Usaha	1.958	2.997	4.293	1.297	0,43
Laba Bruto	(105)	303	1.835	1.532	5,06

d. Biro Provinsi

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Usaha	22.772	26.372	38.429	12.057	0,46
Beban Pokok Usaha	12.389	15.824	21.136	5.312	0,34
Laba Bruto	11.383	10.549	17.293	6.733	0,64

5. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Pendapatan Bunga Bank	875	444	462	18	0,04
Pendapatan Lainnya	1.483	12.381	9.877	(2.505)	(0,20)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan	4	(125)	(130)	(5)	0,04
Pendapatan Bunga Deposito	678	1.080	1.111	32	0,03

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
(Pendapatan)/Biaya Selisih Kurs	(232)	5	5	0	0,04
Keuntungan Penjualan Aset	--	--	--	--	
Pendapatan Cadangan Pemulihan Piutang	--	--	--	--	
TOTAL	2.807	13.785	11.325	(2.460)	(0,18)

Tabel 5.1 Anggaran Pendapatan Lainnya 2025

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Administrasi Bank	734	1.037	1.078	41	0,04
Bunga Pinjaman	2.382	5.395	8.093	2.698	0,50
Beban Lainnya	468	16.631	17.296	665	0,04
Beban Bunga Psak 73	316	--	--	--	
Biaya Kerugian Aset	108	--	--	--	
TOTAL	4.007	23.063	26.468	3.405	0,15

Tabel 5.2 Anggaran Biaya Lainnya 2025

6. Anggaran Investasi dan Pengembangan

Rencana investasi perusahaan pada tahun 2024 telah dijelaskan pada bab tentang strategi,

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Prognosa 2024
1	Pembangunan komplek ANTARA Pasar Baru	52,500
2	Renovasi Wisma ANTARA-B (Ex-PANN)	27,620
3	Pengadaan Meubelair di Wisma ANTARA-B	791
4	Renovasi Bangunan & Prasarana Biro lainnya	260
5	Peralatan kantor	4,000
6	Pembelian Tanah dan Bangunan PNRI	4,493
	TOTAL	89,664

Tabel 5.7. Prognosa investasi tahun 2024

Ketidaktercapaian CAPEX pada tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Baru diterimanya perizinan dalam melakukan renovasi Komplek Antara Pasar Baru, sehingga realisasi renovasi Komplek Antara Pasar Baru pada Desember 2023 baru mencapai 70% dan diperkirakan akan selesai pada April 2024.
- 2) Renovasi aset Cisarua belum dapat dilakukan dikarenakan baru dilakukan AJB pada 27 Juli 2023.
- 3) Pembelian aset tanah dan bangunan milik PNRI di Ambon belum dapat direalisasikan karena terdapat kenaikan NJOP yang signifikan.
- 4) Aset tanah atas hibah di Kaltara pada 2023 baru dilakukan *land clearing*.
- 5) Kendaraan belum dilakukan realisasi dikarenakan belum tersedianya tempat untuk parkir kendaraan, Pada 2024 baru akan dilakukan renovasi atas kantin dan parkir di Wisma Antara B.

Nilai CAPEX pada 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Kategori	Keterangan	Total
Gedung	Pembangunan Wisma Grafika	10.000
	Renovasi Kantor Biro	1.900
	Renovasi Rumah Dinas Biro	1.600
Gedung Total		13.500
Inventaris dan Peralatan	Pengadaa AC Lantai 4 Wisma Antara B	600
	Pengadaan Desktop	750
	Pengadaan Furniture	1.000
	Pengadaan Kamera	1.750
	Pengadaan Laptop Pusat dan Daerah	1.629
	Pengadaan Papan Nama Biro Selindo	1.120
	Penerapan AI	1.575
	Peningkatan IT Security	1.500
	Peremajaan Hardware & Software	3.500
	Jaringan dan Pengembangan Sistem lainnya	2.425
Inventaris dan Peralatan Total		15.849
Kendaraan	Kendaraan Operasional Biro	1.890
Tanah	Pembelian Lahan Kantor dan Rumah Dinas Biro NTB	600
Grand Total		31.839

Tabel 5.3 Rencana Investasi dan Pengembangan 2025

Nilai CAPEX pada tahun 2025 berbeda dibanding dengan nilai CAPEX yang ditampilkan dalam buku RJPP 2025 sebagai akibat dari perubahan kebijakan penguatan teknologi informasi perusahaan.

7. Anggaran Penelitian dan Pengembangan

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	Prognosa 2024	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
18 komponen Biaya SDM	141.523	143.165	153.900	10.735	0,07
18 komponen Biaya SDM dikurangi Pelatihan, Diklat dan Pengembangan dan IBO	137.609	136.608	147.781	11.173	0,08
Biaya RnD	3.914	6.557	6.119	(438)	(0,07)
% Biaya RnD	3%	5%	4%	-1%	-14%
Rincian Biaya RnD					
a. Biaya Pelatihan	1.824	3.108	3.233	124	0,04
b. Biaya Outbound	1.412	2.434	1.831	(603)	(0,25)
c. Biaya IBO	678	1.015	1.055	41	0,04
Jumlah Biaya RnD	3.914	6.557	6.119	(438)	(0,07)

Tabel 5.11. Anggaran Penelitian dan Pengembangan 2025

8. Anggaran Sumber Daya Manusia

(dalam juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Gaji	43.888	40.448	41.904	1.456	0,04
Incentif	4.793	5.600	5.824	224	0,04
Bonus	3.234	10.172	10.463	291	0,02
Tantiem	1.887	1.920	2.112	192	0,10
Thr	6.979	7.197	7.485	288	0,04
Tunjangan Tetap	31.939	18.910	19.584	675	0,04
Asuransi	7.663	7.123	7.408	285	0,04
Lembur	59	18	19	1	0,04
Pensiun	12.182	5.410	5.626	216	0,04
Penghargaan Karyawan	1.361	1.066	1.109	43	0,04

Pesangon	106	26	4.000	3.974	155,64
Pelatihan	1.824	3.108	3.233	124	0,04
Diklat dan Pengembangan	1.412	2.434	1.831	(603)	(0,25)
Ibo	678	1.015	1.055	41	0,04
Rekrutasi	144	1	1	0	0,04
Promosi	870	588	611	24	0,04
Tunjangan Tidak Tetap	22.502	38.130	41.633	3.503	0,09
TOTAL	141.523	143.165	153.900	10.735	0,07

Tabel 5. 4 Anggaran Sumber Daya Manusia 2025

Perusahaan menganggarkan Penghasilan/Remunerasi Tahun 2025 termasuk tantiem / insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

9. Anggaran Teknologi Informasi

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	CAPEX/OPEX	Estimasi Investasi (Rp)
1.	Pengembangan Sistem Pelanggan (OPEX)	OPEX	200
2.	Software as a Service (SaaS) (OPEX)	OPEX	500
3.	Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) CAPEX	CAPEX	1.575
4.	Optimalisasi Enterprise Resources Planning (ERP) (OPEX)	OPEX	500
5.	Peningkatan IT Security (CAPEX)	CAPEX	1.500
6.	Peningkatan Jaringan TI (CAPEX)	CAPEX	2.425
7.	Peremajaan Hardware & Software TI (CAPEX)	CAPEX	3.500
TOTAL			10.200

Tabel 5.10. Anggaran Teknologi Informasi 2025

BAB VII PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan

1.1. Proyeksi Neraca

(dalam juta Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH					KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RJPP 2025	RKAP 2025	RKAP 2025 (Non Dapen)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 3	8
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan Setara Kas	86.005	90.045	107.660	103.259	119.259	13.214	0,15
Piutang Usaha	116.797	114.249	61.474	107.229	107.229	(7.021)	(0,06)
Piutang Lain-lain	1.094	964	972	1.013	1.012	48	0,05
Pajak Dibayar di Muka	6.818	8.432	10.807	8.854	8.854	422	0,05
Beban Dibayar di Muka	1.055	2.529	2.701	2.655	2.655	126	0,05
Uang Muka Kerja	3.058	3.184	3.326	3.344	3.344	159	0,05
Total Aset Lancar	214.827	219.404	186.941	226.353	242.353	6.949	0,03
ASET TIDAK LANCAR							
Aset Pajak Tangguhan	30.882	30.264	31.384	25.725	25.725	(4.540)	(0,15)
Investasi pada Entitas Asosiasi						-	
Aset Hak Guna	4.804	2.822	4.666	2.963	2.963	141	0,05
Aset Tetap	179.278	231.690	236.77	255.086	255.086	23.396	0,10
Uang Jaminan	445	334	904	350	350	17	0,05
	2.551	4.535	15.475	4.762	4.762	227	0,05
Aset Tidak Lancar Lainnya							
Total Aset Tidak Lancar	217.960	269.644	289.203	288.885	288.885	19.241	0,07
JUMLAH ASET	432.788	489.048	476.145	515.238	531.238	26.190	0,05
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha	14.321	18.750	13.869	19.313	19.312	563	0,03
Utang lain-lain	19.829	4.761	12.739	4.451	4.451	(310)	(0,07)
Utang Pajak	5.957	5.327	5.294	5.546	5.546	220	0,04
Utang Dana Pensiun	1.174	-	-	-	-	-	
Beban Akruwal	11.071	7.568	12.676	8.048	8.048	479	0,06
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	
Pinjaman Bank	7.002	33.886	11.020	25.385	25.384	(8.501)	(0,25)
Liabilitas Sewa	2.145	767	1.718	1.919	1.1918	1.151	1,50
Total Liabilitas Jangka Pendek	61.499	71.059	57.318	64.661	64.661	(6.398)	(0,09)
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek							
Pinjaman Bank	3.501	30.288	15.612	34.904	34.903	4.615	0,15
Liabilitas Sewa	2.399	3.705	3.020	5.373	5.373	1.667	0,45
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-	-	
Liabilitas Imbalan Pascakerja	103.929	87.929	-	52.757	68.757	(35.171)	(0,40)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH					KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RJPP 2025	RKAP 2025	RKAP 2025 (Non Dapen)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 3	8
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	109.828	121.923	18.632	93.034	109.034	(28.889)	(0,24)
Total Liabilitas	171.327	192.981	75.950	157.695	173.695	(35.287)	(0,18)
EKUITAS							
Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal Disetor	9.116	9.116	9.116	9.116	9.116	-	-
Tambahan Modal Disetor	15.572	15.572	15.572	15.572	15.572	-	-
Tambahan Modal Disetor Lainnya	32.033	32.033	32.033	32.033	32.033	-	-
Saldo Laba	-	-	-	-	-	-	-
Ditentukan Penggunaannya	44.749	52.292	44.749	52.292	52.292	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	159.259	186.252	297.814	247.655	212.483	61.403	1,45
Total	260.730	289.228	399.285	345.033	356.669	61.403	1,45
Keuntungan Nonpengendali	731	801	909	874	874	73	0,09
Total EKUITAS	261.461	296.067	400.194	357.543	531.238	61.476	0,21
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	432.788	489.048	476.15	515.238		26.190	0,05

Tabel 6.1. Proyeksi Neraca 2025

2. Proyeksi Laba/Rugi

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	JUMLAH					KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RJPP 2025	RKAP 2025	RKAP 2025 (Non Dapen)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5		6 = 5-3	7
PENDAPATAN USAHA	476.981	477.310	547.562	547.998	547.998	70.688	0,15
BEBAN POKOK USAHA	(334.801)	(323.952)	(392.135)	(365.659)	(365.659)	(41.707)	0,13
LABA BRUTO	142.181	153.358	155.427	182.339	182.339	28.981	0,19
Beban Penjualan	(245)	(370)	(1.314)	(385)	(385)	(15)	0,04
Beban Administrasi dan Umum	(104.492)	(124.669)	(124.457)	(133.182)	(133.182)	(8.512)	0,07
Penghasilan (Beban) Lain- lain - Bersih	(1.204)	(9.278)	(3.202)	(15.142)	(857)	(5.865)	0,63
LABA SEBELUM PAJAK	36.240	19.041	26.452	33.630	49.630	14.589	0,77
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(13.467)	(5.048)	5.819	(7.399)	(7.398)	(2.351)	0,47
LABA TAHUN BERJALAN	22.773	13.993	20.633	26.231	42.231	12.238	0,87

Tabel 6.2. Proyeksi Laba/Rugi 2025

3. Arus Kas

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	JUMLAH				RKAP 2025 (non Dapen)	KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RJPP 2025	RKAP 2025		JUMLAH	%
1	2	3	4	5		6 = 5-3	7
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan Kas dari Pelanggan	511.827	479.857	548.193	555.019	555.019	75.161	0,16
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(513.072)	(468.658)	(499.928)	(506.280)	(490.280)	(37.622)	0,08
Penerimaan Bunga	1.553	1.524	--	1.573	1.573	49	0,03
Pembayaran Pajak	(6.943)	(1.627)	(1.780)	(3.061)	(3.061)	(1.434)	0,88
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(6.633)	11.096	46.484	47.251	63.251	36.155	3,26
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Penerimaan Dividen	538	--	--	--	--	--	--
Penerimaan Pengembalian Investasi	125	(125)	(19.906)	--	--	125	(1,00)
Perolehan Aset Tetap	(58.279)	(62.514)	--	(31.839)	(31.839)	30.675	(0,49)
Penjualan Aset Tetap	112	--	--	--	--	--	--
Perolehan Aset Tidak berwujud	(480)	1.982	(332)	(1.131)	(1.131)	(3.113)	(1,57)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(57.985)	(60.656)	(20.239)	(32.970)	(32.970)	27.686	(0,46)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan Pinjaman Bank	60.000	118.020	50.000	110.000	110.000	(8,020)	(0,07)
Pembayaran Pinjaman Bank	(49.497)	(64.349)	(64.521)	(113,886)	(113,886)	(49,537)	0,77
Penerimaan Setoran Modal dari Kepentingan Non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Liabilitas Sewa	(3.173)	(71)	347	2.819	2.819	2.889	(40,86)
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan	7.330	53.600	(14.173)	(1.067)	(1.067)	(54.667)	(1,02)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	(57.289)	4.040	12.071	13.214	29.214	9.174	2,27
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	86.005	90.045	107.660	103.259	119.259	13.214	0,15

Tabel 6.3. Proyeksi Arus Kas 2025

4. Proyeksi Pokok Keuangan Anak Perusahaan (AETP)

4.1. Proyeksi Neraca

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	29.338	27.737	28.902	1.165	0,04
Piutang Usaha	4.109	1.923	2.527	604	0,24
Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-
Pajak Dibayar di Muka	3.331	3.729	3.803	74	0,02
Beban Dibayar di Muka	16	-	-	-	-
Uang Muka Kerja	-	16	16	-	-
Total Aset Lancar	36.794	33.405	35.248	1.843	0,05
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Pajak Tangguhan	26	26	26	-	-
Investasi pada Entitas Asosiasi					
Aset Hak Guna	872	482	1.210	728	0,60
Aset Tetap	1.047	875	724	(151)	(0,21)
Uang Jaminan	-	162	162	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	162	600	1.120	520	0,46
Total Aset Tidak Lancar	2.106	2.145	3.242	1.097	0,34
JUMLAH ASET	38.900	35.550	38.490	2.940	0,08
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha	725	-	-	-	-
Utang lain-lain	-	-	-	-	-
Utang Pajak	178	189	180	(9)	(0,05)
Utang Dana Pensiun	-	-	-	-	-
Beban Akrual	741	-	-	-	-
Bagian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pinjaman Bank	-	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	453	135	152	17	0,11
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.096	323	332	8	0,03
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek					
Pinjaman Bank	-	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	404	322	594	272	0,46
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	-	-	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	404	322	594	272	0,46
Total Liabilitas	2.500	645	926	281	0,30

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS					
Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal Disetor	30.000	30.000	30.000	-	-
Tambahan Modal Disetor	(1.340)	(1.340)	(1.340)	-	-
Tambahan Modal Disetor Lainnya	-	-	-	-	-
Saldo Laba	-	-	-	-	-
Ditentukan Penggunaannya	7.740	6.000	6.000	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	-	245	2.904	2.660	0,92
Total	36.400	34.905	37.564	2.660	0,07
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-
Total EKUITAS	36.400	34.905	37.564	2.660	0,07
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	38.900	35.550	38.490	2.940	0,08

Tabel 6.4. Proyeksi Neraca Anak Perusahaan Antara pada 2025

4.2. Proyeksi Laba/Rugi

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN USAHA	15.394	16.909	17.755	845	0,05
BEBAN POKOK USAHA	(12.249)	(13.527)	(14.204)	(676)	0,05
LABA BRUTO	3.145	3.382	3.551	169	0,05
Beban Penjualan	-	-	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum	-	-	-	-	-
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	595	867	890	23	0,03
LABA SEBELUM PAJAK	3.740	4.249	4.441	192	0,04
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(614)	(744)	(781)	(37)	0,05
LABA TAHUN BERJALAN	3.127	3.505	3.660	155	0,04

Tabel 6.5. Proyeksi Laba/Rugi Anak Perusahaan ANTARA pada 2024

4.3. Proyeksi Arus Kas

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	13.081	18.367	17.827	(540)	(0,03)
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(10.798)	(13.827)	(14.364)	(536)	0,04
Penerimaan Bunga	449	1.022	1.050	28	0,03
Pembayaran Pajak	(749)	(2.063)	(2.199)	(136)	0,06

URAIAN	JUMLAH			KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2023	2024 (PROGNOSA)	RKAP 2025	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.983	3.499	2.315	(1.184)	(0,51)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan Dividen	-	-	-	-	
Penerimaan Pengembalian Investasi	-	-	-	-	
Perolehan Aset Tetap	(269)	(100)	(150)	(50)	0,33
Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-	
Perolehan Aset Tidak berwujud	-	-	-	-	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(269)	(100)	(150)	(50)	0,33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Pinjaman Bank	-	-	-	-	
Pembayaran Pinjaman Bank	-	-	-	-	
Penerimaan Setoran Modal dari Kepentingan Non-pengendali	-	-	-	-	
Pembayaran Liabilitas Sewa	(477)	-	-	-	
	264	(5.000)	(1.000)	4.000	(4,00)
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Untuk Aktivitas Pendanaan	(213)	(5.000)	(1.000)	4.000	(4,00)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS					
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	27.837	29.338	27.737	(1.601)	(0,06)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	29.338	27.737	28.902	1.165	0,04

Tabel 6.6. Proyeksi Arus Kas Anak Perusahaan ANTARA pada 2024.

BAB IX

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

1. Kondisi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL Perum LKBN ANTARA berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada Strategi dan Visi Misi Perusahaan sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan.

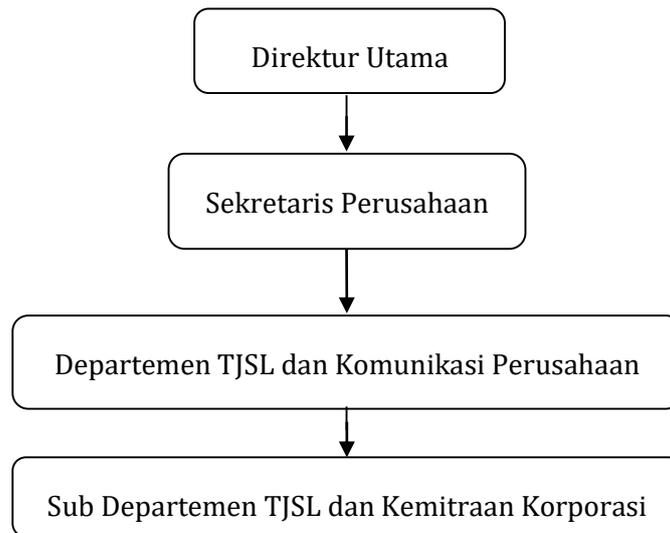
Program TJSL Perum LKBN ANTARA bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Perum LKBN ANTARA sebagai BUMN memiliki kewajiban kepada Kementerian BUMN sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, adapun tujuan Perum LKBN ANTARA mengembangkan kegiatan TJSL adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat internal, terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perum LKBN ANTARA agar mampu mengelola kegiatan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan;
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan persepsi yang sama antara Perum LKBN ANTARA dengan mitra agar terciptanya saling pengertian yang positif dan kondusif guna membantu meningkatkan daya dorong dan posisi tawar Perum LKBN ANTARA selaku salah satu elemen dalam masyarakat Indonesia;
3. Melaksanakan program/kegiatan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan di sekitar BUMN untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
4. Menumbuhkan sinergitas dengan BUMN, pelaku usaha, instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam mengelola suatu program yang sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat luas, di dalam maupun di luar negeri.

Adapun struktur organisasi TJSL Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut:



Sebelum merumuskan program-program TJSL, ANTARA telah melakukan identifikasi risiko-risiko sebagai landasan rancangan program TJSL yang akan dilakukan yang dapat mempengaruhi sasaran strategis perusahaan, baik terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dan menentukan upaya mitigasi yang tepat melalui pelaksanaan kegiatan TJSL, dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran/Target	Risiko	Upaya Mitigasi (Program TJSL)
Literasi media	Pemberitaan tidak sesuai dengan Fakta (Hoaks)	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik, dengan memberikan pelatihan kepada Jurnalis Muda
Reputasi perusahaan	Penurunan citra/reputasi perusahaan	Bantuan bencana alam, penghijauan, Pembinaan UMK, Mudik Gratis
Pembaca (<i>Viewers</i>)	Berita ANTARA dianggap tidak relevan dengan masa kini	Literasi media untuk mahasiswa/i dan komunitas muda
Bisnis Perusahaan	Penurunan pelanggan/jumlah mitra	Beberapa program TJSL dirancang untuk membuka kesempatan kerjasama komersil, yaitu Peningkatan Kompetensi Jurnalistik dan Kepedulian Lingkungan

Tabel 8.1. Upaya mitigasi melalui kegiatan TJSL

Untuk mendukung pelaksanaan program TJSL, Perum LKBN Antara mengacu pada 4 pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

1. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

2. Aspek Environment, Social and Governance (ESG)

Perum LKBN ANTARA berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social and Governance (ESG)* dalam setiap aspek bisnis, mulai dari produksi berita hingga pengelolaan sumber daya, serta hubungan dengan masyarakat. ESG sangat relevan bagi institusi media seperti Perum LKBN ANTARA, karena transparansi dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam operasional media, yang kerap menjadi acuan bagi publik.

Pada tahun 2025, berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham, Perum LKBN ANTARA merencanakan untuk dapat melakukan identifikasi atau pengujian dan mitigasi atas risiko terkait ESG dan penerapan TJSL secara holistik di perusahaan yang relevan dengan proses operasional perusahaan, termasuk di dalamnya fungsi SDM, Teknologi Informasi, Hukum dan Perundang-undangan.

Aspek ESG tersebut adalah:

a. Environment

Dalam menjalankan proses bisnis utama di bidang Pemberitaan dan Jasa Informasi lainnya, Perum LKBN ANTARA tidak memiliki kegiatan yang berdampak langsung pada lingkungan secara fisik. Walaupun demikian, perusahaan tetap memberikan perhatian terhadap isu lingkungan melalui program TJSL dengan program prioritas di bidang lingkungan.

b. Social

Perum LKBN ANTARA dalam menjalankan proses bisnisnya menerapkan aspek sosial, yaitu aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada sosial kemasyarakatan, termasuk kepada pegawai baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar.

Aspek sosial ini meliputi penugasan PSO dengan menghasilkan produksi berita yang berdampak positif pada masyarakat dengan tujuan mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan meningkatkan rasa nasionalisme. Selain itu, program prioritas TJSL melalui literasi media dan ekonomi merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan penerapan ESG yang berdampak bagi masyarakat secara umum. Bagi internal perusahaan, kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pegawai termasuk upaya menciptakan talenta berkualitas sesuai standar kementerian BUMN, inklusivitas bagi seluruh pegawai serta pemberdayaan perempuan dan talenta muda, menjadi salah satu aspek sosial yang dikembangkan perusahaan.

c. Governance

Aspek tata kelola adalah aspek yang menilai kualitas dan ketepatan waktu pengambilan keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab kepada berbagai stakeholder menjadi salah satu perhatian utama Perum LKBN ANTARA dalam menjalankan proses bisnis.

Aspek ini menjadi hal yang diperhatikan sebagai aspek akuntabilitas perusahaan termasuk didalamnya adalah pengelolaan keterbukaan informasi publik, penerapan sistem informasi terintegrasi, dan pengelolaan perusahaan yang berbasis pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.

3. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum LKBN ANTARA berkaitan erat dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun beberapa isu eksternal atau kebijakan pemerintah yang relevan dengan pelaksanaan TJSL di Perum LKBN ANTARA seperti, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang TJSL BUMN. Kebijakan ini menjadi panduan utama bagi Perum LKBN ANTARA dalam menyelaraskan program TJSL dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Fokusnya meliputi pendidikan, lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai BUMN, Perum LKBN ANTARA perlu mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat (SDG 8), pendidikan berkualitas, dan aksi perubahan iklim. Selain itu, program TJSL Perum LKBN ANTARA perlu diselaraskan dengan RPJMN 2020-2025, khususnya dalam prioritas nasional seperti penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Dari sisi kebijakan lingkungan dan keberlanjutan, dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan global, Perum LKBN ANTARA berharap juga dalam program pelestarian lingkungan.

Selain itu terdapat Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sebagai lembaga yang terlibat dalam bidang informasi, program TJSL Perum LKBN ANTARA dapat mendukung penguatan pendidikan karakter melalui media, pelatihan, atau penyediaan fasilitas pendidikan.

Terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM juga relevan, dan ANTARA dapat menyelenggarakan pelatihan digitalisasi UMKM atau kampanye untuk meningkatkan literasi digital. Dengan memperhatikan isu-isu dan kebijakan tersebut, Perum LKBN ANTARA dapat menyusun program TJSL yang relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional.

3.1 Tingkat Keterlibatan Pemangku Kepentingan

STAKEHOLDER	TINGKAT KETERLIBATAN	TAHAP KETERLIBATAN
Kementerian BUMN	Tinggi	Pengajuan RKA, Perencanaan, Laporan evaluasi
Direksi	Tinggi	Seluruh kegiatan TJSL, keputusan strategis
Sekretaris Perusahaan	Tinggi	Seluruh kegiatan TJSL, keputusan teknis
Manajer TJSL dan Komunikasi Perusahaan	Tinggi	Seluruh kegiatan TJSL, pelaksanaan kegiatan
Biro Daerah	Tinggi	Mitra pelaksana kegiatan TJSL
Divisi Keuangan	Tinggi	Seluruh kegiatan TJSL, pembiayaan kegiatan
Divisi Pemberitaan	Tinggi	Mitra pendukung untuk narasumber
Kampus/Instansi Pemerintah/ Perusahaan BUMN	Tinggi	Mitra pendukung dan kolaboratif
Mahasiswa	Tinggi	Target utama
Pelaku UMK	Tinggi	Target utama
Media lokal dan nasional	Sedang	Alat strategis untuk menyampaikan keberhasilan program TJSL dan memperkuat reputasi perusahaan
LSG/NGO Bidang lingkungan	Sedang	Mitra Pendukung

3.2 Identifikasi Kepentingan dan Tujuan Pemangku Kepentingan

STAKEHOLDER	KEPENTINGAN	TUJUAN	MITIGASI RISIKO
Kementerian BUMN	Penentu Kebijakan	Menyelaraskan program TJSL dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Dukungan oleh perusahaan BUMN tidak optimal
Direksi	Pengambil keputusan strategis	Kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan kinerja	Target korporasi tidak tercapai
Sekretaris Perusahaan	Pengambil keputusan teknis/Efisiensi	Peningkatan kinerja TJSL, TJSL bernilai bagi proses bisnis perusahaan	Outcome yang rendah
Manajer TJSL dan Komunikasi Perusahaan	Implementasi teknologi, SROI	Keberhasilan kegiatan/program	Output tidak tercapai dan outcome rendah
Biro Daerah	Pendukung eksekusi program di setiap daerah	Acara berjalan dapat menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah	Output tidak tercapai dan kebutuhan kegiatan tidak terpenuhi
Divisi Keuangan	Pemenuhan pembiayaan	Kebutuhan pendukung acara dapat terpenuhi dengan lancar	Pencairan pembiayaan terlambat
Divisi Pemberitaan	Penunjukkan narasumber	Mendapatkan narasumber yang dibutuhkan dengan tujuan pelatihan	Materi tidak tersampaikan dengan efektif
Kampus/Instansi Pemerintah/ Perusahaan BUMN	Kolaborasi	Dukungan lokasi acara, optimalisasi biaya, potensi kerjasama korporasi	Acara tidak berjalan tidak maksimal
Mahasiswa	Peserta kegiatan	Memberikan pengetahuan/insight tentang ilmu jurnalistik	Peserta tidak datang saat acara, Peserta tidak mendapatkan insight yang diperlukan
Pelaku UMK	Peserta kegiatan	Memberikan pengetahuan/insight yang berpengaruh pada penjualan produk UMK	Peserta tidak datang saat acara, Peserta tidak

4. Gambaran Singkat Kinerja Program TJSJL sampai dengan Prognosa 2024

Kegiatan program TJSJL tahun 2024 diprioritaskan pada Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang mencakup sebagai berikut:

4.1. Program Prioritas

Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	TPB	RKA 2024 (Rp)	Prognosa 2024 (Rp)	% Prognosa thd RKA
1	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	4	190,000,000	122,436,560	64%
2	Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas	4	70,000,000	76,423,268	109%
3	Literasi Media	4	60,000,000	52,811,425	114%
4	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	4	50,000,000	50,000,000	100%
Total			370,000,000	301,671,253	82%

Tabel 8.2. Program Bidang Pendidikan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Jurnalistik

ANTARA sebagai Kantor Berita Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik bagi jurnalis muda, dengan menysasar pada pers mahasiswa dengan target 150 mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Adapun penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik tahun 2024 telah diselenggarakan di 5 kota antara lain Jakarta, Solo, Pontianak, Samarinda dan Ternate, yang diikuti oleh 199 mahasiswa dari 22 Lembaga Pers Mahasiswa dengan data, yaitu Politeknik Negeri Jakarta | GEMA PNJ, Universitas Pancasila | GEMA ALPAS, Universitas Indonesia | Suara Ekonomi, Universitas Sebelas Maret | Visi dan Ketingan, UT Surakarta | Mayantara, UIN Raden Mas Said Surakarta | Locus, Institut Seni Indonesia Surakarta | Intuisi, UIN Raden Mas Said Surakarta | Pandawa, Universitas Muhammadiyah Surakarta | Campus, Universitas Muhammadiyah Pontianak | Qalam Madani, Universitas Tanjungpura | Mimbar Untan, Politeknik Negeri Sambas | Tinta, IAIN Pontianak | Warta, Universitas Mulawarman | Sketsa dan Forestry Magazine, Politeknik Negeri Samarinda | UKM Jurnalistik, UINSI Samarinda | Cakrawala, Universitas Khairun Ternate | Aspirasi dan Mantra, Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) | UKM Jurnalistik, IAIN Maluku Utara | SUAM.

Outcome dari kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- Menjalin kerjasama pemberitaan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bagi perusahaan (tenaga magang)
- Meningkatkan brand awareness perusaha diukur dari media monitoring yaitu 131 pemberitaan media online dan 54 konten media sosial

b. Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas

Sebagai bagian dari *branding* ANTARA sebagai media dengan produk jurnalistik foto terpercaya di Indonesia, maka ANTARA juga memberikan *workshop* atau pendalaman kepada mahasiswa dan komunitas fotografi. Workshop difokuskan pada teknik fotografi sesuai standar jurnalistik Kantor Berita. Tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu, Pelatihan Fotografi Jurnalistik pada Hari Pers Nasional 2024 #Batch1, Santri Foto pada Bulan Ramadhan 2024, Pelatihan Fotografi Jurnalistik di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) #Batch2 dan Pelatihan Fotografi Jurnalistik di Universitas Pasundan #Batch3.

Kegiatan diikuti oleh 126 mahasiswa komunitas fotografi dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Foto, yaitu Bidik Photography | Stikom Bandung, Frame Of Photography | UPN Veteran Jakarta, Gemagazine | Pollteknik Negeri Jakarta, Himakom | Universitas Pasundan, I-Fotografi | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, IKJ TV | Institut Kesenian Jakarta, Impru | Universitas BSI, Kalacitra | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KMPF | Universitas Negeri Jakarta, Photo Speak | UIN Sunan Gn. Jati Bandung, Snap Fotografi | Universitas Gunadarma, Spektrum | Universitas Padjajaran, UFO Veteran Jakarta | UPN Veteran Jakarta, Zepret | Interstudi.

Outcome dari kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- Menjalin kerjasama pemberitaan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bagi perusahaan (tenaga magang).
- Meningkatkan brand awareness perusahaan diukur dari media monitoring yaitu 47 pemberitaan media online dan 43 konten media sosial.
- Menjaring talenta baru sebagai stringer www.antarafoto.com

c. Literasi Media

Program Literasi Media diselenggarakan ANTARA dalam rangka edukasi kepada mahasiswa umum yang memiliki ketertarikan di bidang jurnalistik dengan beberapa tujuan dari kegiatan tersebut salah satunya adalah sebagai berikut:

- Memperkenalkan Perum LKBN ANTARA sebagai Kantor Berita Indonesia yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara;
- Memperkenalkan produk-produk digital Perum LKBN ANTARA seperti portal berita, media sosial, dan sebagainya;
- Memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan jurnalistik di Era Digital;
- Memberikan gambaran mengenai literasi informasi di era maraknya hoax dan mis-infomasi.

Tahun 2024, ANTARA menyelenggarakan literasi media dengan konsep Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara, Medan yang diikuti oleh 84 mahasiswa jenjang pendidikan S-1, S-2 dan S-3, dan melaksanakan seminar media dengan tajuk menjadi Birokrat Profesional di Perusahaan Media berkolaborasi dengan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) pada perhelatan acara Tegalboto Memanggil-3 di Universitas Jember.

Outcome dari kegiatan tersebut, yaitu:

- Menjalin kerjasama pemberitaan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bagi perusahaan (tenaga magang).

- Meningkatkan brand awareness perusahaan diukur dari media monitoring yaitu 62 pemberitaan media online dan 4 konten media sosial.

d. Kolaborasi Bantuan Pendidikan

Pada tahun 2024 ANTARA berkolaborasi dengan Yayasan BUMN untuk bantuan Pendidikan Kewirausahaan dengan memberikan bantuan donasi dalam rangka mendukung program Mendengar Jiwa umumnya yaitu program Yayasan BUMN untuk merespon peningkatan krisis mental di kalangan remaja dan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	TPB	RKA 2024	Prognosa 2024	% Prognosa thd RKA
1	Bantuan Bencana Alam	13	20,000,000	49,828,280	249%
2	Fasilitas Umum	11	20,000,000	19,624,277	98%
3	Penghijauan (penanaman Pohon)	15	20,000,000	19,998,416	100%
Total			60,000,000	89,450,973	149%

Tabel 8.3. Program Bidang Lingkungan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Lingkungan, sebagai berikut:

e. Bantuan Bencana Alam

ANTARA memberikan bantuan sebanyak 50 paket sandang, pangan dan papan kepada korban pengungsi akibat letusan Gunung Ruang di Sulawesi Utara pada 22 Mei 2024 dan 50 paket pangan, perlengkapan sanitasi dan obat-obatan kepada pengungsi letusan gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur pada 1 Desember 2024.

Outcome dari kegiatan tersebut, yaitu:

- Penguatan positioning ANTARA sebagai Kantor Berita Indonesia diukur dari media monitoring yaitu 57 pemberitaan media online dan 11 konten media sosial.

f. Fasilitas Umum

Sehubungan dengan beroperasinya gedung Antara Heritage Center (AHC) sebagai kantor pusat Perum LKBN ANTARA di Pasar Baru, Jakarta, ANTARA menyediakan 1 taman sebagai fasilitas umum masyarakat sekitar maupun mereka yang berkunjung ke AHC dan kawasan Pasar Baru, berlokasi di lahan bantaran sungai Ciliwung, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya (SDA) Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik lahan bantaran sungai.

g. Penghijauan

Sehubungan dengan beroperasinya gedung Antara Heritage Center (AHC) sebagai kantor pusat Perum LKBN ANTARA di Pasar Baru, Jakarta, ANTARA menyediakan sebanyak 50 tanaman atau pohon di lingkungan kantor pusat sebagai bagian dari penghijauan lingkungan kerja pada 30 Juni 2024

Program Bidang Ekonomi

No	Program di Bidang Ekonomi	TPB	RKA 2024	Prognosa 2024	% Prognosa thd RKA
1	Pelatihan Pengembangan UMK	8	70,000,000	69,195,189	99%
2	Program Mudik Gratis	10	-	38,015,980	-
Total			70,000,000	107,211,169	153%

Tabel 8.4. Program Bidang Ekonomi

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pengembangan UMK, sebagai berikut:

a. Pelatihan Pengembangan UMK

Tahun 2024 ANTARA menyelenggarakan pelatihan pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Bondowoso, Jawa Timur berupa Teknik Dasar Foto Produk, Pemasaran Digital dan Sertifikasi Halal berkolaborasi dengan BPIH MUI Jawa Timur dan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) kepada 82 pelaku UMK di Bondowoso, Jawa Timur pada 16 Oktober 2024.

Outcome dari kegiatan tersebut, yaitu:

- Terbukanya kerjasama dengan mitra baru
- Penguatan posititoning ANTARA sebagai Kantor Berita Indonesia diukur dari media monitoring yaitu 31 pemberitaan media online dan 27 konten media sosial.

b. Program Mudik Gratis

Memberikan fasilitas mudik kepada 60 masyarakat baik internal maupun eksternal menggunakan moda transportasi Kerta Api dengan keberangkatan dari Jakarta dengan tujuan Surabaya yang dilaksanakan bersamaan dengan BUMN lain dan berangkat pada tanggal 6 April 2024.

Outcome dari kegiatan tersebut, yaitu:

- Penguatan posititoning ANTARA sebagai Kantor Berita Indonesia diukur dari media monitoring yaitu 57 pemberitaan media online dan 24 konten media sosial.

4.2. Evaluasi TJSL 2024

Terhadap pelaksanaan program TJSL Tahun 2024, secara finansial kegiatan dapat dioptimalkan menggunakan upaya kolaborasi seperti penyediaan tempat dan perlengkapan kegiatan yang bisa dibantu oleh mitra.

Sisi finansial yang lebih optimal menjadikan ANTARA mampu menyelenggarakan program TJSL lebih banyak sehingga mampu menguatkan branding pada target audiens utama yang dituju.

Hal diatas berdampak nyata pada peningkatan nilai SROI (Social Return on Investment) yang dipengaruhi beberapa komponen seperti perbandingan nilai anggaran kegiatan dengan nilai dampak yang didapat melalui PR value seperti pemberitaan di portal milik perusahaan (pusat

dan daerah), media lokal, dan kolaborasi konten media sosial ANTARA dengan mitra kolaborasi. Rata-rata nilai SROI dari tiga (3) program TJSJ tahun 2024 meningkat menjadi 3.16 dari tahun sebelumnya bernilai rata-rata 1,83.

4.3. Key Performance (KPI) TJSJ 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Bobot	Target	Realisasi	Pencapaian (%)	Nilai	Keterangan
1	Melakukan pengukuran dampak atas program TJSJ dengan Metode Social Return on Investment (SROI)	Jumlah	3 program	20%	3	3	100%	20%	Terealisasi 3 program yang dihitung menggunakan SROI: Literasi Media, Peningkatan Kompetensi Jurnalistik dan Pengembangan UMK
2	Menetapkan Kebijakan leveling fungsi yang membidangi Sustainability/ESG setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	Jumlah	Triwulan IV	20%	2	0	0%	0%	Sampai dengan 31 Desember 2024 LKBN ANTARA belum membuat kajian atas leveling fungsi yang membidangi Sustainability/ESG setingkat BOD-1
3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSJ, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN	Waktu per TW	4	20%	4	4	100%	20%	Data telah di update melalui web tjsj.bumn.go.id
4	Meningkatkan kolaborasi BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSJ, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program	Jumlah	3 program	20%	3	3	100%	20%	Sampai dengan 31 Desember 2024 pada pelaksanaan program TJSJ ANTARA berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia, Pracima Tuin (Pura Mangkunegaran), Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, Yayasan BUMN Untuk Indonesia, Universitas Pasundan Bandung, Universitas Khairun Ternate
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSJ TJSJ	Jumlah	Seluruh Karyawan Tetap (523 Karyawan)	20%	523	164	31%	6%	Sampai dengan 31 Desember 2024 karyawan yang terlibat aktif pada program TJSJ sebanyak 164 karyawan
TOTAL								66%	

Tabel 8.5. Prognosa KPI TJSJ 2024

5. Proyeksi Kinerja Program TJSJ Tahun 2025

Program TJSJ pada Perum LKBN ANTARA disusun dengan melakukan identifikasi risiko-risiko seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pada tabel 10.1 sebagai landasan rancangan program TJSJ yang akan dilakukan, dimana dapat mempengaruhi sasaran strategis perusahaan, baik

terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta menentukan upaya mitigasi yang tepat melalui pelaksanaan kegiatan TJSL.

Untuk mendukung pelaksanaan program TJSL, Perum LKBN ANTARA mengacu pada 4 pilar utama yang merupakan penggolongan dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu:

- a. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat.
- b. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusi, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.
- e. Program TJSL tahun 2024 yang dikelola oleh unit TJSL perusahaan merupakan program TJSL yang bersifat CID (Community involvement and development). Sedangkan, program TJSL non-CID seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasional perusahaan yang adil. Isu konsumen, serta tata kelola organisasi, sebagai aspek cakupan 7 subyek inti sebagaimana tercantum dalam SNI ISO 26000:2010 akan ditetapkan melalui Komite TJSL yang sedang dalam tahap akhir proses pembentukan pada triwulan keempat tahun 2024.
- f. Pembentukan Komite TJSL akan mendukung ANTARA dalam pengelolaan TJSL secara komprehensif untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan program TJSL Perusahaan yang berpedoman pada ISO 26000:2010 sebagai rujukan implementasi dalam menetapkan lingkup tanggung jawab sosial, mengidentifikasi isu yang relevan dan menetapkan prioritas.
- g. Komite TJSL akan bertanggungjawab dalam melakukan implementasi pengungkapan laporan keuangan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan IFRS S2, dalam bentuk sustainability report (Laporan Keberlangsungan), yang memadukan unsur sosial, lingkungan, dan tata kelola.

No	Pilar	RKA 2024 (Rp)	Prognosa 2024 (Rp)	RKA 2025	Presentase	
	-1	-2	-3	-4	(5) = 4:2	(6) = 4:3
A	PILAR SOSIAL	370.000.000	301,671,253	320,000,000	86%	106%
B	PILAR EKONOMI	70.000.000	107,211,169	120,000,000	171%	112%
C	PILAR LINGKUNGAN	60.000.000	89,450,973	60,000,000	100%	67%
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	303.803.837	176,641,645	280,000,000	92%	159%
TOTAL		775.000.000	674,975,040	780,000,000	101%	116%

Tabel 8.6. Anggaran Keseluruhan Program TJSL yang dilaksanakan perusahaan

No	Pilar	RKA 2024 (Rp)	Prognosa 2024 (Rp)	RKA 2025	Presentase	
				(Rp)	(%)	
				-4	(5) = 4:2	(6) = 4:3
A	PILAR SOSIAL	370.000.000	301,671,253	320,000,000	86%	106%
B	PILAR EKONOMI	70.000.000	107,211,169	120,000,000	171%	112%
C	PILAR LINGKUNGAN	60.000.000	89,450,973	60,000,000	100%	67%
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	-	-	-	-	-
TOTAL		500,000,000	498,333,395	500,000,000	171%	100%

Tabel 8.7. Anggaran Program CID – Non PUMK

No	Pilar	RKA 2024 (Rp)	Prognosa 2024	RKA 2025	Presentase	
			(Rp)	(Rp)	(%)	
			-3	-4	(5) = 4:2	(6) = 4:3
A	PILAR SOSIAL	-	-	-	-	-
B	PILAR EKONOMI	-	-	-	-	-
C	PILAR LINGKUNGAN	-	-	-	-	-
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	303.803.837	176,641,645	280,000,000	1000%	67%
TOTAL		303,803,837	176,641,645	280,000,000	92%	159%

Tabel 8.7. Anggaran Program Non CID

PEMETAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KEGIATAN TJSL PERUM LKBN ANTARA

1. Pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik untuk jurnalis muda.

Tujuan: Memberikan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik yang profesional, mendukung etika jurnalistik, serta meningkatkan kapasitas media dalam menyampaikan informasi yang berkualitas.

Pemetaan TPB, sebagai berikut:

a. TPB 4: Pendidikan Berkualitas.

Meningkatkan kompetensi teknis kepada peserta untuk meningkatkan kualitas pembuatan berita,serta mendukung karir mereka sebagai jurnalis profesional.

b. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pelatihan ini membantu jurnalis muda memasuki pasar kerja di bidang jurnalistik dengan kompetensi yang lebih tinggi

c. TPB 10: Mengurangi Ketimpangan.

Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik ini membuka akses bagi jurnalis muda dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pelatihan yang setara, meningkatkan inklusivitas dalam sektor media.

d. TPB 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Dengan meningkatkan kompetensi jurnalis muda, pelatihan ini berkontribusi pada penyampaian informasi yang akurat dan relevan

2. Program Bantuan Bencana Alam, Penghijauan dan Pelatihan UMK

Program TJSL seperti Bantuan Bencana Alam, Penghijauan, dan Pelatihan UMK dapat dipetakan ke berbagai TPB karena dampaknya yang multidimensi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pemetaan TPB, sebagai berikut:

a. Bencana Alam.

- TPB 1: Tanpa Kemiskinan.

Bantuan bencana membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak, dan mencegah korban bencana terperangkap kemiskinan akibat bencana lebih dalam dan lama.

- TPB 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan.

Dukungan kesehatan melalui penyediaan obat-obatan, makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan sanitasi, dan layanan medis.

- TPB 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan.

Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui program rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang berkelanjutan.

b. Penghijauan.

- TPB 15: Ekosistem Darat.

Restorasi lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pencegahan degradasi lahan.

- TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Konservasi lingkungan mendukung kualitas dan ketersediaan sumber daya air melalui penghijauan di daerah tangkapan air.

c. Pelatihan UMK

- TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah, dan meningkatkan inklusi keuangan.

- TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Penguatan UMK melalui pelatihan teknologi, akses pasar, dan inovasi.

- TPB 1: Tanpa Kemiskinan

- TPB 10: Mengurangi Ketimpangan

Peningkatan pendapatan UMK, mendukung pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial dengan meningkatkan daya saing UMK di pasar yang lebih luas.

3. Pelatihan untuk mahasiswa yang tergabung dalam komunitas fotografi dan Literasi Media.

a. TPB 4: Pendidikan Berkualitas.

Meningkatkan jumlah pemuda yang memiliki keterampilan teknis kemampuan teknologi informasi.

Kegiatan literasi media memberikan pelatihan keterampilan fotografi, penyuntingan, dan penggunaan media digital, membantu mahasiswa memahami etika media dan meningkatkan kompetensi profesional mereka.

b. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Literasi media dapat membuka peluang kerja atau kewirausahaan di bidang fotografi dan media bagi mahasiswa. Selain itu juga dapat meningkatkan peluang mahasiswa untuk masuk ke industri kreatif atau menjadi fotografer profesional.

c. TPB 10: Mengurangi Ketimpangan

Kegiatan ini dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, terutama mereka yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional, dengan meningkatkan kesetaraan akses terhadap pelatihan berkualitas di bidang fotografi dan media.

d. TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Pelatihan dapat mencakup etika penggunaan media digital, termasuk cara memproduksi konten fotografi yang mendukung kampanye keberlanjutan. Mahasiswa menjadi dapat memahami pentingnya memproduksi konten media yang bertanggung jawab dan berdampak positif.

3.1. Program TJSL (Community Involvement and Development) 2025

Program TJSL (CID) Perum LKBN ANTARA pada tahun 2025 terdiri atas:

Program Bidang Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	RKA 2025 (Rp)	Target Output
1	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	140.000.000	150 Wartawan
2	Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas	70.000.000	100 Mahasiswa
3.	Literasi Media	60.000.000	100 Mahasiswa
4.	Kolaborasi Bantuan Pendidikan	50.000.000	200 Orang

Tabel 8.8. Program Prioritas Pendidikan

Adapun uraian kegiatan dari program Bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Jurnalistik

Penyelenggaraan pelatihan terkait kompetensi jurnalistik bagi generasi jurnalis muda untuk menghasilkan jurnalis muda yang kompeten dengan target peserta pada tahun 2025 sebanyak 150 peserta dimana rencana biaya kegiatan tersebut sebesar Rp140.000.000,-

Sasaran Kinerja:

- a. Semakin luas jangkauan pemberitaan terkait Perum LKBN ANTARA sebagai brand dan korporasi diukur dari media monitoring.
 - b. Terbukanya kesempatan mendapatkan pelanggan baru dilihat dari kerjasama.
 - c. Positioning Perum LKBN ANTARA sebagai satu-satunya Kantor Berita Negara
- b. Pelatihan Mahasiswa dan Komunitas
- Memberikan workshop kepada mahasiswa dan komunitas disela-sela pelaksanaan pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA dengan rencana biaya kegiatan sebesar Rp70.000.000,-

Sasaran Kinerja:

- a. Reputasi Perum LKBN ANTARA meningkat dilihat dari survei dan media monitoring.
 - b. Terbentuknya komunitas muda bagi ANTARA.
 - c. Positioning Perum LKBN ANTARA sebagai satu-satunya Kantor Berita Negara.
- c. Literasi Media
- Literasi media dalam rangka edukasi jurnalistik kepada mahasiswa Jabodetabek (*Antara Youth Community*) secara tatap muka dengan rencana biaya kegiatan tersebut sebesar Rp60.000.000,-

Sasaran Kinerja:

- a. Reputasi Perum LKBN ANTARA meningkat dilihat dari survei dan *media monitoring*
 - a. Terbentuknya komunitas muda bagi Perum LKBN ANTARA
 - b. *Positioning* Perum LKBN ANTARA sebagai media yang relevan dengan zaman
- d. Kolaborasi Bantuan Pendidikan
- Memberikan sumbangan kolaborasi bantuan pendidikan melalui Yayasan BUMN sebesar Rp50.000.000,-

Program Bidang Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	RKA 2025 (Rp)	Target Output
1.	Bantuan Bencana Alam	30.000.000	Tersampaikan
2.	Penghijauan	30.000.000	100 Tanaman

Tabel 8.9. Program Prioritas Lingkungan

Adapun uraian kegiatan dari program diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bantuan Bencana Alam

Bantuan bencana alam berupa dana/natura di daerah-daerah yang terdampak bencana alam dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- b. Penghijauan

Kampanye penghijauan dengan memberikan bibit tanaman kepada pengunjung yang hadir pada penyelenggaraan pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,-

Program Ekonomi

No	Program di Bidang Ekonomi	RKA 2025 (Rp)	Target Output
1.	Pembinaan UMK	50.000.000	50 UMK
2.	Mudik Bersama BUMN	70.000.000	120 orang

Tabel 8.10. Program Prioritas Pengembangan UMK

a. Pembinaan UMK

Tujuan program diatas yaitu, agar para UMK mampu untuk memasarkan produk mereka disekitar area pameran foto yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA. Dengan adanya program tersebut, diharapkan perekonomian dan pangsa pasar para UMK tersebut dapat lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.

b. Mudik Bersama BUMN

Kegiatan Mudik Bersama juga dilaksanakan sebagai bagian untuk memitigasi risiko kecelakaan di jalan raya bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi bagi insan ANTARA yang berkeinginan untuk merayakan hari Raya Idul Fitri di Kampung Halaman, dengan target mudik bersama menggunakan Kereta Api dari Jakarta dengan tujuan akhir Jawa Timur.

6. Target Kinerja

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perum LKBN ANTARA pada tahun 2025 mentargetkan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	Target	Bobot
1	Aspek Fokus pada Dampak , yaitu pengukuran dampak 3 (tiga) program TJSL dengan metode Social Return on Investment (SROI), minimal 1 (satu) di antaranya adalah program Creating Shared Values*	Jumlah	3 (tiga) program	35%
2	Aspek Peningkatan Tata Kelola , terdiri dari :			
	a. Kecukupan Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program TJSL BUMN	Persentase	100%	15%
	b. Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase	100%	20%
	1) Perusahaan memiliki minimal 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi di bidang Sustainability. 2) Seluruh karyawan pengelola TJSL mendapatkan pelatihan terkait kompetensi TJSL.			
3	Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi , yaitu pemenuhan pengisian data dalam sistem informasi TJSL Kementerian BUMN	Jumlah	5 (lima) periode	10%
4	Aspek Peningkatan Kolaborasi , yaitu pelaksanaan kolaborasi program TJSL antar BUMN dan Pihak Lain. (minimal 1 program di setiap program prioritas)**	Jumlah	3 (tiga) program	10%
5	Aspek Peningkatan Engagement Karyawan , yaitu pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan oleh seluruh karyawan BUMN	Persentase	>90%	10%
TOTAL				100%

Tabel 8.11. Key Performance Indicator (KPI) Program TJSL ANTARA 2025

BAB X

RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam hal Teknologi Informasi, di tahun 2025 Perum LKBN ANTARA akan masuk pada dua kebijakan utama rencana strategis teknologi informasi, yaitu penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence atau AI*), serta penguatan keamanan siber (*cyber security*).

1. Pengaruh Faktor Eksternal

1.1. Penggunaan Kecerdasan Artifisial Artificial Intelligence (AI)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence atau AI*) berkembang sangat cepat dan menjanjikan saat ini. Secara umum perkembangan teknologi AI saat ini sangat menjanjikan dan akan membawa perubahan besar di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, pendidikan dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi AI juga dapat menghadirkan berbagai tantangan dan risiko yang harus dikelola, seperti keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi kecerdasan buatan harus dilakukan secara hati-hati dan disertai regulasi yang sesuai.

Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 seiring peningkatan tren penggunaan Artificial Intelligence (AI) melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 3 Tahun 2021, Kemkominfo mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Industri Aktivitas Pemrograman Berbasis AI. Di berbagai negara lebih dari 50 persen responden dari Studi Forbes (2023) menggunakan AI untuk layanan customer service, hingga mekanisme penanganan penipuan. Bahkan, pemanfaatan AI diproyeksikan akan berkontribusi sebesar USD366 Miliar terhadap PDB Indonesia pada tahun 2030.

1.2. Keamanan Siber (Syber Security)

Berdasarkan data National Cybersecurity Index (NCSI) 2023, Belgia ialah negara dengan keamanan siber terbaik dengan indeks 94,81. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan indeks 63,64. Sementara di negara dengan keamanan siber terbaik di kelompok *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, Indonesia masuk kategori lima besar dengan skor 63,64, setelah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa telah terjadi 370,02 juta serangan siber terhadap Indonesia pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (terjadi 266,74 juta serangan siber), jumlah ini meningkat sebesar 38,72%. Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia dengan serangan berjumlah 284,09 juta.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital atau akses ilegal, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tak hanya menjadi pelindung masyarakat di dunia digital namun menjadi aturan bersama bagi masyarakat yang beraktifitas di dunia digital.

2. Kondisi Internal Perusahaan

2.1. Penggunaan Kecerdasan Artifisial Artificial Intelligence (AI)

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh divisi teknologi informasi di sistem perusahaan sudah diimplementasikan, namun terbatas pada modul Newsroom dengan menggunakan Generative AI versi publik (tidak berbayar).

Pemanfaatan AI diantaranya adalah untuk “Auto Generate Translate” keterangan foto (caption) dari Bahasa Indonesia menjadi beberapa bahasa internasional.

2.2. Keamanan Siber (Syber Security)

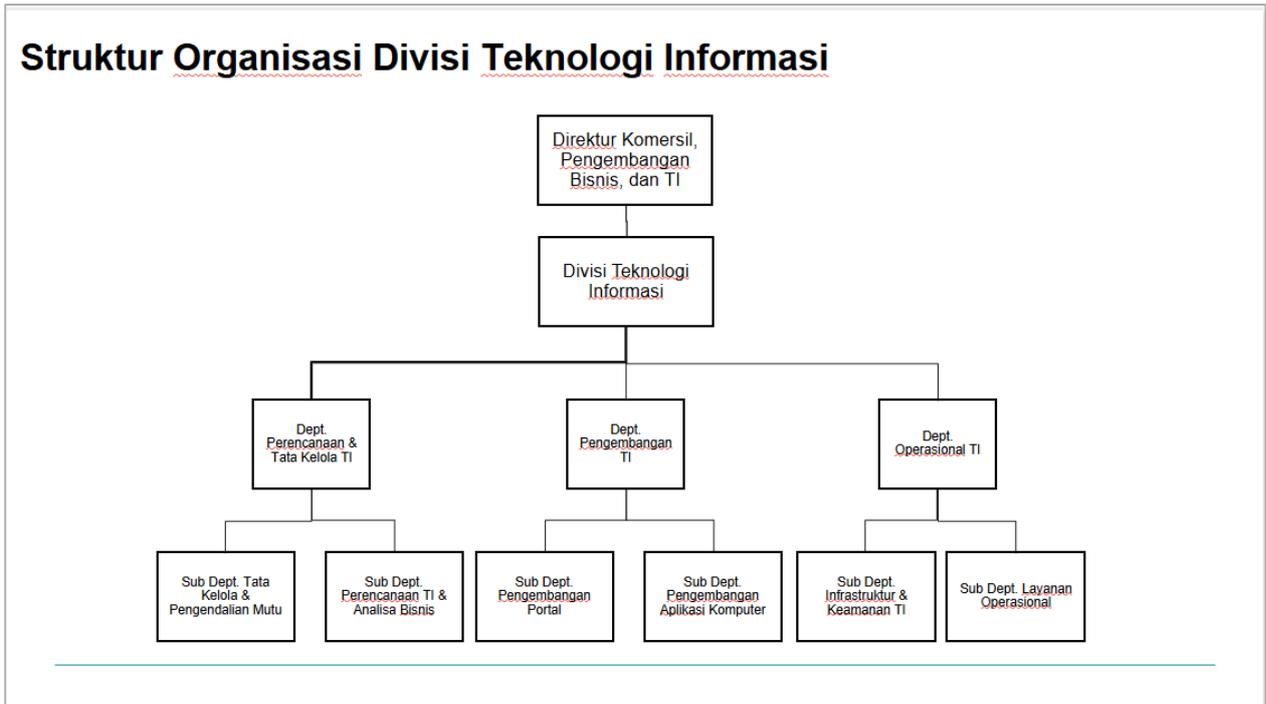
Serangan siber kepada portal pusat dan biro berlangsung terus menerus dan bersifat masif sebagaimana yang telah dilaporkan adanya serangan yang sempat menyebabkan gangguan akses pada sistem perusahaan.

No.	Waktu Pelaporan	Jenis Serangan	Waktu Selesai	Down Time (HH:MM)
1.	14/06/2024 17:35	DDoS	14/06/2024 18:50	01:15
2.	20/06/2024 04:22	DDoS	20/06/2024 07:27	03:05
3.	20/06/2024 10:03	DDoS	20/06/2024 11:37	01:34
4.	20/06/2024 11:41	DDoS	20/06/2024 11:58	00:17
5.	20/06/2024 15:40	DDoS	20/06/2024 17:18	01:38
6.	20/06/2024 21:13	DDoS	20/06/2024 22:45	01:32
7.	21/06/2024 15:24	DDoS	21/06/2024 16:09	00:45
8.	24/06/2024 14:00	DDoS	24/06/2024 14:09	00:09
9.	25/06/2024 13:42	Power Failure	25/06/2024 18:55	06:13

Tema besar rencana strategis tahun 2025 adalah kecerdasan buatan (AI) dan penguatan keamanan siber di samping program prioritas lainnya.

3. Organisasi Divisi Teknologi Informasi Perum LKBN ANTARA

Berdasarkan PER-11/DIR01.ANT/X/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, dapat disampaikan Struktur unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi di perusahaan sebagai berikut:



4. Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Masterplan 2022-2026)

Sebagaimana tercantum dalam Renca Induk Teknologi Informasi (*IT Masterplan 2022-2026*) terdapat 11 (sebelas) aspek Teknologi yang harus menjadi perhatian, yaitu:

 <p>1</p>	<p>Implementasi Layanan berbasis <i>IT Infrastructure Library (ITIL)</i></p> <p><i>IT Service Management</i> meliputi pendefinisian <i>IT Service Catalog</i>, integrasi pelaksanaan Manajemen perubahan TI, permintaan layanan, isu TI, dan <i>problem</i> TI, maupun pengelolaan konfigurasi TI yang dilaporkan secara berkala kepada manajemen serta dikelola secara komprehensif untuk meningkatkan tingkat layanan TI.</p>
 <p>2</p>	<p>Implementasi <i>Security Control</i> untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi <i>Security Objective</i></p> <p>Melakukan penambahan <i>Security Control</i> untuk meningkatkan keamanan operasional TI dengan melakukan implementasi solusi SIEM, standar enkripsi, dan <i>Identity Access Management</i></p>
 <p>3</p>	<p>Meningkatkan pelaksanaan <i>IT Assurance</i></p> <p>Melakukan kegiatan assurance untuk mendukung peningkatan kapabilitas IT seperti melakukan <i>re-assessment IT Maturity</i> dengan menggunakan standar COBIT 2019 serta melakukan implementasi ISO 20000 dan ISO 27001 untuk peningkatan terkait dengan mutu layanan TI dan keamanan informasi</p>
 <p>4</p>	<p>Penilaian dan Peningkatan Layanan TI</p> <p>Pengukuran dan analisa kepuasan pengguna TI terhadap layanan TI untuk mengidentifikasi peningkatan layanan TI yang diperlukan serta pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja layanan TI terhadap target tingkat layanan yang telah disepakati dan mendokumentasikannya dalam laporan.</p>
 <p>5</p>	<p>Peningkatan Knowledge Management TI</p> <p>Memastikan personel backup dengan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa SDM dapat meneruskan pekerjaan key person dan mengelola knowledge document yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan kompetensi SDM personel TI khususnya dan unit lain.</p>
 <p>6</p>	<p>Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia TI</p> <p>Meningkatkan kompetensi SDM TI dengan membuat rencana pengembangan kompetensi dan jenjang karir SDM yang dituangkan ke dalam sebuah roadmap pengembangan SDM serta menjalankan penilaian kinerja SDM secara 360°.</p>

	<p>7 Peningkatan Pengelolaan Risiko TI</p> <p>Meningkatkan pengelolaan risiko TI baik dari sisi keamanan informasi, <i>safety</i>, pengelolaan <i>risk register</i>, sampai dengan identifikasi <i>positive risk</i> maupun <i>value at risk</i> yang kemudian perlu dimitigasi oleh perusahaan.</p>
	<p>8 Peningkatan Transisi Layanan TI (<i>Testing, Go-Live and Post Implementation Support</i>)</p> <p>Meningkatkan Kapabilitas transisi layanan TI baik untuk implementasi perubahan maupun pengembangan layanan baru. Peningkatan terdiri dari pembuatan rencana <i>testing, release, deployment</i>, dan <i>post implementation support</i>.</p>
	<p>9 Penyempurnaan Dokumen Kebijakan & Prosedur Tata Kelola TI</p> <p>Melakukan penyempurnaan Kebijakan TI yang dapat mengakomodasi siklus perencanaan, pengembangan, dan operasional IT secara <i>end to end</i> yang diperkaya melalui adopsi standar dan <i>best practice framework TI</i>.</p>
	<p>10 Penyesuaian Struktur Organisasi TI</p> <p>Menyesuaikan struktur organisasi TI untuk dapat memenuhi pelaksanaan siklus perencanaan, pengembangan, dan operasional TI dengan mempertimbangkan <i>segregation of dunties (SoD)</i> dalam pelaksanaan proses-proses TI Perusahaan.</p>
	<p>11 Penyusunan & Simulasi BCP & DRP Perusahaan</p> <p>Penyusunan dan simulasi <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> dan <i>Disaster Recovery Plan (DRP)</i> untuk meningkatkan kapabilitas IT dalam menjaga kontinuitas bisnis yang memiliki dependensi tinggi terhadap ekosistem TI</p>

5. Inisiatif Teknologi Informasi 2025

Dengan mempertimbangkan trend perkembangan teknologi saat ini dan kedepan, Rencana Induk TI (IT Masterplan 2022-2026) serta menyelaraskan dengan tujuan perusahaan dan menindaklanjuti penerapan pemenuhan gap kebijakan transformasi digital INDI 4.0, maka inisiatif teknologi informasi yang akan dijalankan pada tahun 2025 ini dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu:





REVENUE EXPANSION

berfokus untuk meningkatkan pendapatan perusahaan baik terkait pengembangan bisnis baru maupun peningkatan pendapatan dari bisnis eksisting melalui penerapan teknologi.

Inisiatif dan Program Kerja Terkait:

A-01 Pengembangan Sistem Pelanggan

Branda.antaraneews.com

Kapabilitas to-be:

- Berlangganan secara mandiri
- Pembayaran layanan di muka dengan mengintegrasikan Paymet Gateway
- Berlanggan berbasis kuota download

Benefit:

- Tidak ada “Piutang Pelanggan”
- Pelanggan dapat memilih paket layanan sesuai kemampuan finansial
- Sistem Perpajakan (PPN dan PPh Pasal 23) ada didalam sistem
- Tidak ada Effor Penagihan

Estimasi Investasi: Rp200.000.000,-



REVENUE EXPANSION

berfokus untuk meningkatkan pendapatan perusahaan baik terkait pengembangan bisnis baru maupun peningkatan pendapatan dari bisnis eksisting melalui penerapan teknologi.

Inisiatif dan Program Kerja Terkait:

A-02 Software as a Service (SaaS)

AVOS

Kapabilitas to-be:

- Modul/Aplikasi dapat dipecah untuk melayani perusahaan sejenis
- Modul/Aplikasi dapat dipecah untuk di jual putus kepada mitra

Estimasi Investasi: Rp500.000.000,-

Potensi Pendapatan:

- Beli Putus: 5 Miliar
- Saas: 1 Miliar per tahun



OPERATIONAL EXCELLENCE

berfokus untuk meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam mendukung *Customer Journey* dan *Customer Experience* baik secara internal maupun eksternal.

Inisiatif dan Program Kerja Terkait:

A-03 Penerapan Artificial Intelligence (AI)

Newsroom dan Antarafoto

Kapabilitas to-be:

- Menggunakan *Generative AI* berlisensi yang disematkan pada newsroom
- Menggunakan *Server Generated AI*

Estimasi Investasi: Rp1.5Miliar

A-04 Optimalisasi *Enterprise Resouces Planing (ERP)*

Kapabilitas to-be:

- Penyesuaian dan integrasi aplikasi pendukung
- Penguatan *Dashboard Systemerver* untuk pimpinan
- Optimalisasi penggunaan metode Swakelola

Estimasi Investasi: Rp500 juta



OPERATIONAL EXCELLENCE

berfokus untuk meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam mendukung *Customer Journey* dan *Customer Experience* baik secara internal maupun eksternal.

Inisiatif dan Program Kerja Terkait:

T-01 Peningkatan IT Security

Kapabilitas to-be:

- Penyediaan Monitoring Tools Perangkat & Komponen TI
- Penetration Testing Jaringan & Aplikasi
- Penerapan Hardening Endpoint Device
- Penerapan SIEM (Security Information and Event Management)

Estimasi Investasi: Rp1,5 Miliar

T-02 Peningkatan Jaringan TI

Kapabilitas to-be:

- Penyediaan Redundansi *Core Switch*
- Penyediaan *Web Application Firewall (WAF)*
- Penyediaan Redundansi Konektivitas DC & DRC
- Peningkatan Jaringan Internet (ISP)

Estimasi Investasi: Rp2,5 Miliar

T-03 Peremajaan Hardware & Software TI

Kapabilitas to-be:

- Peremajaan Hardware (Perangkat kerja pegawai)
- Penyusunan *Capacity Plan*
- Peremajaan Lisensi Software

Estimasi Investasi: Rp3,5 Miliar



IT CAPABILITY IMPROVEMENT

berfokus untuk meningkatkan kapabilitas operasional TI perusahaan melalui optimalisasi tata kelola dan implementasi *Best Practice TI* sesuai dengan kebutuhan

Inisiatif dan Program Kerja Terkait:

I-01 Peningkatan Kapabilitas & Kompetensi Personel TI

Kapabilitas to-be:

- Pelaksanaan Manpower Planning Divisi TI
- Penetapan Sourcing Strategy masing-masing peran
- Pemenuhan & Peningkatan Kompetensi Personel TI
- Penilaian performa personel TI secara 360 derajat
- Peningkatan Knowledge Management Divisi TI

I-02 Pemenuhan Dokumen Tata Kelola TI

Kapabilitas to-be:

- Penyusunan dokumen kebijakan, standar, dan prosedur tata kelola TI
- Penetapan kebijakan, standar, dan prosedur tata kelola TI
- Melakukan pelaksanaan tata kelola TI yang sesuai dengan Best Practice COBIT 2019 maupun best practice lain

I-03 Peningkatan Manajemen Layanan TI

Kapabilitas to-be:

- Penetapan Service Level Management dan Penyusunan Service Catalogue
- Peningkatan fungsi IT Helpdesk sebagai single point of contact Divisi TI
- Meningkatkan kualitas layanan TI yang diberikan kepada Unit Kerja

I-04 Peningkatan *IT Assurance*

Kapabilitas to-be:

- Re-Assessment IT Maturity Level dengan COBIT 2019
- Pemenuhan ISO 20000 & ISO 27001
- Menerapkan Good Corporate Governance dari sisi Tata Kelola TI, Pengelolaan Layanan TI, dan Pengelolaan Keamanan TI

BAB XI PROFIL MANAJEMEN RISIKO

1. Gambaran Umum

1.1 Klasifikasi Intensitas Risiko

Sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham Kementerian BUMN pada tahun 2025, Perum LKBN ANTARA dikategorikan sebagai BUMN dengan klasifikasi intensitas risiko “SISTEMIK B”. Posisi ANTARA sebagai BUMN dengan klasifikasi risiko Sistemik B tersebut telah selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (PER-2/MBU/03/2023).

No	Kriteria	Threshold Permen 2	ANTARA	Posisi	Klasifikasi
1.	Total aset	Rp 100 triliun	Rp 393 miliar	Kecil	SISTEMIK B
2.	Total modal	Rp 25 triliun	Rp 223 miliar		
3.	PSO	Penerima PSO	Menerima PSO	Kompleks	

Tabel 9.1 Klasifikasi Intensitas Risiko

Oleh karena itu, Perum LKBN ANTARA akan mematuhi segala konsekuensi terkait kelengkapan organ dan pelaporan yang sesuai dengan klasifikasi risiko tersebut.

Namun demikian, untuk kelengkapan organ pengelola risiko, Perusahaan pada tahun 2025 berpendapat bahwa Perum LKBN ANTARA belum memerlukan pemisahan antara Direktur Keuangan dengan Direktur Manajemen Risiko karena nilai PSO yang relatif sangat kecil dibanding dengan BUMN-BUMN lainnya. Sehingga risiko atas penugasan negara masih dapat dikendalikan oleh Direktur Keuangan yang merangkap sebagai Direktur Manajemen Risiko.

1.2 Konteks Risiko yang akan Dihadapi pada 2025

Secara umum, perusahaan akan terpapar situasi eksternal dan internal yang terjadi pada tahun 2025. Situasi eksternal pertama yang akan mempengaruhi kinerja Perum LKBN ANTARA adanya pemerintahan baru yang berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, seperti keterlambatan pencairan dana PSO bidang pers. Sementara itu, pada sisi internal, Perusahaan pada tahun yang sama juga akan melakukan sejumlah investasi strategis besar yang diharapkan dapat mendatangkan tambahan pendapatan untuk jangka panjang.

a. Pemerintahan Baru

Perusahaan memahami bahwa dengan adanya pergantian kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Digital pada akhir tahun 2024, terdapat dinamika baru dalam proses koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. ANTARA melihat peluang untuk memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik, serta berkomitmen untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di tengah transisi ini.

Namun, Perusahaan juga mengidentifikasi potensi tantangan terkait kelangsungan dan waktu pencairan PSO bidang Pers, yang selama ini merupakan bagian penting dari pendapatan ANTARA. Adanya penyesuaian dengan kebijakan dan prioritas

kepemimpinan baru dapat berpengaruh terhadap jadwal pencairan PSO. ANTARA berharap, dengan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang baik, segala potensi kendala tersebut dapat diantisipasi sehingga tidak mengganggu pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Perum LKBN ANTARA berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian BUMN guna memastikan kelancaran penugasan ini.

b. Kelanjutan Pengalihan Dana Pensiun

Perum LKBN ANTARA pada tahun 2024 telah resmi melikuidasi dana pensiun manfaat pasti – dengan adanya surat keputusan dari OJK – untuk menghindari risiko solvabilitas pada kemudian hari. Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut, Perusahaan harus menutup defisit solvabilitas yang telah dihitung oleh aktuaria sebesar Rp 31,9 miliar. Pada tahun 2024 ini, perusahaan telah menyicil defisit tersebut sebesar Rp 16 miliar dan akan melunasi sisanya pada semester pertama tahun 2025.

Program likuidasi dana pensiun ini akan membawa dua risiko. Yang pertama adalah risiko likuiditas karena perusahaan diperkirakan akan mengalami keterlambatan pembayaran PSO pada semester pertama. Sementara itu risiko kedua adalah penurunan nilai penjualan aset investasi dana pensiun yang berpotensi menyebabkan defisit solvabilitas akan semakin membengkak – mengingat perusahaan sudah menjamin nilai aset investasi akan minimal sama dengan nilai per tanggal 31 Desember 2023.

c. Kebijakan struktur beban pokok baru

Salah satu kebijakan besar yang akan dilakukan perusahaan pada tahun 2025 adalah standarisasi struktur beban pokok di seluruh lini. Selama ini, margin kotor ANTARA dinilai belum maksimal karena sebagian besar biaya pokok dialokasikan untuk biaya personil internal. Selain itu, perusahaan saat ini masih mempunyai dua model struktur beban pokok yang berbeda untuk kantor pusat dan biro provinsi. Melalui Kebijakan yang baru ini, Perusahaan akan menyeragamkan dua model tersebut menjadi satu struktur yang seragam.

Kebijakan baru ini akan membawa risiko yang cukup signifikan bagi perusahaan. Beban pokok perusahaan sebagian besar teralokasikan untuk biaya personil internal. Selain itu, perbedaan model struktur beban di kantor pusat dan biro mengakibatkan adanya standar biaya yang tidak seragam di berbagai lini perusahaan. Kebijakan baru ini adalah upaya startegis untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi alokasi beban perusahaan. Penyesuaian kedua hal diatas pada kebijakan baru akan membawa risiko dalam operasional Perusahaan terutama pada kualitas kerja dan tantangan adaptasi standarisasi beban di biro.

Dengan penerapan kebijakan struktur beban pokok baru untuk bisnis komersil baik di pusat maupun daerah, maka Perusahaan merencanakan pendampingan yang akan dilakukan oleh Konsultan *Change Management*. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko menurunnya pendapatan perusahaan dan menjaga motivasi pegawai.

2. Matriks Strategi Risiko

2.1 Selera Risiko

Berikut merupakan daftar Strategi dan Sub Strategi Perusahaan tahun 2025:

- A. Peningkatan Kualitas Berita untuk Mencerdaskan Bangsa
 - 1. Pelayanan Diseminasi Informasi Negara Republik Indonesia melalui PSO
 - 2. Produksi berita/konten berdampak terhadap edukasi Masyarakat dan menyehatkan ekosistem media
 - 3. Produksi berita/konten berwawasan pasar
 - 4. Produksi berita/konten unggulan Nusantara
 - 5. Monetasi asset digital Perusahaan (sosial media)
- B. Pengembangan Bisnis dan Layanan ke Pelosok Nusantara
 - 1. Solusi media dan strategi komunikasi terintegrasi (IMCS)
 - 2. Peningkatan bisnis biro daerah
 - 3. Memaksimalkan bisnis data dan layanan informasi finansial
 - 4. Mengembangkan bisnis dan layanan inovatif berwawasan pasar
 - 5. Diversifikasi agensi media
- C. Penguatan Reputasi Korporasi dan Pemantapan Tata Kelola Perusahaan
 - 1. Penguatan reputasi korporasi di public dan Tingkat kepercayaan regulator/eksekutif dan legislative
 - 2. Menanamkan budaya Perusahaan AKHLAK
 - 3. Memperkuat atata Kelola Perusahaan terstandarisasi dan berbasis risiko
 - 4. Penguatan basis finansial Perusahaan
 - 5. Kebijakan struktur beban pokok baru
 - 6. Likuidasi dana pensiun
- D. Mempersiapkan Talenta Perusahaan Berwawasan Digital dan Berdaya Asing
 - 1. Mempersiapkan taalentaa Perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing

Tabel berikut ini merupakan pernyataan selera risiko perusahaan beserta parameternya yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, sebagaimana terdapat dalam lampiran buku RKAP ini.

Kategori risiko	Sub Strategi	Selera	RAS
Bisnis	B.1 Solusi Media dan Strategi Komunikasi Terintegrasi (IMCS) B.2 Peningkatan Bisnis Biro Daerah B.3 Memaksimalkan Data dan Layanan Informasi Finansial B.4 Mengembangkan Bisnis dan Layanan Inovatif berwawasan pasar B.5 Diversifikasi Agensi Media A.5 Monetasi asset digital perusahaan	Strategis	Perusahaan mengambil sikap strategis untuk pengembangan bisnis komunikasi dan data di kantor pusat maupun biro provinsi demi mendukung target pertumbuhan bisnis komersial yang lebih tinggi dari biasanya
Pemberitaan	A.1 Pelayanan Diseminasi Informasi Negara Republik Indonesia melalui PSO A.2 Produksi berita berdampak terhadap edukasi Masyarakat dan menyehatkan ekosistem media	Strategis	Perusahaan bersikap strategis untuk bidang pemberitaan pada 2025 dengan mengawal agenda-agenda penting dan strategis dari Pemerintah dan stakeholder. Selain itu, Perusahaan juga akan memulai strategi produksi berita evergreen yang akan meningkatkan keterbacaan <i>antaranews.com</i>

Kategori risiko	Sub Strategi	Selera	RAS
	A.3 Produksi berita berwawasan pasar A.4 Produksi berita unggulan Nusantara		
Keuangan	C.4 Penguatan basis finansial perusahaan C.6 Likuidasi Dana Pensiun C.5 Kebijakan struktur beban pokok baru	Konservatif	Perusahaan akan memenuhi semua kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan.
Keselamatan kerja	C.2 Menanamkan budaya Perusahaan AKHLAK A.1 Pelayanan Diseminasi Informasi Negara Republik Indonesia melalui PSO	Tidak toleran	Perusahaan akan menjaga keselamatan wartawan dan pegawai dengan maksimal dan tidak toleran risiko K3 dengan kategori kritikal.
Hukum dan Kepatuhan	C.1 Penguatan Reputasi Korporasi di Publik dan Tingkat Kepercayaan Regulator/Eksekutif dan Legislatif C.3 Memperkuat Tata Kelola Perusahaan terstandarisasi dan berbasis risiko	Tidak Toleran	Perusahaan tidak akan memberikan ruang untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan dan akan mematuhi semua regulasi yang berlaku.
Teknologi Informasi	A.5 Monetasi asset digital Perusahaan D.1 Mempersiapkan talenta perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing	Tidak toleran	Perusahaan tidak akan toleran terhadap risiko teknologi informasi berdampak "darurat sistemik" yang dapat menghentikan operasional perusahaan.

Tabel 9.2 Selera Risiko

2.2 Parameter dan Limit Risiko

Parameter dan limit risiko perusahaan pada tahun 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

No	Kategori Risiko BUMN	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Nilai Batasan /Limit
1	Bisnis	Strategis	Deviasi negatif realisasi dengan target pendapatan per triwulan	10%
2	Pemberitaan	Strategis	Deviasi negatif realisasi dengan target pembaca antaranews per bulan	5%
3	Keuangan	Konservatif	Interest bearing debt to ebitda	1
		Konservatif	Kas akhir bulan	Rp 40 miliar
		Konservatif	Kerugian nilai tukar	Rp. 1 miliar
4	Keselamatan Kerja	Tidak Toleran	Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat tetap	0
5	Hukum dan Kepatuhan	Tidak Toleran	Jumlah tuntutan yang masuk ke persidangan	0
6	Teknologi Informasi	Tidak toleran	Jumlah serangan siber berdampak "darurat sistemik"	0

Tabel 9.3 Parameter dan Limit Risiko

2.3 Ambang Batas Risiko

Ambang batas risiko perusahaan pada tahun 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

Aspek	Besaran (Rp.)	Dasar perhitungan
<i>Risk Capacity</i>	148,344,969,232	Proyeksi <i>Net Working Capital</i> pada tahun 2024
<i>Risk Appetite</i>	29,668,993,846	Sebesar 20% dari risk capacity
<i>Risk Tolerance</i>	37,086,242,308	Sebesar 25% dari risk capacity
<i>Risk Limit</i>	10,384,147,846	Sebesar 35% dari Risk Appetite

Tabel 9.4 Ambang Batas Risiko

3. Figur RKAP 2025 Berbasis Manajemen Risiko

3.3 Perencanaan Target Laba Berbasis Risiko

Tabel dibawah ini merupakan perencanaan target laba berbasis risiko pada RKAP 2025:

Proyeksi Pendapatan Rutin	Proyeksi Pendapatan Bisnis Baru	Eksposur Risiko Residual Pendapatan	Total Proyeksi Pendapatan	Biaya Rutin	Biaya Non Rutin	Eksposur Risiko Residual	Biaya Mitigasi Risiko	Total Biaya	Target Laba Bersih
537.95	17.42	7.37	547.99	507.50	8.55	2.53	3.19	521.77	26.23

Tabel 9.5 Figur Laba/Rugi RKAP 2025 (dalam miliar)

Arus Kas Operasi	Arus Kas Investasi**	Arus Kas Pendanaan**
47.25	-32.97	-1.07

Tabel 9.6 Figur Arus Kas RKAP 2025 (dalam miliar)

**Arus kas investasi dan pendanaan sudah memfaktorkan kebutuhan untuk perolehan pendapatan dari strategi bisnis baru

Aset	Utang***	Ekuitas
515.23	157.69	357.54

Tabel 9.7 Figur Neraca RKAP 2025 (dalam miliar)

***Utang terjaga secara sustain untuk *leveraging* pendapatan atas strategi bisnis baru

Perencanaan Target Laba Berbasis Risiko (ilustrasi)

a.	Proyeksi pendapatan bisnis rutin	537,951,577,750
b.	Proyeksi pendapatan strategi bisnis baru	17,420,357,854
c.	Eksposur risiko residual yang berdampak pada pendapatan	(7,374,046,604)
d.	Total Proyeksi Pendapatan (a+b-c)	547,997,889,000
e.	Biaya rutin untuk pencapaian pendapatan bisnis rutin	(507,502,868,376)
f.	Biaya non rutin yang timbul dari strategi bisnis baru	(8,547,315,880)
g.	Eksposur risiko residual yang berdampak pada biaya	(2,531,322,086)
h.	Biaya mitigasi risiko untuk pencapaian bisnis rutin dan strategi bisnis baru	(3,185,000,000)
i.	Total Biaya (e+f+g+h)	(521,766,506,342)
j.	Target Laba Bersih (d-i)	26,231,382,658

3.4 Pilihan Strategi Bisnis

No	Pilihan Strategi	Hasil yang diharapkan	Nilai Risiko	Nilai Limit Risiko	Keputusan Penetapan
1	Peningkatan kualitas berita untuk mencerdaskan bangsa	Pendapatan PSO sebesar Rp. 184 miliar	Penurunan pendapatan Rp. 3 miliar	Maksimal pendapatan PSO sebesar 10% atau Rp. 18 miliar	Lanjut
		Tambahan pageviews sebesar 23% dari 2024	Penurunan arus kas sebesar Rp. 83 juta per bulan	Arus kas akhir bulan Rp. 40 miliar	Lanjut
2	Pengembangan bisnis dan layanan ke pelosok Nusantara	Tambahan pendapatan sebesar Rp. 1,5 miliar	penurunan arus kas sebesar Rp. 700 juta setahun	Arus kas akhir bulan Rp. 40 miliar	Lanjut
		Pendapatan Komersil sebesar Rp. 343 miliar	Penurunan pendapatan Rp. 4 miliar	Maksimal penurunan pendapatan komersil sebesar 10% atau Rp. 34,5 miliar	Lanjut
3	Penguataan reputasi Korporasi dan pemantapan tata kelola perusahaan	Penghematan biaya iuran dana pensiun sebesar Rp. 10,8 miliar per tahun	Penurunan arus kas sebesar Rp. 610 juta per bulan	Arus kas akhir bulan Rp. 40 miliar	Lanjut
		Peningkatan Laba Bersih Perusahaan Rp. 1 miliar	Penurunan arus kas sebesar Rp. 600 juta per bulan	Arus kas akhir bulan Rp. 40 miliar	Lanjut
4	Mempersiapkan talenta perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing	Peningkatan pendapatan sebesar Rp. 12,7 miliar	penurunan arus kas sebesar Rp. 565 juta per bulan	Arus kas akhir bulan Rp. 40 miliar	Lanjut

3.5 Risiko Utama Perusahaan

Tabel dibawah ini merupakan risiko utama perusahaan pada RKAP 2025:

Risiko	ERI	Biaya Perlakuan Risiko	ERR (Total)	ERR* (Pendapatan)	ERR (Beban)
Penurunan produktivitas pegawai komersil, pemberitaan, dan biro	8,370.96	700.00	2,615.92	2,615.92	
Kegagalan adaptasi dengan perubahan kebijakan mesin pencari	7,324.59	260.00	1,569.55	1,569.55	
Ketidak puasannya Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap tata kelola PSO	7,749.57	150.00	1,660.62	1,660.62	
Pembengkakan defisit solvabilitas Dana Pensiun (dalam likuidasi)	8,680.00	100.00	1,860.00		1,860.00
Tidak berlanjutnya kontrak pelanggan Bloomberg	4,436.18	0.00	798.51	798.51	
Kegagalan mitra kolokasi dalam menjaga sistem aplikasi perusahaan tetap berjalan	33.58	0.00	12.31		12.31
Kurang sesuainya kompetensi AE dengan produk IMCS	3,375.29	1,275.00	723.28	723.28	

Risiko	ERI	Biaya Perlakuan Risiko	ERR (Total)	ERR* (Pendapatan)	ERR (Beban)
Inefisiensi Pembiayaan Operasional dengan Beban Bunga Pinjaman	2,800.00	0.00	600.00		600.00
Pelemahan nilai Rupiah terhadap Dollar	458.95	100.00	59.01		59.01
Pencabutan izin usaha PT AETP oleh BI	41.98	600.00	6.16	6.16	
Total	43,271.10	3,185.00	9,373.02	7,374.04	2,531.32

Tabel 9.8 Risiko Utama (dalam juta)

Eksposur Risiko Inheren	Eksposur Risiko Residual	Penurunan Eksposur Risiko	Biaya Perlakuan Risiko	Manfaat perencanaan perlakuan risiko
43,271.10	9,905.37	33,365.73	3,185.00	30,180.73

Tabel 9.9 Eksposur Risiko (dalam juta)

Strategi Bisnis Baru	Proyeksi Pendapatan	Biaya Bisnis Baru
Optimalisasi produk berbasis event di pusat dan biro	13.06	6.78
AHC Connect	1.50	0.77
Monetasi pageview <i>antaranews.com</i>	2.86	1
Total	17.42	8.55

Tabel 9.10 Strategi Bisnis Baru (dalam miliar)

Bisnis Rutin	Proyeksi Pendapatan
PSO	184.51
Layanan Data	222.34
Layanan Komunikasi	83.96
Biro Provinsi	38.43
Antara ETP	17.76
Total	547.99

Tabel 9.11 Bisnis Rutin (dalam miliar)

4. Gambaran Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN

Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa Risiko (T3)	Risiko
Tema Risiko Portfolio BUMN	Risiko Fiskal	Peristiwa Risiko terkait Subsidi & Kompensasi	Ketidakpuasan Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap tatakelola PSO
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Formulasi Strategis	Kegagalan adaptasi dengan perubahan kebijakan mesin pencari

Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa Risiko (T3)	Risiko
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Formulasi Strategis	Kurang sesuai kompetensi AE dengan produk IMCS
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Hukum, Reputasi & Kepatuhan	Pencabutan izin usaha PT AETP oleh BI
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Operasional	Penurunan produktivitas pegawai komersil, pemberitaan, dan biro
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Operasional	Tidak berlanjutnya kontrak pelanggan Bloomberg
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Keuangan	Pembengkakan defisit solvabilitas Dana Pensiun (dalam likuidasi)
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Keuangan	Inefisiensi Pembiayaan Operasional dengan Beban Bunga
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Peristiwa Risiko terkait Keuangan	Bertambahnya Piutang Tak Tertagih dari Revenue Stream Branda
Tema Risiko Bisnis BUMN	Risiko Industri Umum	Risiko terkait Teknologi Informasi & Keamanan Siber	Kegagalan mitra kolokasi menjaga sistem aplikasi tetap berjalan

Tabel 9.12 Gambaran Risiko Utama dalam Taksonomi Risiko K-BUMN

5. Kriteria Penilaian Dampak dan Probabilitas

5.1 Kriteria Penilaian Dampak

Tingkat Dampak Risiko	Parameter Kuantitatif Nilai Dampak Keuangan	Parameter Kualitatif*
	$X \leq 20\%$ dari limit risiko BUMN	Melibatkan kelalaian umum
	$20\% < X \leq 40\%$ dari limit risiko BUMN	Melibatkan kelalaian umum, dapat melemahkan reputasi dan tidak ada indikasi potensi disrupsi operasi dan kerugian jiwa
	$40\% < X \leq 60\%$ dari limit risiko BUMN	Melibatkan tindakan salah kelola umum, dapat merusak reputasi BUMN dan ada potensi disrupsi operasional minor
	$60\% < X \leq 80\%$ dari limit risiko BUMN	Melibatkan gross negligence, keselamatan perorangan, dan melibatkan penurunan reputasi dan kepercayaan publik pada BUMN, terjadi disrupsi operasional untuk periode di bawah 1 bulan
	$X > 80\%$ dari limit risiko BUMN	Melibatkan fraud, melibatkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan, disrupsi operasi > 1 bulan, melibatkan kerugian jiwa, atau melibatkan penurunan reputasi signifikan yang berdampak sistemik dan sektor,

Tabel 9.13 Kriteria Penilaian Dampak

5.2 Kriteria Penilaian Probabilitas

Tingkat Dampak Risiko	Parameter Probabilitas
	Probabilitas kejadian di bawah 20%
	Probabilitas kejadian antara 20% sampai dengan 40%
	Probabilitas kejadian antara 40% sampai dengan 60%
	Probabilitas kejadian antara 60% sampai dengan 80%
	Probabilitas kejadian antara 80% sampai dengan 100%

Tabel 9.14 Kriteria Penilaian Probabilitas

*) Parameter kualitatif dapat ditambahkan dengan mengacu pada kriteria lain yang ditetapkan dalam Juknis SK-6/DKU.MBU/10/2023 atau dapat disesuaikan dengan pedoman masing-masing BUMN

***) Parameter probabilitas mengikuti ketentuan pada Juknis SK-6

6. Heatmap



Keterangan:

1.	Penurunan produktivitas pegawai komersil, pemberitaan, dan biro
2.	Kegagalan adaptasi dengan perubahan algoritma mesin pencari

3.	Ketidakpuasan K - Komunikasi dan Digital terhadap tatakelola PSO
4.	Pembengkakan defisit solvabilitas Dana Pensiun (dalam likuidasi)
5.	Tidak berlanjutnya kontrak pelanggan Bloomberg
6.	Kegagalan mitra kolokasi menjaga sistem aplikasi tetap berjalan
7.	Kurang sesuai kompetensi AE dengan produk IMCS
8.	Inefisiensi Pembiayaan Operasional dengan Beban Bunga
9.	Pelemahan rupiah terhadap dollar
10.	Pencabutan izin usaha PT AETP oleh BI

Residual TW I 2025

Peluang					1,10
	9	8	7	6	2,3,4
					5
Dampak					

Residual TW II 2025

					10
		7	1,2		
9	8	6	3	4	
	5				

Residual TW III 2025

					10
	4,7	1,2,3,6			
8,9	5				

Residual TW IV 2025

7,10	4,6	1		
8,9	5	2,3		

No. Risiko	Target Risiko Residual Kuantitatif																							
	Nilai Dampak				Skala Dampak				Nilai Probabilitas				Skala Probabilitas				Eksposur Risiko				Skala Risiko			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	10.463,69	7.847,77	5.231,85	5.231,85	5	4	3	3	80%	70%	50%	50%	5	4	3	3	8,370.96	5,493.44	2,615.92	2,615.92	25	16	9	9
2	10.463,69	7.847,77	5.231,85	5.231,85	5	4	3	3	70%	70%	50%	30%	4	4	3	2	7,324.59	5,493.44	2,615.92	1,569.55	20	16	9	6
3	11.070,81	8.303,11	5.535,41	5.535,41	5	4	3	3	70%	50%	50%	30%	4	3	3	2	7,749.57	4,151.56	2,767.70	1,660.62	20	12	9	6
4	12.400,00	9.300,00	3.720,00	3.720,00	5	5	2	2	70%	50%	50%	50%	4	3	3	3	8,680.00	4,650.00	1,860.00	1,860.00	20	15	6	6
5	8.872,37	2.661,71	2.661,71	2.661,71	5	2	2	2	50%	40%	30%	30%	3	2	2	2	4,436.18	1,064.68	798.51	798.51	15	4	4	4
7	4.821,84	4.821,84	2.410,92	1.446,55	3	3	2	1	70%	70%	50%	50%	4	4	3	3	3,375.29	3,375.29	1,205.46	723.28	12	12	6	3
8	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2	2	1	1	70%	50%	30%	30%	4	3	2	2	2,800.00	1,500.00	600.00	600.00	8	6	2	2
9	655,65	655,65	655,65	196,69	1	1	1	1	70%	50%	30%	30%	4	3	2	2	458.95	327.82	196.69	59.01	4	3	2	2

Tabel 9.15 Target Risiko Residual Kuantitatif

No. Risiko	Target Risiko Residual Kualitatif																							
	Nilai Dampak				Skala Dampak				Nilai Probabilitas				Skala Probabilitas				Eksposur Risiko				Skala Risiko			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
6	415	312	321	208	4	3	3	2	75%	55%	55%	55%	4	3	3	3	312	171	171	114	16	9	9	6
10	519	519	519	104	5	5	5	1	75%	75%	75%	55%	5	5	5	3	389	389	389	57	25	25	25	3

Tabel 9.16 Target Risiko Residual Kualitatif

No. Risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menunjuk konsultan manajemen perubahan untuk membantu mengkampanyekan kebijakan baru demi sustainabilitas perusahaan	700,000,000												
	mencari talenta AE baru untuk membantu pencapaian target komersial (sama dengan risiko nomor 7)	-												
2	Menunjuk/meng-hire petugas yang salah satu tugas utamanya adalah memantau kebijakan algoritma google	260,000,000												
	Menyusun laporan update kebijakan algoritma google setiap satu bulan sekali kepada Direktur Pemberitaan dan Redaktur Pelaksana	-												
3	Berkoordinasi dengan auditor untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi ekspektasi KKD	-												
	Menyediakan aplikasi media penyimpanan bagi mitra distribusi yang mudah digunakan	150,000,000												
4	Membuat perencanaan penjualan aset berisiko tinggi	100,000,000												
	Memonitor selisih penjualan aset per bulan	-												
5	Memonitor progress pembaruan kontrak dan melibatkan Manajemen Risiko dalam proses reviu kontrak untuk memastikan asumsi nilai tukar yang digunakan telah mempertimbangkan risiko dua tahun ke depan	-												
6	Pembaruan kontrak dengan moratel dengan memasukkan SLA	-												
	Penyusun dan melaksanakan DRP	-												
7	Merekrut AE Baru dengan kualifikasi yang dibutuhkan	975,000,000												
	Memberikan pelatihan insentif kepada AE yang ada	300,000,000												
8	Memasukkan biaya bunga dalam struktur HPP, sehingga harga jual bisa disesuaikan dengan lebih akurat	-												
	Memonitor tingkat kesehatan pinjaman	-												
9	Pelatihan analisis pasar keuangan dan makroekonomi	100,000,000												

No. Risiko	Rencana Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp/Mata Uang Lain)	Timeline (Bulan)													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	mengembangkan dan menggunakan software compliance tracker untuk membantu mendeteksi peraturan, pembuatan compliance register dan monitoring kinerja kepatuhan secara efektif	600,000,000														

Tabel 9.17 Rencana Perlakuan Risiko

7. Ringkasan Risiko Utama

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
RU-1			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penurunan produktivitas pegawai komersil, pemberitaan, dan biro <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2025, perusahaan akan menerapkan kebijakan struktur HPP baru yang akan menyeragamkan model RAB untuk project di kantor pusat dan biro. Sebelumnya, ANTARA mempunyai dua model bisnis yang berbeda untuk project yang ditangani kantor pusat dan biro. Di kantor pusat, sebuah project dinilai fisibel jika project tersebut diproyeksikan mempunyai net profit margin (NPM) senilai 30%. Aturan tersebut membuat perusahaan sulit melakukan efisiensi karena project yang seharusnya bisa mendatangkan NPM lebih dari 30% menjadi terkesan dipaksakan untuk tetap 30% -- dengan menganggarkan biaya yang tidak perlu. Selain itu, aturan NPM 30% juga membuat harga penawaran produk dari ANTARA menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Sementara itu, model bisnis di biro provinsi berbeda dengan kantor pusat. Di biro, perusahaan menetapkan bagi hasil senilai 60% persen pendapatan untuk biro (yang dihitung sebagai beban) dan 40% untuk pusat. Dengan model bisnis ini, perusahaan sulit melakukan efisiensi karena alasan yang sama seperti di atas. Dengan adanya kebijakan penyeragaman struktur HPP baru berdasarkan produk yang menghilangkan biaya-biaya tidak perlu, karyawan dapat berpotensi merasa dirugikan dan kehilangan motivasi dalam bekerja. 	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk konsultan manajemen perubahan untuk membantu mengkampanyekan kebijakan baru demi sustainabilitas perusahaan Mencari talenta AE baru untuk membantu pencapaian target komersial (sama dengan risiko nomor 7) <p>KRI</p> <p>Deviasi negative realisasi dengan target pendapatan per triwulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: <= 5% Hati-hati: 6-9% Bahaya: >= 10% 		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																									
	D	P			D	P																								
			<p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan struktur HPP baru berpotensi menurunkan motivasi karena benefit yang didapatkan selama ini akan berkurang. <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan ini diperkirakan akan berpengaruh pada karyawan di Divisi Layanan Komunikasi, pemberitaan (yang mengerjakan sebagian project Divisi LK, dan di biro provinsi). Dampak terburuk dari kebijakan ini diasumsikan akan mengurangi hingga 35% pendapatan dari biro, Dept. Layanan Komunikasi Strategis, dan Dept. Kerjasama Konten <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departemen</th> <th>Total Pendapatan</th> <th>Asumsi Penurunan</th> <th>Risiko Pendapatan</th> <th>Dampak Laba Kotor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kerjasama Konten</td> <td>36.0</td> <td>30%</td> <td>10.8</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>Layanan Komunikasi Strategis</td> <td>42.0</td> <td>30%</td> <td>12.6</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>Biro Provinsi</td> <td>38.5</td> <td>30%</td> <td>11.6</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>116.6</td> <td></td> <td>34.9</td> <td>10.5*</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam miliar *Lebih besar dari 80% limit risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Sementara itu, peluang inheren dari risiko ini cukup besar (80%) karena pegawai perusahaan selama ini mengeluhkan pembayaran honor pada akhir tahun. 	Departemen	Total Pendapatan	Asumsi Penurunan	Risiko Pendapatan	Dampak Laba Kotor	Kerjasama Konten	36.0	30%	10.8	3.2	Layanan Komunikasi Strategis	42.0	30%	12.6	3.8	Biro Provinsi	38.5	30%	11.6	3.5	Total	116.6		34.9	10.5*		
Departemen	Total Pendapatan	Asumsi Penurunan	Risiko Pendapatan	Dampak Laba Kotor																										
Kerjasama Konten	36.0	30%	10.8	3.2																										
Layanan Komunikasi Strategis	42.0	30%	12.6	3.8																										
Biro Provinsi	38.5	30%	11.6	3.5																										
Total	116.6		34.9	10.5*																										
RU-2			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegagalan adaptasi dengan perubahan algoritma mesin pencari <p>Penjelasan:</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk/meng-hire petugas yang salah satu tugas utamanya adalah memantau kebijakan algoritma google. 																										

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																												
	D	P			D	P																											
			<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2025, perusahaan akan memulai strategi baru – dengan memproduksi konten-konten evergreen – untuk meningkatkan keterbacaan <i>antaranews.com</i> hingga 30 juta per bulan pada akhir tahun. Peningkatan keterbacaan tersebut diharapkan dapat membantu kinerja komersial karena calon pelanggan akan lebih mudah bekerja sama dengan ANTARA yang mempunyai situs dengan visibilitas tinggi. Namun demikian, strategi tersebut harus diimbangi dengan strategi SEO yang tepat mengingat Google – sebagai mesin pencari yang paling dominan – sering kali merubah kebijakan algoritma pencarian yang berdampak besar pada situs-situs di seluruh dunia. Tabel dan grafik berikut menggambarkan perubahan kebijakan algoritma pada Google: <table border="1" data-bbox="421 715 1377 1161"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Nama Algoritma</th> <th>Dampak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>Panda</td> <td>Menarget situs dengan konten non-original dan pendek</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>Penguin</td> <td>Menarget situs dengan link spam</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>Hummingbird</td> <td>Website dengan konten yang sesuai dengan kata kunci mengalami kenaikan pengunjung</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>Mobile-Friendly</td> <td>Situs yang didesain untuk mobile friendly diuntungkan</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>RankBrain</td> <td>Konten berkualitas diutamakan meski tidak mempunyai kata kunci yang cocok</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Core Updates</td> <td>Kelanjutan RankBrain</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Spam Updates</td> <td>Mengutamakan situs yang menerapkan "ethical SEO"</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>Product Reviews</td> <td>Mengutamakan rivi u produk yang in-depth</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Nama Algoritma	Dampak	2011	Panda	Menarget situs dengan konten non-original dan pendek	2012	Penguin	Menarget situs dengan link spam	2013	Hummingbird	Website dengan konten yang sesuai dengan kata kunci mengalami kenaikan pengunjung	2015	Mobile-Friendly	Situs yang didesain untuk mobile friendly diuntungkan	2015	RankBrain	Konten berkualitas diutamakan meski tidak mempunyai kata kunci yang cocok	2020	Core Updates	Kelanjutan RankBrain	2020	Spam Updates	Mengutamakan situs yang menerapkan "ethical SEO"	2021	Product Reviews	Mengutamakan rivi u produk yang in-depth	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan update kebijakan algoritma google setiap satu bulan sekali kepada Direktur Pemberitaan dan Redaktur Pelaksana. <p>KRI Pageview per bulan setelah produksi konten evergreen berjalan penuh</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: >= 10 juta Hati-hari: 7-10 juta Bahaya: < 7 juta 		
Tahun	Nama Algoritma	Dampak																															
2011	Panda	Menarget situs dengan konten non-original dan pendek																															
2012	Penguin	Menarget situs dengan link spam																															
2013	Hummingbird	Website dengan konten yang sesuai dengan kata kunci mengalami kenaikan pengunjung																															
2015	Mobile-Friendly	Situs yang didesain untuk mobile friendly diuntungkan																															
2015	RankBrain	Konten berkualitas diutamakan meski tidak mempunyai kata kunci yang cocok																															
2020	Core Updates	Kelanjutan RankBrain																															
2020	Spam Updates	Mengutamakan situs yang menerapkan "ethical SEO"																															
2021	Product Reviews	Mengutamakan rivi u produk yang in-depth																															

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual													
	D	P			D	P												
			 <p>Jumlah Perubahan Kebijakan Algoritma Google</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Dengan demikian, perusahaan harus mengikuti perkembangan algoritma ini dan menyesuaikan strategi konten evergreen. Perubahan algoritma juga bisa mengubah jenis konten yang dianggap "evergreen." Selain itu, konten evergreen harus mudah dibaca, cepat dimuat, dan memiliki desain situs yang ramah pengguna agar tetap diutamakan oleh mesin pencari. <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan algoritma google sering berubah dan belum ada pegawai khusus yang memantau perubahan tersebut <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risiko ini diasumsikan berdampak negative pada laba kotor sebesar Rp. 10,46 miliar – dengan unit terdampak adalah Dept Kerjasama Konten, Dept. Komunikasi Strategis, dan Biro (asumsi perhitungan sama dengan risiko 1 dan 30% total pendapatan ketiga unit), dengan peluang sebesar 70% 	Tahun	Jumlah Perubahan	2020	1	2021	14	2022	10	2023	9	2024	6			
Tahun	Jumlah Perubahan																	
2020	1																	
2021	14																	
2022	10																	
2023	9																	
2024	6																	
RU-3	●	●	<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakpuasan Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap tata kelola PSO <p>Penjelasan:</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan auditor untuk menyajikan laporan keuangan yang memenuhi ekspektasi KKD 	●	●												

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Dua hal yang selama ini menjadi masalah tata kelola pelaksanaan PSO bidang Pers adalah proses keuangan (dari penganggaran, perhitungan beban pokok, hingga penyajian laporan keuangan) dan tata kelola distribusi berita PSO Dalam hal proses keuangan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) tidak puas terhadap penyusunan dan perhitungan beban pokok PSO yang berbeda dengan laporan keuangan audited tahun 2022. Auditor ANTARA pada saat itu hanya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan PSAK yang berlaku, sementara pihak KKD menuntut adanya laporan keuangan yang disesuaikan dengan perhitungan beban pokok dalam proses penganggaran. Sementara itu dari sisi distribusi, KKD sering melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara tiba-tiba dan meminta data bukti distribusi berita PSO di media-media daerah. Data-data tersebut seringkali sulit disediakan karena data-data tersebut (rekaman siaran TV, berita di koran, rekaman radio) disimpan secara manual oleh mitra distribusi. Selain itu, mitra distribusi juga masih belum terbiasa menyimpan data tersebut dengan geotagging yang dapat melacak lokasi penyiaran berita. <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan keuangan ANTARA belum dapat memenuhi ekspektasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Belum ada media penyimpanan dari mitra distribusi untuk bukti-bukti penyiaran yang mudah diakses <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risiko ini diperkirakan berdampak sekitar 20% dari pendapatan PSO (dikalikan GPM sebesar 30%) sebesar Rp 11,071 juta. Risiko ini juga mempengaruhi likuiditas perusahaan. Arus kas dari PSO akan dimulai 1 bulan setelah perjanjian kerja sama PSO ditandatangani yang diprediksi akan ditandatangani pada bulan Juli 2025. Yang berarti perusahaan terlambat menerima kas dari pendapatan PSO selama 8 bulan. Sementara itu probabilitas yang diasumsikan adalah 70% mengingat KKD sudah mengeluhkan persoalan laporan keuangan dan bukti distribusi yang dijelaskan di atas. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan aplikasi media penyimpanan bagi mitra distribusi yang mudah digunakan <p>KRI Jumlah keluhan Kementerian KDD</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 1 Hati-hati: 2 Bahaya: 3 		

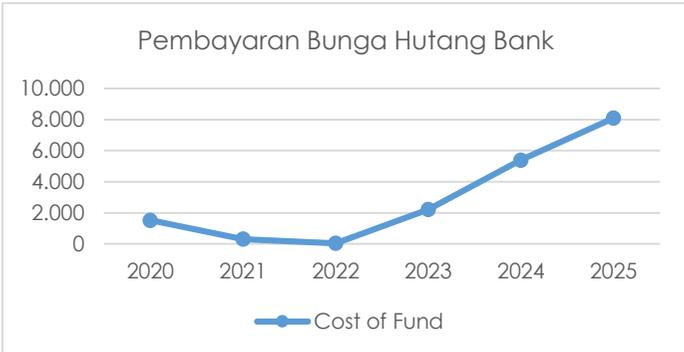
No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																																																								
	D	P			D	P																																																							
RU-4			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembengkakan defisit solvabilitas Dana Pensiun (dalam likuidasi) <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2025, Perusahaan akan melanjutkan proses pembubaran Dana Pensiun yang direncanakan selesai pada akhir tahun. Salah satu bagian dari proses pembubaran tersebut adalah penjualan asset investasi dan asset operasional yang dimiliki oleh Dana Pensiun untuk membayar manfaat sekaligus bagi para peserta. Perusahaan telah menjamin nilai asset investasi tersebut pada nilai wajar yang tercatat per tanggal 31 Desember 2023 (tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun). Jika asset investasi itu terjual pada nilai di bawah nilai wajar per 31/12/23, maka perusahaan harus menanggung selisihnya. Berikut adalah asset investasi yang tercatat dimiliki Dana Pensiun sampai September 24: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aset Investasi</th> <th>Nilai Des-23</th> <th>Nilai Sept-24</th> <th>Tingkat Risiko</th> <th>Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Berharga Negara</td> <td>10,149,093</td> <td>5,052,016</td> <td>Low</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tabungan pada Bank</td> <td>4,050,523</td> <td>36,251,482</td> <td>Low</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Deposito Berjangka/On Call</td> <td>5,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>Low</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Saham</td> <td>3,145,119</td> <td>2,140,499</td> <td>High</td> <td>535,125</td> </tr> <tr> <td>Obligasi</td> <td>61,749,623</td> <td>19,374,684</td> <td>High</td> <td>4,843,671</td> </tr> <tr> <td>Sukuk</td> <td>7,270,287</td> <td>2,174,124</td> <td>Low</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Unit Penyertaan Reksadana</td> <td>16,574,381</td> <td>7,513,377</td> <td>Medium</td> <td>1,652,943</td> </tr> <tr> <td>Penempatan Langsung</td> <td>4,684,155</td> <td>4,684,155</td> <td>High</td> <td>1,171,039</td> </tr> <tr> <td>Tanah dan Bangunan</td> <td>16,824,500</td> <td>16,824,500</td> <td>High</td> <td>4,206,125</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>129,447,681</td> <td>124,014,837*</td> <td></td> <td>12,408,902</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam ribu *Selisih terjadi karena pembayaran bulanan selama transisi ** Lebih besar dari 80% limit risiko</p> <p>Penyebab:</p>	Aset Investasi	Nilai Des-23	Nilai Sept-24	Tingkat Risiko	Risiko	Surat Berharga Negara	10,149,093	5,052,016	Low	0	Tabungan pada Bank	4,050,523	36,251,482	Low	0	Deposito Berjangka/On Call	5,000,000	30,000,000	Low	0	Saham	3,145,119	2,140,499	High	535,125	Obligasi	61,749,623	19,374,684	High	4,843,671	Sukuk	7,270,287	2,174,124	Low	0	Unit Penyertaan Reksadana	16,574,381	7,513,377	Medium	1,652,943	Penempatan Langsung	4,684,155	4,684,155	High	1,171,039	Tanah dan Bangunan	16,824,500	16,824,500	High	4,206,125	TOTAL	129,447,681	124,014,837*		12,408,902	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat perencanaan penjualan asset berisiko tinggi Memonitor selisih penjualan asset per bulan <p>KRI Selisih penjualan asset per bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: < Rp1 miliar Hati-hati: Rp1-3 miliar Bahaya: > Rp3 miliar 		
Aset Investasi	Nilai Des-23	Nilai Sept-24	Tingkat Risiko	Risiko																																																									
Surat Berharga Negara	10,149,093	5,052,016	Low	0																																																									
Tabungan pada Bank	4,050,523	36,251,482	Low	0																																																									
Deposito Berjangka/On Call	5,000,000	30,000,000	Low	0																																																									
Saham	3,145,119	2,140,499	High	535,125																																																									
Obligasi	61,749,623	19,374,684	High	4,843,671																																																									
Sukuk	7,270,287	2,174,124	Low	0																																																									
Unit Penyertaan Reksadana	16,574,381	7,513,377	Medium	1,652,943																																																									
Penempatan Langsung	4,684,155	4,684,155	High	1,171,039																																																									
Tanah dan Bangunan	16,824,500	16,824,500	High	4,206,125																																																									
TOTAL	129,447,681	124,014,837*		12,408,902																																																									

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																									
	D	P			D	P																								
			<ul style="list-style-type: none"> Beberapa jenis investasi berisiko tinggi untuk dijual pada tahun 2025, di antaranya adalah saham dan obligasi pada BUMN Karya Kebutuhan untuk mendapatkan cash yang cepat membuat nilai tanah/bangunan dan penempatan langsung berisiko turun dari nilai wajar <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, nilai risiko penurunan asset Dapen melebihi 80% dari limit risiko, Arus kas juga terdampak oleh risiko ini sebesar Rp. 12,4 miliar Probabilitas 70% 																											
RU-5			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak berlanjutnya kontrak pelanggan Bloomberg <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada akhir 2024 dan awal tahun 2025, sejumlah kontrak dengan pelanggan terminal data Bloomberg akan berakhir sehingga memunculkan tiga risiko yang saling berkaitan satu sama lain Pertama, terdapat risiko tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan-pelanggan tersebut. Kedua, nilai kontrak yang baru berpotensi turun dari nilai sebelumnya jika pelanggan tidak puas dengan layanan Antara. Ketiga, asumsi nilai tukar yang digunakan dalam kontrak baru tidak menguntungkan bagi perusahaan <table border="1" data-bbox="486 995 1339 1334"> <thead> <tr> <th>Pelanggan</th> <th>Akhir Kontrak</th> <th>Nilai Kontrak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bank Indonesia</td> <td>31/12/2024</td> <td>148.44</td> </tr> <tr> <td>PT Mineral Industri Indonesia</td> <td>31/01/2025</td> <td>1.53</td> </tr> <tr> <td>PT Pegadaian</td> <td>09/02/2025</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>PT Jasa Raharja</td> <td>18/07/2025</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>IFG Progress</td> <td>05/06/2025</td> <td>0.61</td> </tr> <tr> <td>PT Semen Indoensia Tbk</td> <td>31/01/2025</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>Feb - Sep 2025</td> <td>4.03</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Dalam miliar rupiah</i></p>	Pelanggan	Akhir Kontrak	Nilai Kontrak	Bank Indonesia	31/12/2024	148.44	PT Mineral Industri Indonesia	31/01/2025	1.53	PT Pegadaian	09/02/2025	0.58	PT Jasa Raharja	18/07/2025	0.58	IFG Progress	05/06/2025	0.61	PT Semen Indoensia Tbk	31/01/2025	0.54	Lainnya	Feb - Sep 2025	4.03	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memonitor progress pembaruan kontrak dan melibatkan Manajemen Risiko dalam proses reviu kontrak untuk memastikan asumsi nilai tukar yang digunakan telah mempertimbangkan risiko dua tahun ke depan <p>KRI</p> <p>Jumlah kontrak yang tidak diperpanjang</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: 0 Hati-hari: 1-2 (kecuali dengan Bank Indonesia) Bahaya: >2 (kecuali dengan BI) 		
Pelanggan	Akhir Kontrak	Nilai Kontrak																												
Bank Indonesia	31/12/2024	148.44																												
PT Mineral Industri Indonesia	31/01/2025	1.53																												
PT Pegadaian	09/02/2025	0.58																												
PT Jasa Raharja	18/07/2025	0.58																												
IFG Progress	05/06/2025	0.61																												
PT Semen Indoensia Tbk	31/01/2025	0.54																												
Lainnya	Feb - Sep 2025	4.03																												

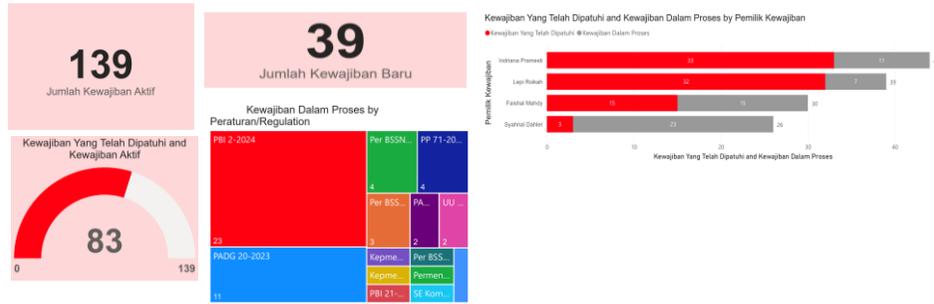
No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrak dengan pelanggan Bloomberg bernilai besar akan berakhir <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dampak inheren yang diasumsikan dalam risiko ini adalah 20% dari nilai kontrak sebelumnya (dikalikan GPM 30%), atau sekitar Rp 8,872 juta. Sementara itu probabilitas yang diperkirakan adalah 50% 			
RU-6			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegagalan mitra kolokasi menjaga sistem aplikasi tetap berjalan <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberlangsungan server Perusahaan saat ini bergantung pada layanan mitra kolokasi moratel yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta. Kontrak dengan moratel saat ini tidak mempunyai services level agreement sehingga perusahaan tidak bisa memonitor Tingkat layanan moratel dan tidak dapat melakukan apapun jika terjadi masalah pada mitra. Situasi pada poin di atas pernah terjadi pada tahun 2024 saat moratel terkena dampak dari serangan terhadap data center nasional sementara. Pada saat itu, aplikasi kunci perusahaan – SP2MT yang merupakan platform bagi Direktorat Pemberitaan untuk memproduksi berita dan AIS 2.0 yang merupakan aplikasi keuangan – berhenti selama lebih dari tiga jam. Risiko ini semakin besar karena perusahaan belum sepenuhnya mempunyai disaster recovery plan yang layak – sesuai dengan penilaian diagnostic ICOFR pada 2024. <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrak dengan mitra kolokasi tidak mempunyai SLA Perusahaan belum mempunyai DRP yang layak <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dampak inheren terburuk diperkirakan dari risiko ini adalah Infrastruktur vital (aplikasi kunci) yang penting tidak berfungsi selama lebih dari 6 jam Sementara itu, probabilitas yang diperkirakan adalah 70% 	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembaruan kontrak dengan Moratel dengan memasukkan SLA Menyusun dan melaksanakan DRP <p>KRI Tingkat pemenuhan SLA oleh mitra kolokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: >90% Hati-hati: 70-90% Bahaya: <70% 		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																					
	D	P			D	P																				
RU-7			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurang sesuai kompetensi AE dengan produk IMCS <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Departemen dengan target pendapatan terbesar pada 2025 – setelah KSO Bloomberg – adalah Layanan Komunikasi Strategis. Dept LKS akan berfokus pada layanan berbasis event yang membutuhkan account executive khusus yang berpengalaman dan punya jejaring yang kuat di bidangnya. Saat ini, perusahaan belum mempunyai kualifikasi tersebut. Di sisi lain, produk berbasis event juga akan dikembangkan di biro provinsi – yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapatkan pertumbuhan signifikan sebesar 20%. Namun demikian, Sebagian besar tenaga pemasaran di biro sudah berusia hamper pension dan tidak mempunyai pengalaman dalam memasarkan produk tersebut. <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum sesuai kualifikasi AE baik di pusat maupun biro dengan focus produk yang menjadi focus pada 2025 Kurangnya pelatihan yang relevan bagi AE di pusat maupun biro daerah <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Departemen</th> <th>Target Pendapatan</th> <th>Asumsi Penurunan</th> <th>Risiko Pendapatan</th> <th>Dampak Laba Kotor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Layanan Komunikasi Strategis</td> <td>42.0</td> <td>20%</td> <td>8.4</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>Biro Provinsi</td> <td>38.5</td> <td>20%</td> <td>7.7</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>80.6</td> <td></td> <td>16.1</td> <td>4.8*</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam miliar *57% limit risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, dampak risiko inheren yang muncul dari risiko ini adalah Rp 4,821 juta atau 57% dari limit risiko Sementara itu, probabilitas yang diasumsikan adalah 70% karena kondisi AE yang dipunyai saat ini memang belum sesuai dengan kebutuhan tahun 2025 	Departemen	Target Pendapatan	Asumsi Penurunan	Risiko Pendapatan	Dampak Laba Kotor	Layanan Komunikasi Strategis	42.0	20%	8.4	2.5	Biro Provinsi	38.5	20%	7.7	2.3	Total	80.6		16.1	4.8*	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Merekrut AE baru dengan kualifikasi yang dibutuhkan Memberikan pelatihan insentif kepada AE yang ada <p>KRI</p> <p>Deviasi negative realisasi dengan target pendapatan per triwulan</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: <= 5% Hati-hati: 6-9% Bahaya: >= 10% 		
Departemen	Target Pendapatan	Asumsi Penurunan	Risiko Pendapatan	Dampak Laba Kotor																						
Layanan Komunikasi Strategis	42.0	20%	8.4	2.5																						
Biro Provinsi	38.5	20%	7.7	2.3																						
Total	80.6		16.1	4.8*																						

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
RU-8			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inefisiensi Pembiayaan Operasional dengan Beban Bunga Pinjaman <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risiko ini muncul akibat penggunaan dana pinjaman bank yang semakin besar untuk membiayai kegiatan operasional, yang mengakibatkan kenaikan pembayaran bunga secara signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun metrik debt to EBITDA menunjukkan rasio pinjaman terhadap laba yang masih dalam batas aman, biaya bunga yang terus meningkat bisa menjadi beban tambahan yang tidak langsung meningkatkan profitabilitas proyek. Pengabaian biaya bunga dalam perhitungan struktur Harga Pokok Produksi (HPP) perusahaan dapat membuat perusahaan kurang kompetitif dalam menentukan harga jual yang mencerminkan biaya keseluruhan. Dalam jangka panjang, tren peningkatan pembayaran bunga ini dapat mengurangi margin laba bersih perusahaan jika hasil operasional tidak sebanding dengan beban bunga yang dikeluarkan. Efeknya, meskipun perusahaan tetap mampu membayar bunga berdasarkan posisi EBITDA, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas positif dan menumbuhkan nilai perusahaan dapat terdampak negatif. Kondisi ini juga bisa berdampak pada posisi likuiditas perusahaan, yang semakin rentan jika terjadi penurunan kinerja operasional atau pergerakan suku bunga yang tidak menguntungkan. Jika biaya bunga tidak diperhitungkan dalam HPP, perhitungan keuangan perusahaan mungkin memberikan gambaran profitabilitas yang kurang akurat, berisiko menimbulkan overestimasi pada arus kas masa depan dan proyeksi laba. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan manajemen yang tidak optimal, seperti penetapan harga produk yang tidak cukup menguntungkan atau alokasi dana untuk proyek-proyek yang kurang strategis. Sejak tahun 2022, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah, pembayaran bunga bank terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan naik menjadi lebih dari Rp 8 miliar pada 2025. 	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasukkan biaya bunga dalam struktur HPP, sehingga harga jual bisa disesuaikan dengan lebih akurat Memonitor Tingkat Kesehatan pinjaman <p>KRI Tingkat interest bearing debt to EBITDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: < 1.00 hati-hati: 1.00 – 1.2 Bahaya: > 1.2 		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			 <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum diperhitungkannya biaya bunga pinjaman bank atas HPP Perusahaan <p>Dampak dan probabilitas inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margin laba yang menurun karena tingginya biaya bunga yang tidak ditransfer ke biaya produksi. Selain itu, dapat terjadi penurunan likuiditas perusahaan yang bisa berdampak pada ketersediaan dana untuk pengeluaran strategis lain. • Penurunan arus kas Rp. 600 juta di akhir tahun • Dampak Finansial : Rp. 4 miliar • Probabilitas : 70% 			
RU-9	●	●	<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelemahan nilai rupiah terhadap dollar <p>Penjelasan:</p>	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan analisa pasar keuangan dan makroekonomi untuk Fungsi Keuangan dan Manajemen Risiko <p>KRI</p>	●	●

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual	
	D	P			D	P
			<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki kerja sama operasi dengan Bloomberg, yang mencakup operasional dan pemasaran produk Bloomberg di Indonesia. Pelanggan yang diperoleh oleh Perusahaan melakukan pembayaran dalam mata uang Rupiah (IDR), sementara Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan tagihan pelanggan tersebut kepada Bloomberg dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Kondisi ini menyebabkan Perusahaan terpapar risiko fluktuasi pasar valuta asing. Pada tahun 2023, struktur beban pokok penjualan (HPP) Perusahaan yang menggunakan dollar mencapai 29% HPP Perusahaan. Hal tersebut bernilai sebesar 6,3 juta USD atau setara dengan Rp. 97 Miliar. Sedangkan dari sisi struktur pendapatan, pendapatan dalam USD hanya 8% dari total pendapatan. Hal tersebut bernilai 2,6 juta USD atau setara dengan Rp. 40 miliar. Karena beban dalam USD lebih besar nilainya dibanding pendapatan dalam USD, maka pendapatan yang masuk tidak bisa menutupi kebutuhan perusahaan untuk membayar beban tersebut kepada Bloomberg. Disamping itu nilai tukar rupiah pada tahun 2024 ini sangat beresiko tinggi karena sangat berfluktuasi. Pada awal Januari 2024, nilai USD terhadap rupiah ada pada Rp. 15.395,- dan meningkat hingga puncaknya pada bulan juni dengan nilai Rp. 16.445,- lalu rupiah menguat dan saat ini berada pada nilai Rp. 15.485,-. <p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik dunia <p>Dampak dan Probabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dampak yang diperkirakan dari risiko ini adalah sekitar Rp 655.1 juta Sementara probabilitas yang diasumsikan adalah 70% 	<p>Jumlah kerugian selisih nilai tukar akibat hedging</p> <ul style="list-style-type: none"> Aman: Rp.50 juta Hati-hati: Rp.100 juta Bahaya: Rp.200 juta 		
RU-10			<p>Peristiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencabutan izin usaha PT AETP oleh BI <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Antara ETP sebagai anak usaha ANTARA bergerak dalam industry penyediaan electronic trading platform yang merupakan industry highly regulated Selain itu, Bank Indonesia dan OJK sebagai regulator sering kali mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh PT AETP dengan masa peralihan yang singkat sehingga sulit untuk dipenuhi secara tepat waktu Risiko ketidak patuhan ini berpotensi akan membuat PT AETP kehilangan izin berusaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 	<p>Perlakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menggunakan software compliance tracker untuk membantu mendeteksi peraturan, pembuatan compliance register, dan monitoring kinerja kepatuhan secara efektif 		

No	Inheren		Penjelasan	Rencana Perlakuan Risiko	Residual																																										
	D	P			D	P																																									
			 <p>139 Jumlah Kewajiban Aktif</p> <p>39 Jumlah Kewajiban Baru</p> <p>83 Kewajiban Yang Telah Dipatuhi and Kewajiban Aktif</p> <p>Kewajiban Dalam Proses by Peraturan/Regulation</p> <table border="1"> <tr><td>Per BSSN</td><td>4</td></tr> <tr><td>PP 71-20...</td><td>4</td></tr> <tr><td>Per BSS</td><td>4</td></tr> <tr><td>PA...</td><td>2</td></tr> <tr><td>UU...</td><td>2</td></tr> <tr><td>Keptme</td><td>2</td></tr> <tr><td>Per BSS</td><td>2</td></tr> <tr><td>Keptme</td><td>2</td></tr> <tr><td>Parlemen...</td><td>2</td></tr> <tr><td>PBI 21...</td><td>2</td></tr> <tr><td>St. Kom...</td><td>2</td></tr> <tr><td>PADG 20-2023</td><td>23</td></tr> <tr><td>PBI 2-2024</td><td>23</td></tr> </table> <p>Kewajiban Yang Telah Dipatuhi and Kewajiban Dalam Proses by Pemilik Kewajiban</p> <table border="1"> <tr><th>Pemilik Kewajiban</th><th>Kewajiban Yang Telah Dipatuhi</th><th>Kewajiban Dalam Proses</th></tr> <tr><td>Indonesia Promesat</td><td>18</td><td>11</td></tr> <tr><td>Lap Rahan</td><td>32</td><td>7</td></tr> <tr><td>Faktor Marjo</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>Syntex Daras</td><td>7</td><td>25</td></tr> </table>	Per BSSN	4	PP 71-20...	4	Per BSS	4	PA...	2	UU...	2	Keptme	2	Per BSS	2	Keptme	2	Parlemen...	2	PBI 21...	2	St. Kom...	2	PADG 20-2023	23	PBI 2-2024	23	Pemilik Kewajiban	Kewajiban Yang Telah Dipatuhi	Kewajiban Dalam Proses	Indonesia Promesat	18	11	Lap Rahan	32	7	Faktor Marjo	16	16	Syntex Daras	7	25	<p>KRI Dikenakannya teguran atau sanksi kepada Antara ETP karena tidak memenuhi kepatuhan dari Bank Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aman: 0 sanksi/teguran • Hati-hati: 1 sanksi/teguran • Bahaya: 2 sanksi/teguran 		
Per BSSN	4																																														
PP 71-20...	4																																														
Per BSS	4																																														
PA...	2																																														
UU...	2																																														
Keptme	2																																														
Per BSS	2																																														
Keptme	2																																														
Parlemen...	2																																														
PBI 21...	2																																														
St. Kom...	2																																														
PADG 20-2023	23																																														
PBI 2-2024	23																																														
Pemilik Kewajiban	Kewajiban Yang Telah Dipatuhi	Kewajiban Dalam Proses																																													
Indonesia Promesat	18	11																																													
Lap Rahan	32	7																																													
Faktor Marjo	16	16																																													
Syntex Daras	7	25																																													
			<p>Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulator sering mengeluarkan peraturan untuk industri penyediaan layanan electronic trading platform yang masih baru • Unit kerja kepatuhan di PT AETP berpotensi tidak melakukan regulatory surveillance secara tepat waktu • PT AETP belum memiliki reg-tech yang dapat mendeteksi adanya peraturan baru yang wajib diikuti <p>Dampak dan Pribabilitas Inheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulator memberlaku-kan sanksi signifikan (pencabutan izin usaha). • Sementara itu probabilitas yang diperkirakan adalah 90% 																																												

Tabel 9.18 Penjelasan Rencana Perlakuan Risiko

No	Strategi	Risiko Bisnis	Risiko Pemberitaan	Risiko Keuangan	Risiko Keselamatan Kerja	Risiko Hukum & Kepatuhan	Risiko Teknologi Informasi
Inisiatif Bisnis							
1	Peningkatan kualitas berita untuk mencerdaskan bangsa		1. Kegagalan adaptasi dengan perubahan kebijakan mesin pencari.			2. Ketidakpuasan Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap Tata Kelola PSO	
2	Pengembangan bisnis dan layanan ke pelosok Nusantara	3. Penurunan Produktivitas pegawai komersil, pemberitaan dan biro 4. Tidak berlanjutnya kontrak pelanggan Bloomberg		5. Inefisiensi pembiayaan operasional dengan beban bunga pinjaman		6. Pencabutan izin usaha PT AETP oleh BI	
Inisiatif Enabler							
1	Penguatan reputasi Korporasi dan pemantapan tata kelola perusahaan			7. Pembengkakan defisit solvabilitas Dana Pensiun 8. Pelemahan nilai rupiah terhadap dollar			9. Kegagalan mitra kolokasi menjaga sistem aplikasi tetap berjalan
2	Mempersiapkan talenta perusahaan berwawasan digital dan berdaya saing	10. Kurang sesuai kompetensi AE dengan produk IMCS					

Tabel 9.19 Sebaran Risiko Utama pada Strategi Perusahaan 2025

8. Rencana Penyusunan *Contingency Plan*

Perusahaan akan menyusun *Contingency Plan*, dengan ketentuan isi sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif;
2. Gambaran umum Perusahaan yang meliputi:
 - a. Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai:
 - i. Profil legalitas perusahaan,
 - ii. Visi misi,
 - iii. Kepemilikan,
 - iv. Struktur kepengurusan dan organisasi,
 - v. Aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri,
 - vi. Rencana bisnis,
 - vii. Strategi pengelolaan risiko,
 - viii. Anak perusahaan;
 - b. Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria:
 - i. berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba,
 - ii. menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi,
 - iii. tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan,
 - iv. berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada,
 - v. melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - c. Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan ultimate shareholders dan perusahaan terelasi (sister company);
 - d. Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan keuangan intra-group) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - e. Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset Perusahaan.
3. Strategi rencana aksi (*recovery plan*) dan opsi pemulihan (*recovery options*) serta opsi resolusi (*resolution plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) yang meliputi:
 - a. Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) meliputi indikator operasional, indikator keuangan, dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan;
 - b. Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (*trigger level*) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) untuk tujuan:
 - i. pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik,

- ii. pemulihan sehingga perusahaan tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketetapan,
 - iii. perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha;
 - c. Kajian opsi pemulihan (*recovery options*) dilakukan berdasarkan:
 - i. urutan pilihan,
 - ii. penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan,
 - iii. penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan,
 - iv. penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan,
 - v. efektivitas dari setiap opsi pemulihan;
 - d. Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi:
 - i. penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan,
 - ii. analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi hambatan,
 - iii. penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
 - e. Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (*default*) atau pailit, wajib menetapkan antara lain:
 - i. trigger level terjadinya resolusi,
 - ii. opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain,
 - iii. opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritikal dalam menjalankan operasional;
 - f. Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit:
 - i. analisis mengenai potensi hambatan,
 - ii. penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi pemulihan dan opsi resolusi.
4. Strategi pengungkapan rencana aksi (*recovery plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen, dan kerangka komunikasi.

Contingency Plan yang akan disusun akan melewati persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan dan akan disampaikan pada Triwulan II 2025 kepada Kementerian BUMN.

9. Rencana Pelaksanaan Roadmap ICoFR

Perusahaan telah melakukan Diagnostic ICoFR pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan pihak eksternal yaitu Parker Russel Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 66 risiko (gap) dalam proses laporan keuangan dengan 86 inisiatif perbaikan – yang rencananya akan dilakukan dari kuartal ketiga tahun ini sampai dengan kuartal keempat tahun 2026. Rincian dari pelaksanaan roadmap ICoFR tersebut dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tingkat Pengendalian	Jumlah Gap	Inisiatif Perbaikan	Target Penyelesaian Inisiatif Perbaikan (dalam Jumlah)						
			2024		2025				2026
			Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
ELC	14	18	1	11	4	1	-	-	1
PLC	35	35	-	20	2	2	11	-	-
ITGC	17	33	-	13	9	9	2	-	-

10. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian RMI

Pada tanggal 17 Oktober 2024 perusahaan telah menyelesaikan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (RMI) tahun 2023 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari penilaian RMI tersebut adalah 'Fase Berkembang (+)' dengan skor "2,63".

Berikut rencana tindak lanjut dari hasil rekomendasi penilaian RMI:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Menyusun kebijakan untuk melaksanakan evaluasi atas peningkatan Budaya Risiko termasuk mekanisme mendorong pegawai memberikan masukan untuk pengembangan program budaya risiko.	Membuat kebijakan terkait Budaya Risiko.
2	Meninjau kurikulum pengembangan budaya risiko dan peningkatan keahlian risiko secara rutin dan formal berdasarkan kebutuhan pelatihan pegawai, serta melalui proses pembaruan setiap tahun untuk memastikan kualitasnya dan diperbarui agar sesuai dengan risiko-risiko utama dan praktik terbaik Manajemen Risiko (misal terus diperbarui dengan standar internasional terkini)	Membuat roadmap pengembangan budaya risiko dan peningkatan keahlian risiko yang akan dievaluasi setiap tahunnya.
3	Mengusulkan Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) huruf (e) Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023, yakni pemisahan fungsi Direktur Keuangan dengan Direktur Manajemen Risiko	Mengusulkan perubahan Struktur Organisasi agar memisahkan Direktur Fungsi keuangan dengan Fungsi Manajemen Risiko.
4	Menyusun Kebijakan Ambang batas materialitas atau kriteria yang jelas dari isu-isu terkait risiko atau permasalahan atau transaksi yang perlu dieskalasikan ke Dewan Pengawas yang implikasi strategis yang signifikan bukan hanya permasalahan berdampak/bernilai besar.	Memperbarui pedoman Manajemen Risiko dengan menambahkan kebijakan ambang batas materialitas atau kriteria yang jelas dari isu-isu terkait risiko atau permasalahan atau transaksi yang perlu diekskalasikan ke Dewan Pengawas.
5	Mengusulkan pembentukan tim audit khusus, yang bertanggung jawab mengawasi dan terus memonitor risiko-risiko yang berkembang (missal IT audit) untuk mendukung upaya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan.	Merencanakan dan mengusulkan pembentukan tim audit khusus yang bertanggung jawab mengawasi dan memonitor risiko-risiko yang berkembang.
6	Agar Direksi membuat kebijakan yang mewajibkan pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan.	Memperbarui Pedoman Manajemen Risiko dengan menambahkan kebijakan pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk prosedur-prosedur Manajemen risiko dan Penetapan Batasan.

7	Agar Perum LKBN ANTARA mengusulkan pembentukan Tim Sentral yang khusus berfokus pada strategi transversal dan terkonsolidasi.	Mengajukan/mengusulkan pembentukan Tim Sentral yang berfokus pada strategi transversal dan terkonsolidasi.
8	Memperbarui Pedoman Manajemen Risiko yang memuat penilaian keefektifan Tata Kelola Risiko Tiga Lini diuji secara berkala untuk mengetahui adanya kesenjangan, duplikasi, atau ketidakkonsistenan dalam peran dan tanggung jawab guna memastikan optimalisasi penerapannya.	Memperbarui Pedoman Manajemen Risiko dengan menambahkan penilaian keefektifan Tata Kelola Risiko Tiga Lini yang diuji secara berkala.
9	Agar Perum LKBN mempertimbangkan untuk menetapkan KPI Risiko pada seluruh unit bisnis di Perum LKBN ANTARA.	Menyusun KPI seluruh unit bisnis berdasarkan Risiko yang menempel pada unit bisnis tersebut.
10	Agar melakukan internal control testing dan stress testing secara berkala.	Memperbarui Pedoman Manajemen Risiko dengan penambahan Internal Control Testing dan Stress Testing yang dilakukan secara berkala.
11	Menyelaraskan strategi pelaksanaan Audit Intern Perum LKBN ANTARA dan PT Antara ETP sehingga monitoring tindak lanjut dapat dilaksanakan secara menyeluruh.	Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) baik Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
12	Fungsi assurance agar bertugas untuk memastikan bahwa manajemen dan kontrol risiko dilakukan secara efektif.	Memasukkan audit manajemen risiko kepada PKPT.
13	LKBN ANTARA agar mengesahkan Roadmap ERM	Mengajukan persetujuan Roadmap ERM.
14	Agar lini kedua melakukan Pemutakhiran Rencana transformasi ERM yang mencakup semua inisiatif dan mendetail (misal lini masa, keperluan sumber daya, pengawasan program, dan sebagainya)	Memperbarui Roadmap ERM dengan sumberdaya yang dibutuhkan dari tiap program-program yang telah direncanakan.
15	Menyesuaikan rencana darurat (<i>contingency plan</i>) dalam kondisi terburuk (<i>worst case scenario</i>) yang memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab yang jelas seperti rantai komando dalam kondisi krisis. • Menyusun rencana yang dapat ditindaklanjuti mulai dari langkah langkah, trigger point, nilai ambang batas, dan langkah terkait keberlanjutan serta manajemen krisis. • Prosedur dokumentasi mengenai rencana manajemen krisis. 	Membuat <i>contingency plan</i> .
16	Menyesuaikan Taksonomi perusahaan dengan taksonomi yang ditetapkan Kementerian BUMN	Melakukan penyesuaian Taksonomi Risiko Perusahaan dengan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

	dan menetapkan taksonomi risiko beserta definisi dan aturan klasifikasinya di dalam RKAP.	
17	<p>Melakukan pemutakhiran metode penilaian risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan metode kualitatif yang melibatkan opini dari pakar. • Evaluasi kesesuaian metode asesmen setidaknya selama setahun. • Metode penilaian risiko yang dilakukan secara otomatis. 	Memperbarui prosedur Manajemen Risiko penilaian risiko.
18	Pemutakhiran aplikasi Manajemen Risiko yang memiliki fitur advance analytics.	Membuat aplikasi Manajemen Risiko dengan fitur Advance Analytics.
19	Pemutakhiran Data Risiko agar mencakup data risiko dari perusahaan induk dan anak perusahaan dengan matriksterstandar.	Melakukan konsolidasi data risiko Perusahaan dengan anak Perusahaan.

11. Tagging Program Kerja dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Pada tahun 2024, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Salah satu isi dari undang-undang tersebut adalah Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 misi Pembangunan yaitu:

- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan

Dalam proses pencapaian misi tersebut Pemerintah Republik Indonesia merumuskan 17 Arah (Tujuan) Pembangunan yang dirumuskan dalam gambar di bawah.



Dalam mendukung Pembangunan Nasional, perusahaan telah merencanakan beberapa program kerja. Berikut program kerja perusahaan yang berhubungan dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional:

No	Sasaran Usaha	Nama Program Kerja/Kegiatan Usaha	Keterangan (MRPN/Non MRPN)	Kategori Misi dalam MRPN
1	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan saluran distribusi berita anti hoax • Tingkat kelolosan produk berita PSO sebesar 85% • Berita anti hoax 	Peningkatan Kualitas Berita Untuk Mencerdaskan Bangsa	MRPN	<ul style="list-style-type: none"> • IE2 • IE4 • IE6 • IE10 • IE11 • IE12
2	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyerapan investasi sebesar 70% • EBITDA sebesar Rp. 61,93 Miliar 	Pengembangan Bisnis dan Layanan ke Pelosok Nusantara:	MRPN	<ul style="list-style-type: none"> • IE6

No	Sasaran Usaha	Nama Program Kerja/Kegiatan Usaha	Keterangan (MRPN/Non MRPN)	Kategori Misi dalam MRPN
		<ul style="list-style-type: none"> Layanan Korporasi Media Layanan Informasi Finansial PT Antara ETP Layanan Media dan Komunikasi Layanan Pendidikan dan MICE 		
3	<ul style="list-style-type: none"> Rasio pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko sebesar 90% 	Penguatan Reputasi Korporasi dan Pemantapan Tata Kelola Perusahaan	MRPN	<ul style="list-style-type: none"> IE9
4	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas pelatihan peningkatan kompetensi SDM berbasis Digital sebesar 85% 	Penguatan Talenta Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> Top Talenta Muda dan Perempuan Respectful Workplace Policy Digital Talent Employee Wellbeing Program Perbaikan Sistem dan Tata Kelola SDM 	MRPN	<ul style="list-style-type: none"> IE3
5	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi tindak lanjut roadmap Dana Pensiun EBITDA sebesar Rp. 61,93 Miliar 	Pengalihan Dana Pensiun LKBN ANTARA dari DPPK ke DPLK	Non MRPN	

12. Program Kerja Manajemen Risiko

No	Program Kerja	Q1			Q2			Q3			Q4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Piagam Dewan Pengawas & Komite												
2	Piagam Direksi												
3	Internalisasi Budaya Risiko dalam budaya perusahaan												
	A Kebijakan Budaya Risiko												
	B Sosialisasi Budaya Risiko												
	a. Banner Budaya Risiko												
	b. Infografis Budaya Risiko												
	c. Video Budaya Risiko												
	d. Diskusi Tatap Muka dengan Unit												
	C Pelatihan Budaya Risiko												
	D TownHall Budaya Risiko												
	E Survei Budaya Risiko												
4	Risk Maturity Index oleh Interval												
5	SOP Eskalasi Risiko												
6	Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko terintegrasi												
7	Pelatihan Manajemen Risiko												
8	Sertifikasi Manajemen Risiko												
9	Internal Testing Control												
10	Stress Test												
11	Rapat Triwulan Dengan Komite												
12	Evaluasi Tata Kelola Risiko Tiga Lini												
13	Kajian Ulang Selera Risiko												
14	Laporan Manajemen Risiko Bulanan ke Direksi												
15	Laporan Manajemen Risiko TW kepada Dewas												
16	Rapat Penyusunan Strategi Risiko Tahunan												
17	Penyampaian Risiko Utama Kepada Manajemen												
18	Rapat TW terkait Kepatuhan												
19	Evaluasi Kepatuhan												
20	Rencana Darurat/Contingency plan												
21	Evaluasi Peran MR dalam pencapaian target RKAP												
22	Pembahasan selera dan strategi risiko kepada K-BUMN												

No	Program Kerja	Q1			Q2			Q3			Q4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyampaian Pengukuran Risiko Kepada Unit												
24	Penanganan ketidaksesuaian antara eksposur risiko aktual dan selera												
25	Validasi Model Risiko												
26	Inisiatif Perbaikan ICoFR												
27	Penyusunan Pedoman Investasi												
28	Penetapan Ruang Lingkup ICOFR												
29	Penyusunan dan Perbaikan Business Process Mapping untuk ICOFR												
30	Identifikasi Risiko dan Pengendalian Eksisting untuk ICOFR												
31	Validasi Rancangan Pengendalian ICOFR												

Tabel 9.19 Program Kerja

13. Rencana Kerja Internal Audit 2025

Departemen	Program Kerja 2025	Waktu Pelaksanaan												Biaya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Audit Keuangan & Operasional	Monev Piutang (Divisi Keuangan)													
	Audit Asset (Divisi Keuangan)													
	Audit/Monev PSO (Auditee: Korbiso)													
	Audit Dit Komersial, Pengembangan Bisnis dan TI													
	Audit Biro													250,000,000
	Audit Risiko Perusahaan Reguler													
	Audit Program Pengendalian Risiko Utama													
	Monev Kinerja Perusahaan 2024													
	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Internal													
	Audit PT AETP													
	Asesmen Eksternal GCG												50,000,000	
	Asesmen ICORPAX (bila ditugaskan)												25,000,000	

Departemen	Program Kerja 2025	Waktu Pelaksanaan												Biaya
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GCG dan Pengawasan Khusus	Asesmen Kematangan Risiko Perusahaan (RMI)													30,000,000
	Tindak Lanjut Temuan BPK RI													
	Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal lainn													
	Pelaksanaan Pemantauan WBS dan Pengendalian Gratifikasi													
	Mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016													80,000,000
	Buat Kesisteman Anti Fraud (konsultan)													
	Rapat Kerja (Perencanaan & Evaluasi Divisi) SPI 2024													25,000,000
	Peningkatan <i>Quality Assurance</i>													100,000,000
	Pelatihan SDM SPI													
		Total Biaya												460,000,000

14. Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi

Saat ini Perum LKBN Antara termasuk kedalam kategori BUMN Individu dengan Klasifikasi Risiko Sistemik B yang berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara tidak memerlukan komite Tata Kelola Terintegrasi.

Saat ini perusahaan belum mempertimbangkan perlunya kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Namun Perusahaan sedang melakukan finalisasi terhadap Corporate Charter yang mengatur hubungan antara induk dan anak, yang dapat menjadi awal kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

BAB XII ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

Bab ini menguraikan aspirasi pemegang saham kepada Perum LKBN ANTARA berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S-468/MBU/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN

- a. Kebijakan strategi risiko BUMN wajib menyesuaikan dengan kebijakan strategi risiko portofolio Kementerian BUMN berdasarkan pengambilan sikap risiko yang tepat dalam konteks masing-masing BUMN
- b. Kebijakan strategi risiko BUMN ditempatkan pada urutan sebelum menetapkan sasaran dan strategi usaha
- c. Adapun artikulasi kebijakan strategi risiko portofolio Kementerian dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN adalah sesuai dengan *Risk Appetite Statement (RAS)* sebagai berikut:

Sikap terhadap risiko	Pernyataan selera risiko (Risk Appetite Statement"RAS") Portofolio Kementerian BUMN
Tidak Toleran	<p>Kemertrian BUMN tidak memberikan ruang bagi BUMN melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi</p> <p>Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintergrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan prudent serta menjunjung tinggi core value AKHLAK</p> <p>Kementerian BUMN berkomitmen memenuhi target pembayaran deviden BUMN kepada Negara sesuai dengan target yang ditetapkan dalam undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN)</p>
Konservatif	<p>Kementerian BUMN mendukung BUMN untuk mengerjakan penugasan Pemerintah dalam bentuk protek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari</p>

Sikap terhadap risiko	Pernyataan selera risiko (Risk Appetite Statement "RAS") Portofolio Kementerian BUMN
	<p>Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperoleh margin yang wajar</p> <p>Kementerian BUMN mewajibkan BUMN mematuhi pemenuhan kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan</p> <p>Kementerian BUMN memandatkan BUMN berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya dengan kualitas terbaik serta menjaga aspek ESG</p>
Moderat	Kementerian BUMN mendorong BUMN yang terdampak langsung terhadap volatilitas pasar dan makroekonomi untuk dimonetisasi melalui pengelolaan yang prudent dan terukur
Strategis	<p>Kementerian BUMN mendorong BUMN Secara aktif dengan pertimbangan kalkulasi risiko yang matang sepadan dengan nilai kembalian investasi (return) untuk menciptakan nilai melalui transformasi yang tidak terbatas pada inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio dan pertumbuhan anorganik</p> <p>Kementerian BUMN mendorong BUMN mengoptimalkan sumber daya idle atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur</p>

2. Strategi risiko BUMN

Strategi risiko BUMN wajib disusun mengikuti Petunjuk Teknis Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 dengan catatan sebagai berikut:

- Metrik strategi risiko BUMN merupakan metrik penerimaan risiko yang dirancang sebagai dasar penyusunan RKAP tahun 2025, wajib disusun berdasarkan permodelan risiko (risk modelling) untuk mengidentifikasi parameter yang berkualitas dalam menetapkan batasan risiko (risk limit) sesuai dengan pengambilan sikap risiko dalam RAS;
- Nilai batasan risiko (risk limit) wajib disusun dengan mempertimbangkan kapabilitas internal (internal capabilities) dan tantangan eksternal (*external challenges*) yang akan dieksploitasi menjadi suatu peluang (*opportunity*) sebagai mesin pertumbuhan masa depan;

- BUMN yang saat ini memiliki kinerja yang sehat dan telah menjadi market leader, didorong untuk mencari peluang pasar baru dengan mengembangkan kompetensi baru;
- BUMN yang saat ini memiliki kinerja yang sehat dan belum menjadi market leader, didorong untuk me-leverage peluang pasar eksisting dengan mengoptimalkan kompetensi yang ada saat ini atau membangun (*build*) kompetensi baru untuk memperbesar market share
- BUMN yang saat ini memiliki kinerja yang kurang sehat, agar me-leverage kemampuan eksisting melalui *operational excellence* untuk meningkatkan penetrasi pasar
- BUMN wajib menerapkan tata kelola risiko secara efektif sesuai dengan ketentuan PER-2/MBU/03/2023 berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko BUMN. Perum LKBN ANTARA masuk ke dalam kategori Sistemik B.
- BUMN sistemik B wajib menyusun rencana darurat (*contingency plan*) sebagai dokumen terpisah dari RKAP dengan ketentuan penyusunan sebagai berikut:
 - a. Direktur risiko wajib menyusun rencana darurat (*contingency plan*) secara realistis dan komprehensif paling sedikit memuat:
 - i. Ringkasan eksekutif
 - ii. Gambaran umum perusahaan paling sedikit meliputi:
 - (a) Kondisi dan profil perusahaan paling sedikit mengenai: [i] profil legalitas perusahaan, [ii] visi misi, [iii] kepemilikan, [iv] struktur kepengurusan dan organisasi, [v] aktivitas bisnis utama dan penunjang serta jaringan kantor baik dalam dan luar negeri; [vi] rencana bisnis; [vii] strategi pengelolaan risiko, [viii] anak perusahaan
 - (b) Jaringan kantor dan anak perusahaan yang dicantumkan adalah yang memiliki salah satu kriteria: [i] berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba; [ii] menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan secara konsolidasi; [iii] tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap perusahaan, [iv] berperan penting bagi stabilitas sektor industri BUMN berada; [v] melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis perusahaan;
 - (c) Struktur korporasi anak perusahaan menguraikan struktur usaha termasuk kepemilikan sampai dengan ultimate shareholders dan perusahaan terelasi (*sister company*);
 - (d) Keterkaitan usaha di dalam perusahaan baik secara intra-group (yang menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal dan kesepakatan dukungan intra-group) maupun secara eksternal (yang menguraikan eksposur, kewajiban produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama);
 - (e) Analisis skenario dampak kondisi stress yang terjadi baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*) terhadap kondisi bisnis dan kualitas aset perusahaan

- iii. Strategi rencana aksi (*recovery plan*) dan opsi pemulihan (*recovery options*) serta opsi resolusi (*resolution plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) yang meliputi:
- (a) Penyusunan indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) meliputi indikator operasional, indikator keuangan dan indikator lainnya baik bersifat kuantitatif atau kualitatif yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi perusahaan secara signifikan
 - (b) Pemicu terjadinya tingkat kedaruratan (*trigger level*) dari setiap indikator yang digunakan dalam rencana aksi (*recovery plan*) untuk tujuan: [i] pencegahan sehingga perusahaan tetap dapat menjaga ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan atau ketentuan, [iii] perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha
 - (c) Kajian opsi pemulihan (*recovery options*) dilakukan berdasarkan: [i] urutan pilihan, [ii] penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan, [iii] penilaian terhadap dampak dari opsi pemulihan, dan [iv] penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan opsi pemulihan, serta [v] efektivitas dari setiap opsi pemulihan
 - (d) Penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan meliputi: [i] penilaian risiko yang didasarkan atas pengalaman atau ukuran lain yang relevan' [ii] analisis mengenai hambatan dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan cara mengatasi hambatan, [iii] penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan;
 - (e) Penetapan opsi resolusi untuk penanganan atau penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal (*default*) atau pailit, wajib menetapkan antara lain: [i] *trigger level* terjadinya resolusi, [ii] opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban perusahaan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN lain, [ii] opsi resolusi lain untuk menjaga keberlangsungan usaha yang memuat identifikasi atas aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur dasar yang kritikal dalam menjalankan operasionalnya
 - (f) Setiap opsi pemulihan dan opsi resolusi dilengkapi dengan potensi hambatan pelaksanaan opsi yang memuat paling sedikit: [i] analisis mengenai potensi hambatan, [ii] penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opso pemulihan dan opsi resolusi
- iv. Strategi pengungkapan rencana aksi (*recovery plan*) terhadap kedaruratan (*contingency*) kepada pihak internal dan pihak eksternal dengan menetapkan tata kelola fungsi penyediaan informasi, sistem informasi manajemen dan kerangka komunikasi

- b. Rencana darurat (*contingency plan*) tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; dan
- c. Rencana darurat (*contingency plan*) BUMN sistemik B disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat akhir bulan Juni 2025
- BUMN Sistemik B wajib menjalankan roadmap implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) berdasarkan hasil diagnostik ICOFR tahun 2024 dan menyampaikan perkembangan tindaklanjutnya sebagai bagian dari laporan manajemen risiko yang menjadi satu kesatuan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan BUMN
- Dalam menjalankan roadmap implementasi ICOFR, BUMN wajib menjalankan tata kelola tiga lini dalam implementasi tersebut, minimal antara lain:
 - a. Direksi melalui pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan struktur dan proses yang memadai telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola pengendalian internal yang efektif dan memastikan tujuan serta aktivitas perusahaan telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan
 - b. Lini pertama melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari dan wajib mengelola risiko yang menjadi tanggungjawabnya yang diantaranya mengidentifikasi, menilai, mengendalikan dan mengembangkan serta mengimplementasi kebijakan maupun prosedur internal untuk mengelola risiko tersebut
 - c. Lini kedua memberikan asistensi kepada lini pertama dalam mengelola risiko dan mengevaluasi serta menyetujui identifikasi risiko dan rancangan proses bisnis serta pengendalian internal yang dilakukan oleh Lini pertama
 - d. Lini ketiga memberikan jasa asuransi atau konsultasi independen dan objektif serta mengevaluasi efektifitas implementasi pengendalian internal melalui test of design dan test of operating effectiveness

3. Aspek ESG dalam APS

Aspek Environment, Social dan Governance dalam APS (termasuk fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / TJSL) :

1. Environment (E)
Aspek lingkungan (*Environmental*) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan maupun supplier/partner yang berdampak pada lingkungan secara fisik
2. Social (S)
Aspek Social (Social) merupakan aspek yang menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada aksi sosial, termasuk kepada pegawai baik langsung maupun tidak langsung, pelanggan, dan masyarakat sekitar.
3. Governance (G)
Aspek Tata Kelola (*Governance*) merupakan aspek yang menilai kualitas dan ketepatan waktu pengambilan keputusan, struktur tata kelola dan distribusi tanggungjawab kepada berbagai stakeholder.

Selain penjabaran ESG di atas, BUMN agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah persiapan dalam hal terdapat kewajiban implementasi atas pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam *International Financing Reporting Standars (IFRS) S1* dan *IFRS S2*
2. Menerapkan praktik TJSI secara holistik, dengan mengintegrasikan praktik TJSI di seluruh komponen perusahaan, diawali analisis perusahaan terkait TJSI dengan cakupan 7 subyek inti dalam SNI ISO 26000:2010, yaitu hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, pelibatan dan pengembangan komunitas/masyarakat, serta tata kelola organisasi;
3. Secara konsisten melaksanakan transformasi TJSI meliputi fokus pada dampak, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan pelibatan karyawan; dan
4. Mempertimbangkan ESG Rating untuk menjadi bagian dari KPI Direksi dalam Kontrak Manajemen

4. Visi dan Misi Klaster Masterplan 2025-2029 dan Arah Taktis RKAP 2025

Visi Misi RJPP 2025-2029	Arah Taktis RKAP 2025
<p>Menjadikan perusahaan sebagai kantor berita Indonesia, sumber informasi dan data terpercaya bagi publik, media, dunia usaha, serta pengambil keputusan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan marwah sebagai kantor berita dan korporasi multimedia yang modern serta menjadi flag carrier jurnalisme Indonesia (Nation State Public Relations) • Pengembangan kapabilitas analitika data dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dimiliki untuk menciptakan wawasan bernilai berbasis data • Menjadi hub bagi komunitas, media pers lokal, nasional dan global serta terintergasi dengan kanal distribusi konten berita dan public relation, berupa produk konvergensi multimedia 	<p>Mendorong akselerasi bisnis perusahaan dengan berbasis layanan publik, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penugasan Pemerintah dalam rangka diseminasi informasi publik berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Teknis • Menjadi kantor berita yang mampu mengikuti perkembangan media digital melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan Big data, serta pengembangan talenta unggul berbasis digital • Optimalisasi bisnis komersial untuk mewujudkan perusahaan yang sehat dan bertumbuh • Perbaiki model bisnis guna menurunkan jumlah piutang macet perusahaan

5. Aspirasi Pemegang Saham (APS) Fungsi Keuangan

- a. Audit atas laporan keuangan dan pelaksanaan *Audit Upon Procedure (AUP)* selambat-lambatnya tanggal 15 April 2025
- b. Pemegang saham juga berharap agar seluruh BUMN dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan ketentuan minimum opini auditor terhadap laporan keuangan audited BUMN pada level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan data di beberapa tahun terakhir, Perum LKBN Antara selalu mendapatkan opini WTP.
- c. Merealisasikan target keuangan sebagai berikut:
 - a) Ekspansi berkesinambungan yang diukur dengan:
 1. Ekspansi EBITDA dan CFO (*Cash Flow from Operation*), sebagai indikasi pertumbuhan skala bisnis (penjualan/top-line) yang berimbang dengan pengendalian biaya, dan pengelolaan modal kerja dari kegiatan perusahaan yang dibuktikan dengan arus kas positif dari kegiatan utama usaha perusahaan
 2. Net Profit
 - b) *Penciptaan Nilai Ekonomis (Economic Value Creation)* yang diukur melalui parameter tingkat kembalian investasi (Return on Invested Capital atau ROIC) di atas biaya modal tertimbang (Weighted Average Cost of Capital atau WACC) atas modal (atau Invested Capital).
- d. Secara bertahap dan dalam jangka panjang diharapkan dapat mempertahankan posisi keuangan yang berkesinambungan (*sustainable financial position*) dan mempertahankan rasio-rasio utang pendanaan pada level rasio dengan peringkat rating investement grade yang tercermin dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

- e. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dalam perencanaannya harus dikaji dan disepakati bersama oleh BUMN penerima tugas, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis pemberi penugasan Khusus untuk kemudian pelaksanaannya dilaporkan oleh BUMN Penerima Penugasan kepada Menteri-Menteri tersebut.
- f. Mencantumkan hal-hal berikut dalam RKAP 2025:
 - 1) Daftar aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan Menteri dan belanja modal (*Capital Expenditure* atau CAPEX) termasuk sumber pembiayaan dalam lampiran kontrak manajemen tahunan
 - 2) Proyeksi kontribusi kepada Negara, meliputi pajak, deviden dan Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya
- g. Sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Dewan Pengawas berdasarkan evaluasi Komite Audit menunjuk Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan pemeringkatan (*corporate rating*) dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Perum LKBN ANTARA diharapkan memperoleh tingkat Kesehatan minimal BBB (Sehat) dan akan menyampaikan hasil pemeringkatan kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya Mei 2025 sesuai arahan KBUMN.

6. APS Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Strategi Risiko dan Perencanaan Risiko dalam Penyusunan RKAP 2025:

- a) Penyusunan RKAP 2025 Perum LKBN ANTARA berbasis manajemen risiko sesuai dengan strategi risiko yang disusun sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Strategi Risiko Kementerian BUMN
- b) Dalam penyusunan perencanaan manajemen risiko pada RKAP 2025 termasuk di dalamnya meliputi perencanaan audit internal dan perencanaan tata kelola terintegrasi bagi BUMN Konglomerasi yang disusun mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023
- c) Pelaporan manajemen risiko mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 dan Petunjuk Teknis Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 atas laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian risk maturity index
- d) Keputusan dalam menetapkan pilihan sasaran dan strategi yang diusulkan dalam rancangan RKAP 2024 dilengkapi dengan pertimbangan berdasarkan hasil perhitungan antara risiko yang dapat diterima dengan hasil yang ditargetkan dapat diperoleh oleh perusahaan sebagaimana kebijakan strategi risiko BUMN.
- e) Direktur Risiko didorong mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang efektif dan efisien dalam mengendalikan risiko BUMN
- f) Direktur Risiko bertanggungjawab mengawasi pemenuhan komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko di perusahaan dan anak perusahaan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Nomor SK-3/DKU.MBU.05/2023 serta mengambil tindakan yang diperlukan termasuk mengkoordinasikan dengan direktur lain dan pihak eksternal lainnya apabila terjadi ketidaksesuaian
- g) Memastikan risiko-risiko ESG sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi atau pengujian dan mitigasi atas risiko terkait ESG dan penerapan TJSJ secara holistik di perusahaan yang relevan dengan fungsi SDM, IT, hukum dan Perundang-undangan
- Strategi mitigasi risiko ESG menjadi bagian dari proses bisnis utama perusahaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

7. APS Fungsi Sumber Daya Manusia

- a. Meningkatkan kematangan pengelolaan SDM (*human capital management maturity level*) secara berkelanjutan, berdasarkan arsitektur SDM (*human capital architecture*) BUMN
- b. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja (*employee productivity*) dengan formula yang relevan terhadap industri, dan target lebih baik dari rata-rata 3 tahun terakhir
- c. Meningkatkan keberagaman talenta dalam *nominated talent* (*average diversity in nominated talent*) perusahaan, khususnya melalui pengembangan talenta muda dan talenta perempuan.
- d. Menumbuhkan lingkungan kerja yang penuh rasa hormat dengan budaya AKHLAK yang inklusif, berdasarkan AKHLAK *Culture Journey* dan *Respectful Workplace Policy*
- e. Membangun kemitraan strategis dengan pegawai, termasuk di antaranya mengimplementasikan *employee well being* program sehingga terbangun budaya kerja yang kondusif dan berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan

8. APS Fungsi Teknologi dan Informasi

Perusahaan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2025-2029 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN serta hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan program RSTI tercantum dalam RKAP tahun 2024 dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan bisnis perusahaan
2. Menyampaikan penjelasan terkait dampak dari program RSTI dalam RKAP yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) *Business*:
Diperuntukkan bagi program yang memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan baik berupa peningkatan pendapatan perusahaan maupun efisiensi biaya operasional
 - b) *Process improvement*:
Diperuntukkan bagi program yang memberikan dampak untuk mempercepat proses bisnis perusahaan
 - c) *System improvement*:
Diperuntukkan bagi program yang secara khusus untuk mendukung peningkatan kapasitas sistem TI
 - d) *Regulatory*:
Diperuntukkan bagi program yang merupakan permintaan atau kewajiban dari instansi/lembaga pemerintah kepada BUMN
 - e) *Others*:

Diperuntukkan apabila terdapat evaluasi efektifitas lain yang tidak tergambarkan melalui 4 (empat) kategori yang disebutkan diatas

3. Menyampaikan rencana penggunaan TI berupa CAPEX dan Operational Expenditure (OPEX) Tahun 2025
- a. Menindaklanjuti audit atau penilaian penyelenggaraan TI dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Melakukan audit penyelenggaraan teknologi informasi baik secara mandiri (unit kerja dengan fungsi audit) maupun oleh pihak independen (dapat menjadi bagian audit kantor akuntan publik) yang paling sedikit mencakup:
 - a. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 - b. Kebijakan penyelenggaraan teknologi informasi yang berlaku pada masing-masing BUMN
 2. Menyampaikan rencana tindak lanjut area of improvement berdasarkan hasil audit dan atau assessment penyelenggaraan TI Tahun 2024 pada RKAP 2025
- b. KPI terkait kepemimpinan teknologi wajib mendukung sasaran strategis perusahaan yang dampaknya dapat diukur berupa peningkatan pendapatan maupun efisiensi operasional
- c. Mengikuti program Digital Talent BUMN dengan target peserta minimal 20% yang merupakan target dari tahun 2022-2025 dari jumlah keseluruhan SDM perusahaan (organik dan non-organik) termasuk anak perusahaan. Selanjutnya dalam rangka mendorong pencapaian jumlah digital talent BUMN, dan mempercepat transformasi digital, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bagi BUMN yang belum memiliki kurikulum/kamus pengembangan kompetensi digital karyawan, agar menyusun kurikulum dimaksud sesuai kebutuhan perusahaan bekerja sama dengan unit yang membidangi program pengembangan SDM dan menjadi program yang tercantum dalam RKAP
 2. Bagi BUMN yang telah memiliki kurikulum/kamus pengembangan kompetensi digital karyawan agar menyampaikan kurikulum dimaksud kepada Kementerian BUMN melalui surat resmi kepada Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Teknologi dan Informasi. Selanjutnya, rencana implementasi pelatihan digital talent tahun 2025 agar dicantumkan dalam RKAP, dan
 3. Menyampaikan secara berkala progres realisasi pengembangan kompetensi digital karyawan yang telah dilakukan melalui sistem informasi yang mengelola pengembangan SDM perusahaan
- d. Melaksanakan program berkaitan dengan keamanan siber diantaranya:
 1. Wajib melaksanakan program keamanan siber sesuai dengan Prioritas Penerapan Keamanan Siber BUMN dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan tetap memperhatikan program strategis keamanan siber lainnya
 2. Perum LKBN ANTARA dengan klasifikasi risiko sistemik B agar:
 - a. Memastikan tidak terjadi insiden siber yang menyebabkan berhentinya seluruh layanan dan/atau kebocoran data pribadi mencakup aplikasi publik, aplikasi core business dan aplikasi yang mengelola data pribadi
 - b. Membentuk Security Operations Center (SOC) atau fungsi yang bertanggung jawab untuk memantau dan memperhatikan
 3. Perum LKBN ANTARA telah melakukan asesmen Indi 4.0 dan belum menyelesaikan pemenuhan gap, untuk itu agar disampaikan juga rencana pemenuhan gap sesuai

dengan roadmap yang telah disusun serta program transformasi digital (contoh: penggunaan AI, IoT, Blockchain, dll) melalui RKAP;

4. Setiap Program Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN yang tercantum dalam RKAP agar dilaporkan pada Laporan Triwulan dan Tahunan sebagai bagian sub bab Teknologi kepada Kementerian BUMN

9. APS Fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- a. Melakukan penyesuaian dan penetapan prosedur operasional standar (*Standar Operational Procedure/SOP*) sesuai yang diatur dalam PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
- b. BUMN yang menjalankan diagnostic ICOFR atau mendapatkan catatan/temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPKP dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), temuan audit kepatuhan, serta temuan yang perlu perbaikan kembali (remedial), baik yang melibatkan pendisiplinan internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) dan atau penerusan penindakan pada APH agar melaporkan tindak lanjut implementasi tersebut secara periodik. Selanjutnya, jika terdapat potensi sengketa hukum agar ditempuh langkah-langkah mitigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Wajib melakukan upaya penanganan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN dengan mengedepankan proses mediasi sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
- d. Menentukan sendiri parameter pencapaian atas penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMN/anak perusahaan/perusahaan yang terafiliasi baik yang masih berproses di tahun depan maupun yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun berikutnya. Dalam hal penyelesaiannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, BUMN agar melaporkan perkembangannya kepada pemegang saham beserta target baru penyelesaian masalah tersebut
- e. Melakukan audit terhadap daftar aset tetap yang akan dan atau telah disampaikan melalui portal aset BUMN yang sedang dikembangkan oleh Kementerian BUMN
- f. Melakukan percepatan program sertifikasi hak atas aset tanah dan bangunan yang belum bersertifikat serta melakukan pengamanan aset milik BUMN dan dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan instransi terkait yang memiliki kewenangan terhadap aset milik BUMN
- g. Melakukan peningkatan fungsi hukum dalam rangka perbaikan penerapan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko
- h. Melakukan review terhadap perjanjian guna memitigasi risiko dan melakukan standarisasi dokumen perjanjian dalam rangka memperkuat posisi BUMN serta pengendalian risiko
- i. Melakukan peningkatan kompetensi insan hukum sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan Kementerian BUMN, guna mendukung pemerataan dan peningkatan kompetensi insan hukum untuk melaksanakan perannya dalam pengelolaan risiko hukum dan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di BUMN

10. APS Lainnya

- a. Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, termasuk pembuatan Laporan Tahunan sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023
- b. Memaksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di BUMN sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 perihal percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- c. Meningkatkan daya saing dengan perusahaan global.

BAB XIII

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUSAHAHAAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Perusahaan (*Key Performance Indicator – KPI*). Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, KPI bertujuan untuk:

- a. Memastikan pencapaian sasaran strategis BUMN;
- b. Meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN;
- c. Memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya;
- d. Mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN;
- e. Mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN; dan
- f. Menilai kinerja Direksi BUMN secara adil.

Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, maka perusahaan menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam rencana kinerja korporasi dalam Key Performance Indicator (KPI) Korporat tahun 2025. Penjelasan mengenai KPI korporat yang menjadi sasaran Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut :

KPI KORPORAT PERUM LKBN ANTARA TAHUN 2025

No	Indikator	ESG/C	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	Keterangan	
I	NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA							
	Finansial						60	
1	EBITDA	C	Miliar	61,02	Maximize	9	<p>Indikator yang menggambarkan kemampuan Perusahaan yang dilihat dari pendapatan diterima sebelum pengurangan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dengan tujuan untuk mengetahui laba Perusahaan sebelum ada pengurangan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.</p> <p>Formula yang digunakan yaitu,</p> <p><i>EBITDA = Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture.</i></p>	

No	Indikator	ESG/C	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	Keterangan
2	Rasio BOPO	C	Persentase	89	Minimize	8	<p>Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO, maka perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasionalnya.</p> <p>Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya</p> <p>Formula Rasio BOPO = $(\text{beban operasi} + \text{harga pokok penjualan}) / \text{penjualan bersih}$</p>
3	Cash Flow Operating	C	Rp. Miliar	47,25	Maximize	7	Indikator yang menunjukkan kinerja perusahaan dilihat dari kegiatan arus kas operasi.
Operasional							
4	Berita Anti Hoax	G	Jumlah berita anti hoax	450	Maximize	9	Menjawab kebutuhan negara untuk produksi berita anti hoax yang sangat dinamis, diukur melalui kecepatan waktu respon berita hoax sejak pertama kali termonitor dalam radar hoax hingga menjadi produk berita anti hoax dalam kanal perusahaan
5	Peningkatan Performa Portal <i>antaranews.com</i>	C	Jumlah Pageview portal <i>antaranews.com</i>	120 juta	Maximize	9	Sebagai portal berita milik ANTARA, Perum LKBN ANTARA akan meningkatkan kualitas performa portal <i>antaranews.com</i> sebagai tindak lanjut dari peningkatan tingkat keterbacaan. Indikator ketercapaian melalui peningkatan pageview
6	Peningkatan Performa Sosial Media milik LKBN ANTARA	C	Persentase Kenaikan Jumlah Followers	15	Maximize	9	Sebagai tindak lanjut dari peningkatan investasi aset digital perusahaan (sosial media), maka Perum LKBN ANTARA akan terus berupaya meningkatkan performa sosial media milik LKBN ANTARA dengan menghasilkan konten-konten sosial media yang akan mampu meningkatkan jumlah followers sosial media LKBN ANTARA
Sosial							
7	Tingkat kelolosan produk berita PSO	S	Persentase	85	Maximize	9	Ketercapaian kelolosan seluruh jenis produk berita PSO dibandingkan dengan jumlah produksi, dengan tujuan meningkatkan kualitas produksi berita terhadap penugasan Pemerintah. Formula yang digunakan yaitu, jumlah berita PSO yang lolos verifikasi dibandingkan jumlah produksi berita PSO dengan target sebesar 85%.

No	Indikator	ESG/C	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	Keterangan	
II	INOVASI MODEL BISNIS						14	
8	Pelaksanaan monetasi aset melalui layanan <i>MICE</i> (<i>meeting, incentive, conference, exhibition</i>)	C	Persentase Okupansi	30	Maximize	7	Ketercapaian kelolosan seluruh jenis produk berita PSO dibandingkan dengan jumlah produksi, dengan tujuan meningkatkan kualitas produksi berita terhadap penugasan Pemerintah. Formula yang digunakan yaitu, jumlah berita PSO yang lolos verifikasi dibandingkan jumlah produksi berita PSO dengan target sebesar 85%.	
9	Penerapan <i>Global Rate Card</i> PT AntaraETP	C	Waktu	TW IV	Maximize	7	PT Antara ETP menargetkan izin penerapan <i>Global Rate Card (GRC)</i> diberikan oleh Bank Indonesia kepada AntaraETP pada akhir triwulan ke 4 2025	
III	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI						14	
10	<i>Cyber Security Zero Breach Incident</i>	C	Waktu Penanganan	6 jam	Minimize	7	Untuk memastikan tidak adanya insiden berupa berhentinya layanan utama aplikasi dan/atau adanya kebocoran data Perusahaan	
11	Penerapan ERP berupa integrasi fungsi sistem informasi	G	Persentase	75	Maximize	7	<p>Pelaksanaan integrasi dari aplikasi perusahaan yang bersifat fungsional dan teknis dengan memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya.</p> <p>Untuk menyediakan informasi real-time tentang aktivitas Perusahaan untuk kemudahan pengambilan keputusan bagi top manajemen sistem yang akan diintegrasikan (kelanjutan dari roadmap ERP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. e-procurement 2. Asset Management 3. Customer Relation Management (CRM) 4. Salesforce 5. Modul GRC 6. Modul Pengaduan Layanan 7. Modul Peminjaman Kendaraan 8. Dropbox aplikasi bukti siar PSO 	
No	Indikator	ESG/C	Satuan	Target	Polaritas	Bobot	Keterangan	
IV	PENINGKATAN INVESTASI						6	

	12	Persentase Penyerapan Investasi	C	Persentase	70	Maximize	6	Rencana CAPEX 2025: 1. Pembangunan Wisma Grafika 2. Pengadaan Alat Kerja dan Alat Pendukung Kerja 3. Pengadaan Mebeulair 4. Pembelian Lahan Kantor dan Rumah Dinas Biro 5. Renovasi Rumah Dinas dan Kantor Biro 6. Pembelian Kendaraan Operasional Biro
V	PENGEMBANGAN TALENTA						6	
	13	Peningkatan Keberagaman Talenta melalui peningkatan rasio talenta muda (maksimal 42 tahun) dan perempuan di struktural level BOD-1 dan BOD-2	S	Persentase	30	Maximize	6	Dalam rangka regenerasi, menciptakan talenta berkualitas sesuai standar yang ditetapkan KBUMN, inklusivitas bagi semua pegawai serta pemberdayaan perempuan dan talenta muda perusahaan. Perum LKBN ANTARA berupaya untuk meningkatkan pemenuhan talenta muda dan perempuan pada setiap jenjang dalam struktur perusahaan. Sebagai perusahaan dengan struktur organisasi dengan tingkatan yang pendek dan jumlah karyawan dengan skala medium, sehingga ada keterbatasan perusahaan untuk mampu memenuhi ketersediaan nominated talent. Untuk itu, Perum LKBN ANTARA bermaksud melakukan <i>grooming</i> untuk menciptakan talenta pimpinan puncak perusahaan dari talenta muda dan perempuan pada level BOD-1 dan BOD-2 di tahun 2025
	TOTAL						100	

Adapun Glossary KPI di atas sebagai berikut:

Indikator I.1 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	EBITDA
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kemampuan Perusahaan yang dilihat dari pendapatan diterima sebelum pengurangan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi
Tujuan KPI	Untuk mengetahui laba Perusahaan sebelum ada pengurangan bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi
Satuan yang Digunakan	Miliar Rp
Formula Penilaian	$EBITDA = \text{Operating Income} + \text{Depreciation Expenses} + \text{Amortization Expenses} + \text{Gain (loss) on Forex} + \text{Income from Associated Entities and Joint Venture}$
Target	Rp. 61,02 Miliar
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realiasi nilai EBTIDA tahun berjalan
Keterangan	EBITDA perusahaan diharapkan mencapai Rp. 61,02 Miliar dalam tahun 2025, dengan kinerja Komersil yang semakin meningkat. EBITDA tersebut telah memperhitungkan dampak dari aksi korporasi likuidasi Dana Pensiun tahun 2025
Indikator I.2 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Rasio BOPO
Definisi KPI	Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil nilai Rasio BOPO, maka perusahaan semakin efisien dalam menjalankan aktivitasnya.
Tujuan KPI	Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$\text{Formula Rasio BOPO} = \frac{\text{beban operasi} + \text{harga pokok penjualan}}{\text{penjualan bersih}}$
Target	Tahunan: 89%
Polaritas	Minimize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Perbandingan total biaya operasional dengan pendapatan operasional pada tahun berjalan.

Indikator I.3 (Finansial)	Nilai Ekonomi dan sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Arus Kas Operasi
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja perusahaan dilihat dari kegiatan arus kas operasi.
Tujuan KPI	Mengukur kemampuan Perusahaan untuk menentukan modal operasional perusahaan
Satuan yang Digunakan	Miliar Rp
Formula Penilaian	Formula Target diperhitungkan sebagai berikut: $\text{NOCF} = \text{Total Penerimaan Kas dari kegiatan operasi} - \text{Total Pengeluaran Kas dari kegiatan operasi}$
Target	Rp. 47,25 Miliar
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Realiasi nilai CFO tahun berjalan
Keterangan	Indikator yang menunjukkan kinerja perusahaan dilihat dari kegiatan arus kas operasi.
Indikator I.4 (Operasional)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax
Definisi KPI	Ketercapaian produksi berita untuk memberikan informasi yang mencerahkan baik pada khususnya dimana masyarakat mendapatkan berita/informasi yang benar, terverifikasi dan bertanggungjawab
Tujuan KPI	Memperkuat posisi Kantor Berita ANTARA sebagai media penjernih informasi.
Satuan yang Digunakan	Jumlah Berita
Formula Penilaian	Jumlah produksi berita cegah hoax dalam satu tahun
Target	450 berita
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Sekretariat Redaksi
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Jumlah produksi berita cegah hoax dalam satu tahun

Indikator I.5 (Operasional)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Tingkat Keterbacaan Portal <i>antaranews.com</i>
Definisi KPI	Jumlah halaman yang dibaca penuh oleh pengunjung pada portal <i>antaranews.com</i>
Tujuan KPI	Untuk melihat daya tarik, daya saing dan relevansi pemberitaan ANTARA di mata masyarakat
Satuan yang Digunakan	Jumlah Pageview
Formula Penilaian	Jumlah pageview berita ANTARA dalam satu tahun
Target	120.000.000/tahun
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Sekretariat Redaksi
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Jumlah pageview di <i>antaranews.com</i>
Indikator I.6 (Operasional)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Peningkatan Performa Sosial Media milik ANTARA
Definisi KPI	Peningkatan tata kelola konten sosial milik ANTARA dalam rangka peningkatan followers
Tujuan KPI	Bagian dari <i>branding</i> perusahaan untuk dapat lebih dikenal dan menambah tingkat kepercayaan publik untuk merujuk ANTARA sebagai referensi berita
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	Persentase kenaikan <i>followers</i> media sosial AntaraNews dibanding tahun 2024
Target	15%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan dan Direktorat Komersil, Pengembangan Bisnis & Teknologi Informasi
Pengelola Data KPI	Redaksi Pelaksana dan Divisi Teknologi Informasi
Sumber Data	Laporan Triwulan
Jenis Pengukuran	Peningkatan jumlah Followers

Indikator I.7 (Sosial)	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
Nama KPI	Tingkat kelolosan produk berita PSO
Definisi KPI	Ketercapaian kelolosan dengan target 85% dari seluruh jenis produk berita PSO dibandingkan dengan target kuota atau jumlah produksi (tidak lebih dari 120% dari kuota PKS)
Tujuan KPI	Meningkatkan kualitas produksi berita terhadap penugasan Pemerintah
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	Jumlah berita PSO yang lolos verifikasi dibandingkan jumlah produksi berita PSO
Target	85%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Pemberitaan
Pengelola Data KPI	Koordinator Biro dan PSO
Sumber Data	SP2MT
Jenis Pengukuran	Ketercapaian kelolosan produksi berita PSO
Indikator II.8	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan
Definisi KPI	Pelaksanaan komersialisasi aset Perusahaan berupa ruang di ANTARA HERITAGE CENTER/AHC, Pasar Baru untuk meningkatkan pendapatan dan <i>value</i> Perusahaan
Tujuan KPI	Untuk meningkatkan pendapatan dan value Perusahaan
Satuan yang Digunakan	Persentase Okupansi
Formula Penilaian	Tingkat okupansi Antara Heritage Center
Target	30%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Layanan Media & Komunikasi
Sumber Data	Laporan Keuangan
Jenis Pengukuran	Persentase keterisian ruangan sebagai kegiatan monetasi aset dalam jangka waktu satu tahun
Keterangan	Tahun 2025, Perum LKBN ANTARA berupaya melakukan peningkatan layanan MICE melalui peningkatan okupansi venue aset (ANTARA HERITAGE CENTER/AHC, Pasar Baru) yang dimiliki oleh LKBN Antara dibandingkan tahun 2024

Indikator II.9	Inovasi Model Bisnis
Nama KPI	<i>Pengenaan Global Rate Card PT ANTARA ETP</i>
Definisi KPI	Indikator yang mengukur pengenaan Rate Card Bulanan untuk transaksi Forex di Platform Antara ETP
Tujuan KPI	Mengoptimalkan pendapatan dari transaksi forex di Platform Antara ETP melalui penerapan <i>Global Rate Card</i>
Satuan yang Digunakan	Waktu
Formula Penilaian	Bulan pengenaan <i>Global Rate Card</i>
Target	Triwulan 4
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direktorat Utama
Pengelola Data KPI	Anak Usaha Bisnis ETP
Sumber Data	Laporan keuangan tahunan
Jenis Pengukuran	Keberhasilan Pengenaan <i>Global Rate Card</i> di tahun 2025

Indikator III.10	Kepimpinan Teknologi
Nama KPI	<i>Cyber Security Zero Breach Incident</i>
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan Untuk memastikan tidak adanya insiden berupa berhentinya layanan utama aplikasi dan/atau kebocoran data perusahaan
Tujuan KPI	Memastikan tidak adanya insiden berhentinya layanan utama atau kebocoran data perusahaan dalam praktek teknologi informasi di perusahaan
Satuan yang Digunakan	Waktu Penanganan
Formula Penilaian	SLA di internal Perusahaan
Target	Maksimal 6 Jam
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Teknologi Informasi
Sumber Data	Laporan Manajemen
Jenis Pengukuran	Laporan Penanganan <i>Downtime</i>

Indikator III.11	Kepimpinan Teknologi
Nama KPI	Penerapan ERP di Perusahaan
Definisi KPI	Pelaksanaan integrasi dari aplikasi perusahaan yang bersifat fungsional dan teknis dengan memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya.
Tujuan KPI	Menyediakan informasi <i>real-time</i> tentang aktivitas Perusahaan untuk kemudahan pengambilan keputusan bagi top manajemen
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	75% terlaksananya komponen utama dan pendukung sistem ERP berikut: 1. E-procurement 2. Asset Management 3. Customer Relation Management 4. Salesforce 5. Modul GRC 6. Modul Pengaduan Layanan 7, Modul Peminjaman Kendaraan 8.Dropbox bukti siar PSO
Target	75%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Teknologi Informasi
Sumber Data	Laporan Triwulan
Jenis Pengukuran	Ketercapaian pelaksanaan integrasi ERP
Indikator IV.12	Peningkatan Investasi
Nama KPI	Persentase Penyerapan Investasi
Definisi KPI	Ketercapaian realisasi atas CAPEX dari target yang ditentukan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati
Tujuan KPI	Mengetahui kesesuaian realisasi investasi yang dilakukan untuk mempercepat transformasi bisnis perusahaan
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	$(\text{Jumlah realisasi CAPEX dibandingkan target CAPEX}) \times 100\%$
Target	70%
Polaritas	Maximize
Penanggungjawab KPI	Direksi
Pengelola Data KPI	Divisi Keuangan
Sumber Data	Laporan Keuangan
Jenis Pengukuran	Ketercapaian realisasi CAPEX sesuai target

Indikator V.13	Pengembangan Talenta
Nama KPI	Peningkatan Keberagaman Talenta melalui peningkatan Rasio Top Talent Muda (<42 tahun) dan perempuan di level struktural BOD-1 dan BOD-2
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan jumlah pemimpin muda ≤ 42 tahun dan jumlah perempuan dalam level struktural manajemen (BoD-1 dan BOD-2)
Tujuan KPI	Untuk menciptakan inklusifitas dalam lingkungan kerja
Satuan yang Digunakan	Persentase
Formula Penilaian	30% dari jumlah posisi struktural terisi, dengan formula: rata-rata jumlah talenta muda di posisi struktural / jumlah posisi struktural tersedia dan jumlah perempuan di posisi struktural / jumlah posisi struktural tersedia
Target	30%
Polaritas	Tahunan
Penanggungjawab KPI	Maximize
Pengelola Data KPI	Direktorat Utama
Sumber Data	Divisi Manajemen SDM (MSDM)
Jenis Pengukuran	Ketercapaian rasio talent muda dan perempuan

Tabel 11.1. Glossary KPI Perum LKBN ANTARA Tahun 2025

BAB XIV

HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KEPUTUSAN MENTERI

Untuk tahun 2025, Perum LKBN ANTARA mengusulkan beberapa hal yang memerlukan Keputusan Menteri BUMN sebagai pemegang saham, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan sesuai dengan ketentuan di PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, bersama ini kami mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghapusan Piutang Perusahaan, dengan target nominal 15,8 Miliar Rupiah berupa Piutang macet hingga 2018.

LAMPIRAN

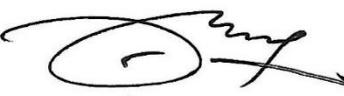
Parameter Risiko

Kategori	Selera	Parameter	Limit
Bisnis	Strategis	Jumlah pipeline project IMCS per bulan	5
Pemberitaan	Strategis	Jumlah pembaca antaranews per bulan	10 juta
Keuangan	Konservatif	Interest bearing debt to ebitda	1
Keuangan	Konservatif	Kas akhir bulan	Rp 40 miliar
Keuangan	Konservatif	Nilai tukar IDR-USD	Rp 16.000
Keselamatan Kerja	Tidak Toleran	Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat tetap	0
Hukum dan Kepatuhan	Tidak Toleran	Jumlah tuntutan yang masuk ke persidangan	0
Teknologi Informasi	Tidak Toleran	Jumlah serangan siber berdampak "darurat sistemik"	0

Jakarta, 6 November 2024


Kemal Effendi Gani
Ketua Dewan Pengawas


Widodo Muktiyo
Anggota


Akhmad Munir
Direktur Utama


Irfan Junaidi
Direktur Pemberitaan

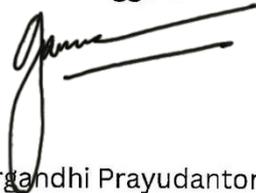

Mayong Suryo Laksono
Anggota


Monang Sinaga
Anggota


Jaka Sugiyanta
Direktur Komersil,
Pengembangan Bisnis,
dan IT


Nina Kurnia Dewi
Direktur Keuangan
dan MR


Ariawan
Anggota


Virgandhi Prayudantoro
Anggota